



Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA 2019



**Kementerian PPN/
Bappenas**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)**



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B.133/M.PPN/SES/OT.03/02/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

Jakarta, 28 Februari 2020

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 2. Yth. Menteri Keuangan
- di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

WA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2019 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, **27** Februari 2020

Inspektur Utama,



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA

NIP 19630225 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal maupun horizontal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 beserta pemutakhirannya. Selain itu, juga telah menghasilkan Rancangan Perpres tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2019 terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan jajaran di bawahnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan nasional. Disamping itu, telah melakukan pengelolaan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dengan baik sehingga dapat mempertahankan opini WTP.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, dapat menjadi acuan dan tolak ukur agar meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2020

WA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


Suharso Monoarfa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2019. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2019, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, penyusunan LKj diharapkan dapat memperlihatkan penajaman proses bisnis utama Kementerian PPN/Bappenas sebagai integrator perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, rancangan IKU diarahkan pada penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengendalian atas rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan, serta sebagai inovator dalam mengembangkan model-model ekonomi, melalui koordinasi strategis lintas sektor dan kegiatan percepatan lainnya.

CAPAIAN KINERJA

1. Integrasi “% Keselarasan Muatan RKP dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan muatan RKP 2020 sesuai dengan sasaran RPJMN 2020-2024.
2. Integrasi “% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2020” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan terhadap muatan Renja K/L yang mendukung sasaran RKP 2019..
3. Sinkronisasi “% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2020” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan terhadap muatan (output kegiatan) RKA K/L telah dianggarkan sesuai dengan sasaran RKP 2020.
4. Sinergi “% Keselarasan muatan RKP dengan RKPD Provinsi 2020” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan capaian muatan RKP 2020 dengan RKPD Provinsi 2020.

Capain IKU 1

“Persentase (%)
Keselarasan Rencana
Pembangunan Nasional
dengan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga/
Daerah”

100%

Capaian IKU 2
"Rancangan PerPres RKP"

100%

Indikator Kinerja Rancangan Perpres RKP 2020 telah tercapai 100% dengan terbitnya Perpres Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan dimutakhirkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. RKP Tahun 2019 memuat tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". RKP 2020 merupakan RKP transisi yang menjembatani RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024.

Capaian Kinerja Pengendalian RKP 2019 melalui IKU "Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L" telah mencapai 90,35% melalui penilaian capaian sasaran PN dan capaian dukungan K/L.

Kinerja pelaksanaan ke 5 PN dalam RKP 2019 berada pada kategori "Baik. Secara umum, hubungan sebagian besar pencapaian sasaran PN-PP-KP telah selaras dengan dukungan output K/L yang diberikan.

Capaian IKU 3

"Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah"

90,35%

Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas, telah tercapai dengan "Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini WTP dari BPK dan Nilai RB dan SAKIP dari Kementerian PAN dan RB.

Opini BPK atas Laporan Keuangan

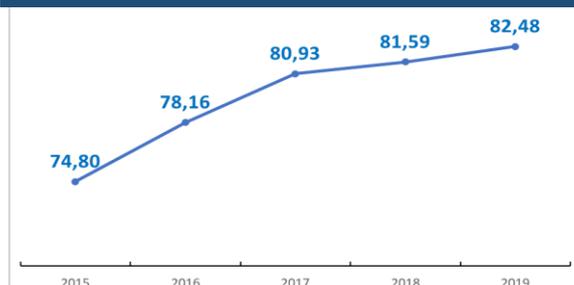
12 kali WTP

Sejak **2008** hingga **2019**

Sejak tahun 2008 s.d. 2019 telah meraih predikat WTP ke dua belas kalinya secara berturut-turut. WTP tersebut diberikan oleh BPK setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang menyatakan: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori nilai Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 81,59 (2018) menjadi 82,48 (2019).

Kategori Nilai Reformasi Birokrasi



Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas mencapai nilai 77,49 (BB), sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi nilai 80,08 (A). Pada tahun 2019, Penilaian hasil evaluasi RB dan SAKIP naik menjadi 81,19.

CAPAIAN ANGGARAN



Pagu 2019

1.833,95
miliar



Realisasi 2019

1.581,73
miliar

86,25%

RM
1.579,93
miliar

RMP
33,31
miliar

PHLN
220,70
miliar

RM
1.357,56
miliar

85,92%

RMP
29,06
miliar

87,23%

PHLN
195,10
miliar

88,40%

Kementerian PPN/Bappenas pada Tahun 2019 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.833,95 milyar bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.579,93 milyar, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp. 33,31 miliar dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 220,70 miliar.

Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.581,73 miliar (86,25%) terdiri dari RM sebesar Rp. 1.357,56 miliar (85,92%), RMP sebesar Rp. 29,06 miliar (87,23%) dan PHLN sebesar Rp. 195,10 miliar (88,40%). Realisasi anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,01% dari realisasi anggaran tahun 2018 (81,24%). Pencapaian realisasi tahun 2019 sebesar 86,25% telah dilakukan efisiensi belanja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-2
1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	I-3
1.2.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas.....	I-3
1.2.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas.....	I-5
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA	I-5
1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	I-7
1.4.1. Potensi Strategis	I-7
1.4.2. Permasalahan Strategis.....	I-7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	II-1
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	II-2
2.1.1. Visi dan Misi.....	II-2
2.1.2. Rencana Strategis	II-3
2.1.3. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas	II-4
2.2. PERJANJIAN KINERJA	II-5
2.2.1. Pemetaan IKU Kementerian ke UKE I dan II Tahun 2019	II-6
2.2.2. Penyempurnaan Manajemen Kinerja	II-6
2.2.3. Pemetaan <i>Bridging</i> IKU Existing dengan Rancangan IKU 2020-2024...II-8	
2.3. CASCADING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	II-13
2.4. KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	II-15
2.5. ALOKASI ANGGARAN.....	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. CAPAIAN KINERJA	III-2
3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2019	III-2
3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	III-3
3.1.2.1. Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah.....	III-5
3.1.2.2. Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L.....	III-29

3.1.2.3.	Rancangan Perpres RKP 2020.....	III-42
3.1.2.4.	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.....	III-46
3.1.2.5.	Kinerja Lainnya	III-53
3.2.	PAGU DAN REALISASI ANGGARAN	III-60
3.2.1.	Perkembangan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019	III-60
3.2.2.	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019	III-61
BAB IV	PENUTUP	IV-1
4.1.	SIMPULAN.....	IV-1
4.2.	TINDAK LANJUT.....	IV-2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2019	II-5
Tabel 2.2.	Pemetaan IKU Kementerian PPN/Bappenas 2019	II-6
Tabel 2.3.	Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian	II-14
Tabel 2.4.	Program dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.....	II-20
Tabel 3.1.	Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2018 dan 2019	III-2
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.....	III-4
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Capaian Kinerja IKU “% Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah” Tahun 2019....	III-8
Tabel 3.4.	Rekapitulasi Capaian IKU “% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” Tahun 2019 Triwulan III	III-29
Tabel 3.5.	Capaian PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.....	III-31
Tabel 3.6.	Capaian PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.....	III-33
Tabel 3.7.	Capaian PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	III-36
Tabel 3.8.	Capaian PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	III-38
Tabel 3.9.	Capaian PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	III-40
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian IKU "Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas" Tahun 2017-2019.....	III-47
Tabel 3.11.	Upaya Perbaikan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB	III-52
Tabel 3.12.	Pagu dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 – 2019.....	III-61
Tabel 3.13.	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019	III-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	I-4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas	I-5
Gambar 1.3.	Kekuatan SDM Kementerian PPN/Bappenas.....	I-6
Gambar 2.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	II-2
Gambar 2.2.	Penguatan Peran Kementerian PPN/Bappenas	II-3
Gambar 2.3.	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja 2019.....	II-3
Gambar 2.4.	Roadmap Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas	II-8
Gambar 2.5.	Pemetaan IKU 2019 menuju IKU 2020-2024	II-9
Gambar 2.6.	Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas .	II-10
Gambar 2.7.	Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi.....	II-11
Gambar 2.8.	Cascading IKU Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 kedalam UKE I	II-13
Gambar 2.9.	Proses Pengendalian Pelaksanaan RKP 2019.....	II-17
Gambar 2.10.	Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2019	II-20
Gambar 2.11.	Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019	II-21
Gambar 3.1.	Pemetaan 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan 5 PN RKP 2020.....	III-6
Gambar 3.2.	Penanggung Jawab Prioritas Nasional (PN) RKP 2020.....	III-6
Gambar 3.3.	Pemetaan Jumlah Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang mendukung PN dalam RKP 2020	III-7
Gambar 3.4.	Alur Kerja Proses Perpres RKP 2020.....	III-42
Gambar 3.5.	Alur Kerja Kerangka Ekonomi Makro	III-43
Gambar 3.6.	Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro	III-44
Gambar 3.7.	Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha	III-45
Gambar 3.8.	Perkembangan Nilai RB dan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 s/d 2019.....	III-49
Gambar 3.9.	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2015-2019	III-51
Gambar 3.10.	Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 – 2019.....	III-52
Gambar 3.11.	Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019.....	III-60
Gambar 3.12.	Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 – 2019.....	III-60
Gambar 3.13.	Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018 dan 2019.....	III-63



BAB 1

Pendahuluan



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai unsur pemerintahan bertanggungjawab untuk melakukan perencanaan pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah serta memperkuat percepatan pencapaian target pembangunan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019 yang kemudian diwujudkan melalui Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.

Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020; (2) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; dan (3) Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan capaian atas pelaksanaan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2019. Laporan Kinerja sekaligus digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1. Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (Pasal 2), Kementerian PPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 3 Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappenas mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara;
- e. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;

- f. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas;
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang dikelompokkan menjadi empat bagian yang saling terkait. Peran tersebut adalah sebagai penyusun kebijakan (*policy maker*), *think-tank*, koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan administrator dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergi, dan kredibel. Ilustrasi peran dan fungsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

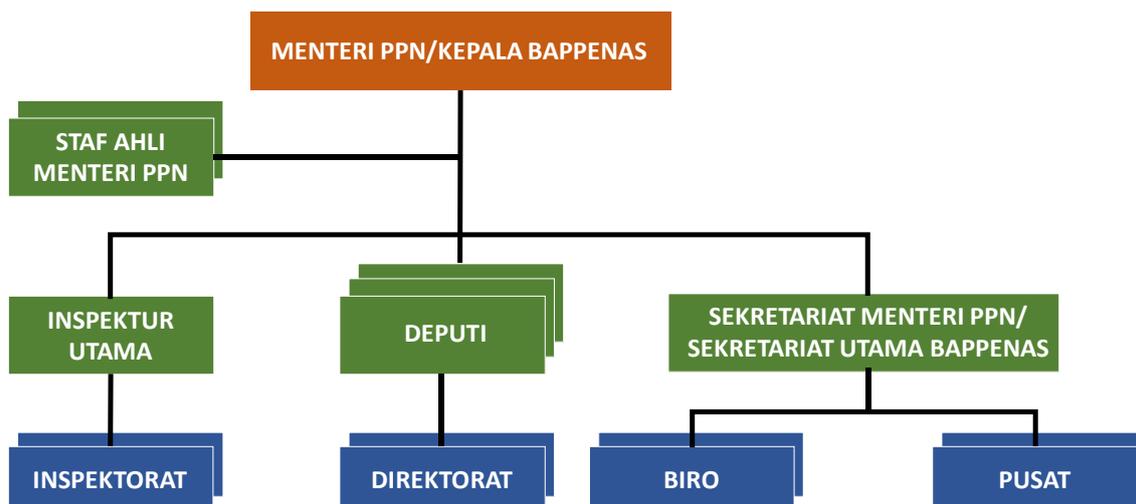
Sesuai dengan Pasal 21 Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN disebutkan bahwa “Kementerian PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Bappenas”.

1.2.2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Inspektur Utama, 9 (sembilan) Deputi, dan 5 (lima) Staf Ahli.

Selain itu, terdapat 5 (lima) unit kerja Biro, 2 (dua) unit kerja Inspektorat, dan 50 (lima puluh) unit kerja Direktorat. Disamping itu, terdapat 3 (tiga) pusat, yaitu (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren); (2) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang); dan (3) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK). Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas



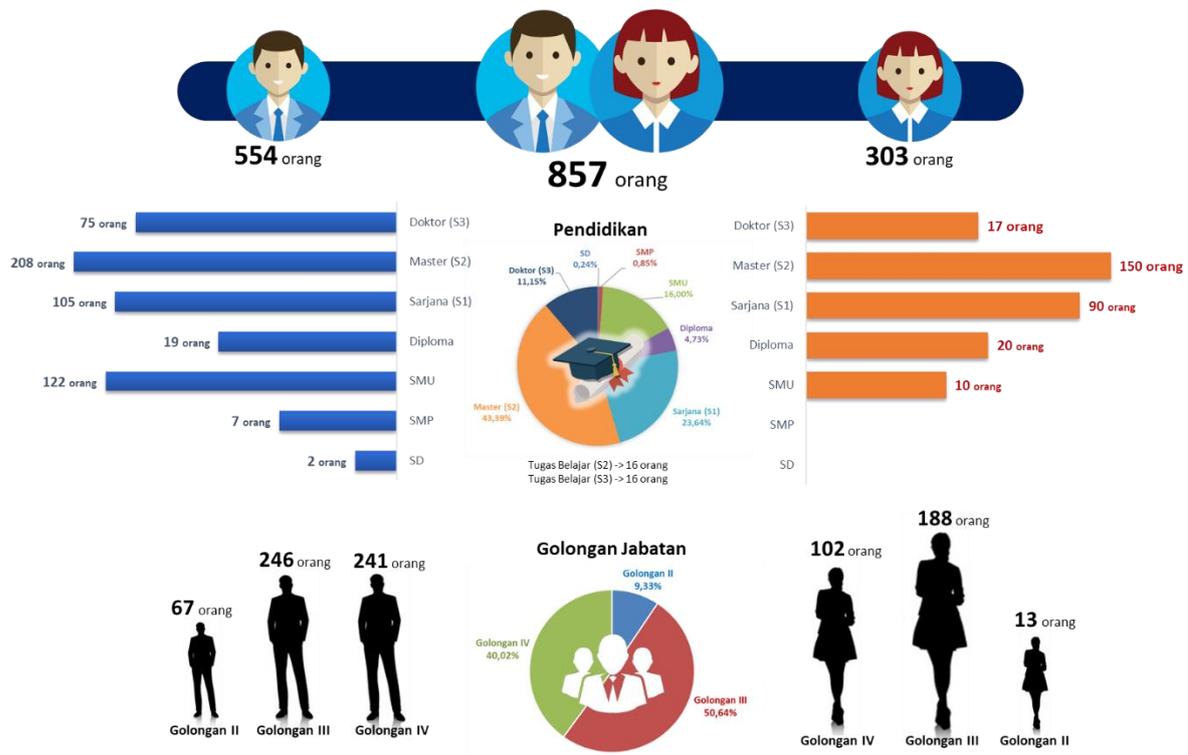
Keterangan: setiap UKE I memiliki beberapa UKE II

Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memahami proses bisnis serta didukung oleh kuantitas, kualitas dan kompetensi.

Gambar 1.3. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2019

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah pegawai PNS Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 857 orang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 554 orang (64,64%) dan perempuan sebanyak 303 orang (35,36%). Berdasarkan kualitas Pendidikan mayoritas berpendidikan lulusan Master (S2) sebesar 43,39%, Sarjana (S1) sebesar 23,64%, Doktor (S3) sebesar 11,15%, Diploma (D3) sebesar 4,73%, serta berpendidikan SMU sebesar 16% dan beberapa masih berpendidikan SMP dan SD. Jika dilihat dari golongan jabatan pegawai, mayoritas terbesar ber-Golongan III sebesar 50,64%, Golongan IV sebesar 40,02% dan sisanya Golongan II sebesar 9,33%.

Seiring dengan penajaman dan penambahan peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dibutuhkan sumber daya untuk mencapai tantangan tersebut diantaranya dilakukan dengan penambahan SDM dan pengembangan kompetensi, serta perbaikan tata kelola kegiatan dan anggaran.

1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

1.4.1. Potensi Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian PPN/Bappenas memiliki potensi strategis, antara lain:

1. Posisi dan peran Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah koordinasi langsung Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
2. *Clearing house* program pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas yang berperan memastikan: (1) seluruh rencana pembangunan (K/L maupun Instansi lainnya) sesuai dengan RPJMN dan RKP; (2) memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarannya; dan (3) mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Pusat data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas sebagai integrator sumber data dan informasi terkini khususnya dalam penyusunan *evidence-based planning* yang menghasilkan model dan inovasi pembangunan nasional.
4. Penyeimbang atau *counter-balance* dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan adanya penguatan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan potensi untuk menghindari ketidaktepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
5. Penyederhanaan eselonisasi, yaitu perubahan jabatan Eselon III menjadi Fungsional Perencana untuk mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan nasional.

1.4.2. Permasalahan Strategis

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

1. Belum mengoptimalkan *networking* dengan *stakeholder* untuk mencapai perencanaan pembangunan nasional.
2. Belum terdapatnya regulasi dan kebijakan terkait peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house*.
3. Belum terdapatnya kebijakan dan tata kelola dalam penyusunan *evidence-based planning* yang menghasilkan model dan inovasi pembangunan nasional.
4. Belum memaksimalkan keterlibatan institusi yang memiliki peran pengendalian.
5. Belum dilakukan pemetaan manajemen SDM sesuai dengan kebijakan penghapusan eselonisasi.

BAB 2

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja





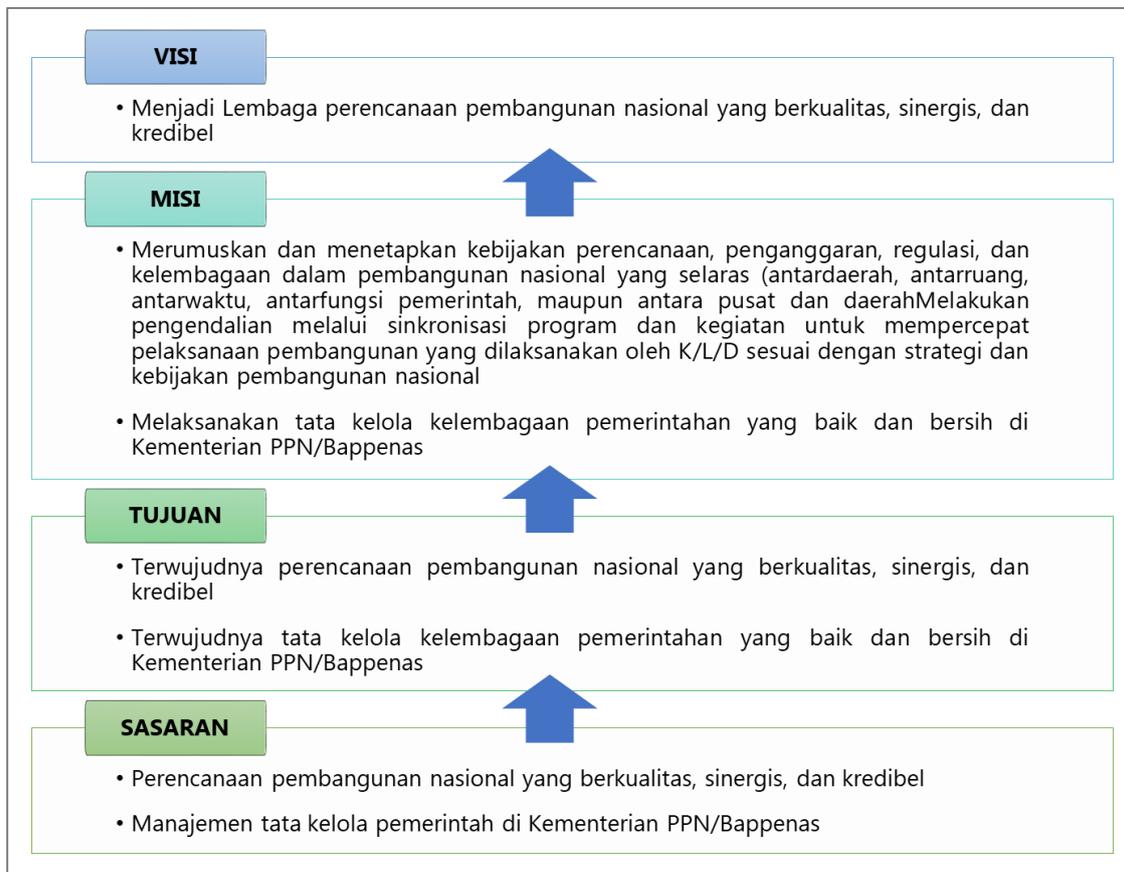
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

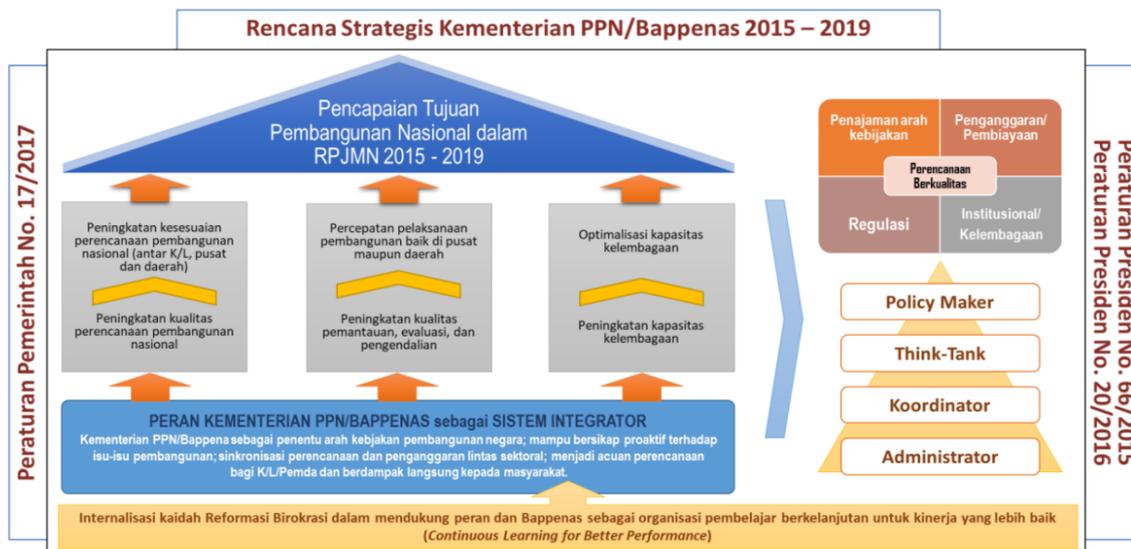


Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

2.1.2. Rencana Strategis

Berikut penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

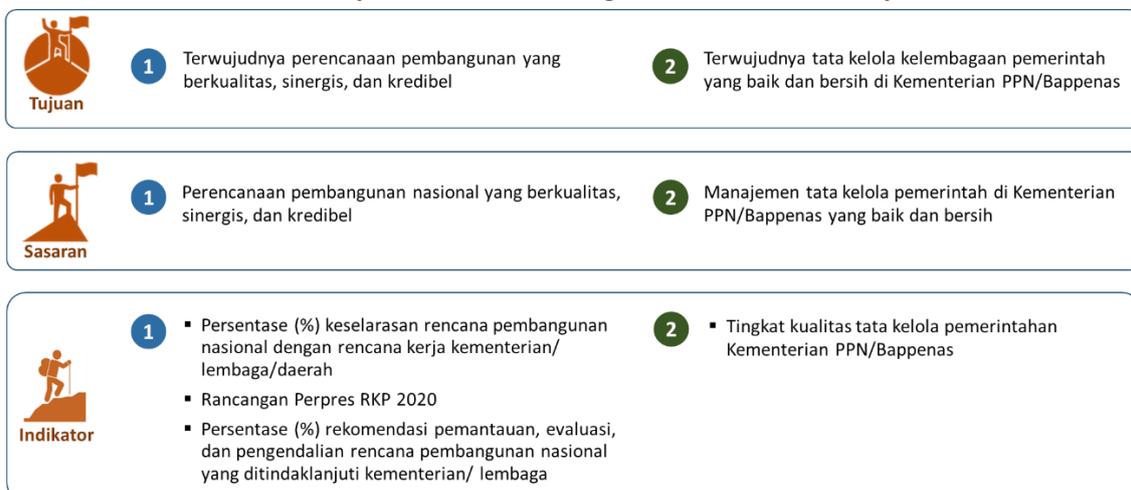
Gambar 2.2. Penguatan Peran Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Dengan penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka tujuan, sasaran, dan indikator ditetapkan sebagai perwujudan visi dan melaksanakan misi Kementerian PPN/Bappenas. Dari penetapan tujuan, sasaran dan indikator tersebut, diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja 2019



Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

2.1.3. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas

Sesuai Renstra 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari 2 (dua) program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program utama yang menjabarkan tugas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan program generik merupakan program pendukung untuk melakukan manajemen internal di Kementerian PPN/Bappenas. Di tahun 2019, terjadi penataan program generik yang semula memiliki 3 (tiga) program generik menjadi 2 (dua) program generik, yaitu penggabungan Program Peningkatan Saran Prasarana Aparatur Bappenas dengan Program Dukungan Manajemen. Sehingga program generik yang ada saat ini yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. Secara rinci diuraikan secara rinci sebagai berikut:

PROGRAM TEKNIS

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Tujuan Program tersebut adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama Bappenas yaitu: (1) menyusun kebijakan perencanaan pembangunan; (2) menyiapkan sistem dan regulasi perencanaan dan pengendalian pembangunan; (3) penyajian informasi hasil pelaksanaan pembangunan; dan (4) melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur perencana pusat dan daerah.

PROGRAM GENERIK

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

Tujuan Program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dengan sasaran meningkatkan kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan produk hukum dan penataan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan administrasi dan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas lainnya, pengelolaan humas dan kerjasama luar negeri.

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Tujuan program adalah memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga Kementerian PPN/Bappenas. Keluaran utama fungsi pengawasan adalah Hasil pelaksanaan *quality assurance* (pengawasan), pelayanan konsultasi dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk memfasilitasi pembinaan akuntabilitas, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
	2. Rancangan Perpres RKP 2020	1 dok
	3. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2019

2.2.1. Pemetaan IKU Kementerian ke UKE I dan II Tahun 2019

Sebagai bentuk akuntabilitas, IKU Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 telah diturunkan menjadi indikator kinerja di tingkat Unit Kerja Eselon I dan II sesuai bidangnya, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pemetaan IKU Kementerian PPN/Bappenas 2019

Sasaran Strategis	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	IKU UKE I/II	Target						
Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1.	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup...	100%						
					% keselarasan muatan RKP Provinsi dengan RKP (Khusus Dep Regional/ Dit PWK)	80%						
Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kemen. PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	2.	Rancangan Perpres RKP 2019	1 Dokumen	Rancangan Perpres RKP Tahun 2019 lingkup bidang...	1 Dok						
					3.	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%			
								4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor RB K/L	A
											Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik
Tersedianya Sarpras Aparatur Pelaks Tusi Kemen PPN/Bappenas	Terlaksananya Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemen PPN/ Bappenas	4.	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Skor evaluasi AKIP	A						
					Opini BPK	WTP						
					% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup Perencanaan pembangunan nasional	100%						
					% tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					% Penyelesaian Program kerja Pengawasan Tahunan (melalui peran Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas	100%						
					% Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100%						
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Kementerian PPN/ Bappenas	Level 3											
Tingkat Persepsi Stakeholders Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kemen PPN/Bappenas	Baik											

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 (diolah, 2019)

2.2.2. Penyempurnaan Manajemen Kinerja

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, terjadi penguatan perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan nasional, yaitu: (i) Kementerian PPN/Bappenas ke depan akan menjadi sistem integrator sehingga Kementerian PPN/Bappenas harus mampu mengintegrasikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional; (ii) Kedua, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lagi dilaksanakan dengan pendekatan *Money Follows Function*, namun dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*Money Follows Program*); serta (iii) Ketiga, perencanaan pembangunan nasional disusun menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran.

Perubahan pendekatan tersebut berimplikasi pada penyusunan perencanaan prioritas pembangunan nasional melalui koridor Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN). Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/target/indikator PN harus dilaksanakan bersama K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai PN yang dimaksud. Selain mekanisme PN-PP-KP-ProPN tersebut, juga terdapat prioritas bidang dalam RKP yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian PN.

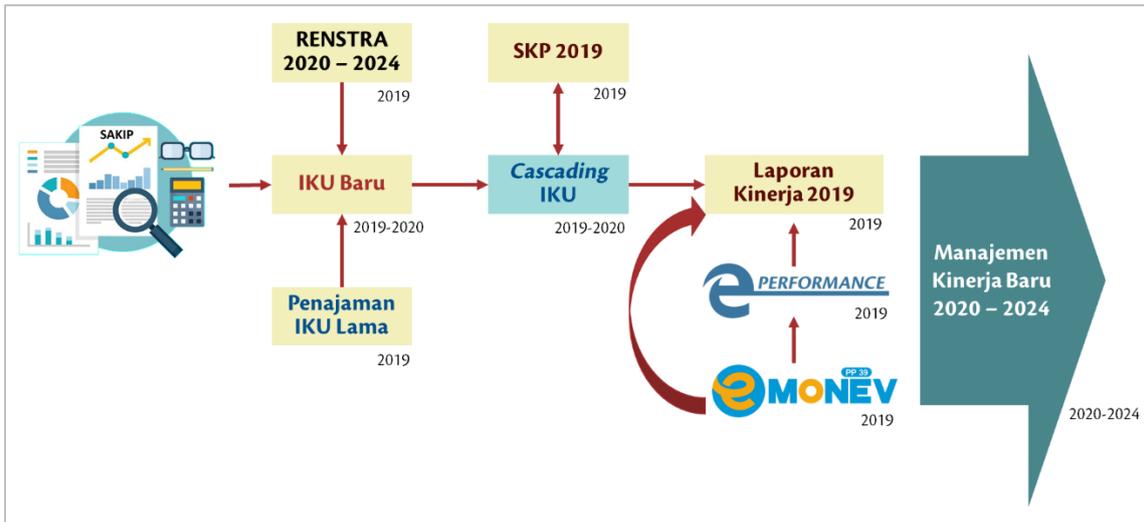
Disamping itu, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran pengendalian untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan rencana pembangunan oleh K/L/D dilakukan sesuai arah kebijakan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP dan RPJMN. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pembinaan kepada K/L/D menjadi tolok ukur utama kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam memastikan keselarasan perencanaan pembangunan nasional. Upaya pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan-pertemuan koordinasi bilateral maupun multilateral, kunjungan lapangan dan survey dalam rangka:

- Memastikan seluruh aktivitas kegiatan dan anggaran K/L, masyarakat mencapai target PN/ Pembangunan Bidang RKP;
- Memastikan hambatan pencapaian target RKP dapat diantisipasi dan diselesaikan. Contoh hambatan yang dapat terjadi seperti adanya pemotongan anggaran dan pemindahan lokus pembangunan;
- Memastikan rekomendasi / kebijakan yang tepat dan dijalankan oleh stakeholder yang diperlukan dalam pencapaian target PN.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keselarasan perencanaan dan kinerja pengendalian Kementerian PPN/Bappenas tersebut, maka diperlukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perencanaan secara optimal. Salah satu fokus penyempurnaan yang dimaksud adalah penyempurnaan IKU lembaga. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja yang lebih akuntabel dan upaya-upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran PN-PP-KP dan bidang yang dijalankan oleh K/L/D. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 telah dilakukan penguatan dan penyempurnaan IKU lembaga untuk dapat diterapkan di tahun 2020.

Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini telah dilakukan hingga saat ini dan akan terus disempurnakan untuk penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024. *Roadmap* Penguatan Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Roadmap Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas



Sumber: Biro Renortala, 2019

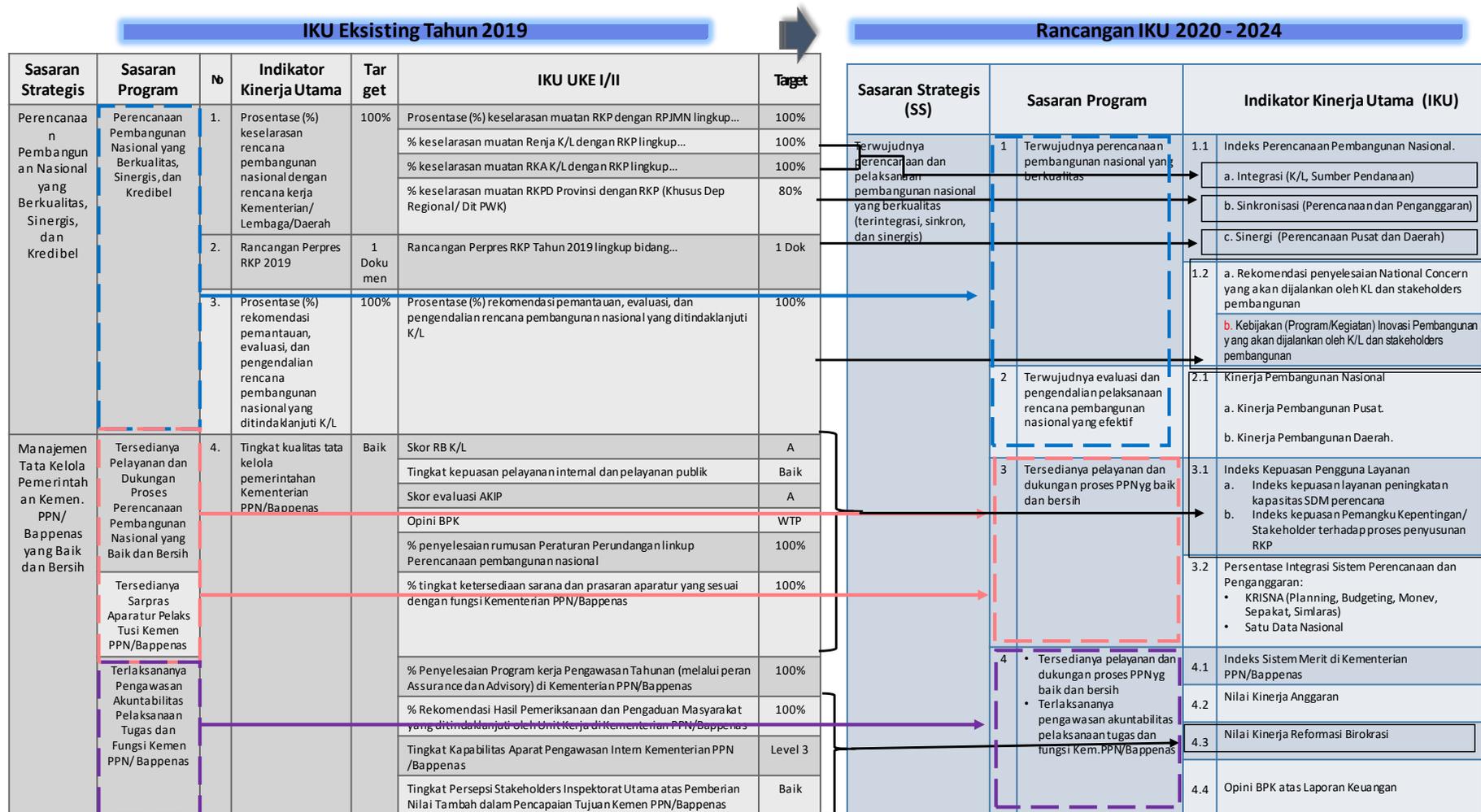
Gambar di atas menunjukkan bahwa penguatan SAKIP melalui penyempurnaan IKU di aspek pengukuran kinerja akan diintegrasikan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Diharapkan dengan penyempurnaan IKU ini akan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui cascading kinerja yang jelas dan terukur serta didukung dengan pelaporan kinerja yang akuntabel. Mengingat Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 telah memasuki tahun terakhir pelaksanaannya, sehingga pada tahun 2018 masih menggunakan IKU sesuai dalam Renstra tersebut. Namun demikian, substansi pengukuran kinerja telah diarahkan sesuai dengan penajaman rancangan IKU periode selanjutnya.

2.2.3. Pemetaan *Bridging* IKU Existing dengan Rancangan IKU 2020-2024

Sejak tahun 2018 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyempurnaan IKU, yang didasari atas kondisi: a) IKU belum mencerminkan kinerja konkrit Kementerian PPN/Bappenas, sehingga tugas atau output yang dihasilkan belum dapat dijelaskan kinerja capaiannya; b) kinerja sulit untuk diukur karena belum adanya *cascading* indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Diharapkan penyempurnaan IKU ini akan dapat menjawab IKU baru untuk periode 2020-2024 dengan lebih menekankan pada *core business* Kementerian PPN/Bappenas. Untuk itu, Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 dapat dipetakan agar dapat menjawab rancangan IKU 2020-2024, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Pemetaan IKU 2019 menuju IKU 2020-2024



Sumber: Hasil rapat perumusan rancangan IKU 2020-2024

Keterangan: - IKU lain pada PK 2019 tetap digunakan menyesuaikan Unit Kerja masing-masing
- Target dalam rancangan IKU 2020-2024 masih berada dalam tahap pembahasan dan simulasi

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa *bridging* dari IKU 2019 ke rancangan IKU 2020-2024, sebagai berikut:

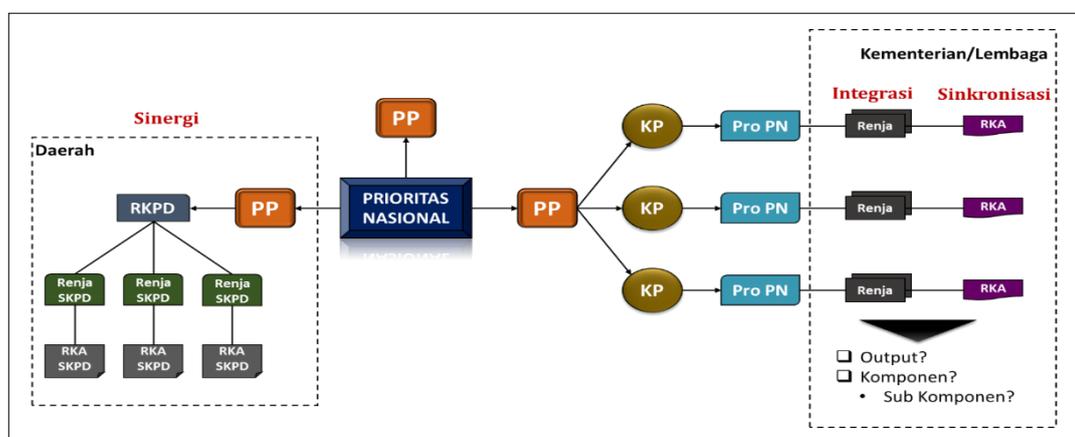
1. Indikator kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas yang pertama, yaitu Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah yang diterjemahkan dalam 4 indikator kinerja di level UKE I diubah menjadi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan diukur melalui 3 penilaian, yaitu integrasi, sinkronisasi dan sinergi. Indeks perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian sasaran/target PN dan Bidang Pembangunan Nasional. Manfaat dari indeks perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengetahui capaian kualitas perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pelaksanaannya.

Indeks ini akan berimplikasi pada menguatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu untuk:

- a. Mengukur kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional (setiap PN).
- b. Mengukur kualitas perencanaan K/L dan Daerah dengan kategori: sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
- c. Menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
- d. Menjadi alat ukur kinerja individu melalui *Cascading IKU*.

Untuk mengukur integrasi, sinkronisasi, dilakukan pemetaan dari PN ke PP, kemudian ke KP, Pro-PN dan Renja dan RKA K/L. Sedangkan sinergitas dapat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

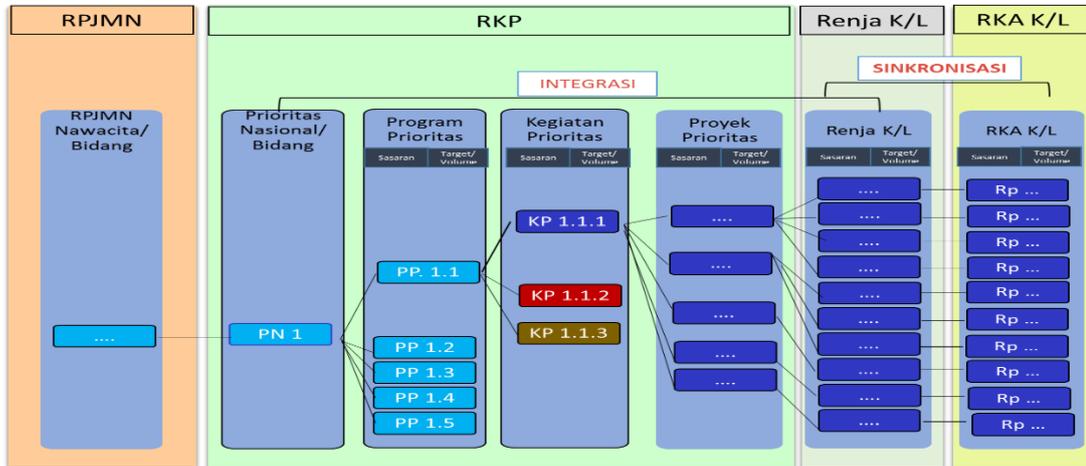
Gambar 2.6. Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas



Sumber: Hasil Rapat Perumusan RKP, 2019

Untuk lebih detail pemetaan proses integrasi, sinkronisasi dan mekanisme penghitungan keselarasannya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 2.7. Mekanisme Penghitungan Keselarasan Integrasi dan Sinkronisasi



Sumber: Hasil Rapat Perumusan RKP, 2019

Sampai saat ini, penajaman terhadap sinergi pembangunan nasional belum dapat dilakukan dikarenakan masih dalam pembahasan terkait substansi dan kriteria pengukurannya. Selain itu, keselarasan terhadap pembangunan bidang akan dilakukan secara naratif.

2. Indikator kinerja ke-2, rancangan Perpres RKP tidak akan digunakan lagi sebab akan menjadi output di tingkat unit kerja.
3. Selanjutnya indikator ke-3, Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diubah menjadi kinerja pembangunan nasional yang dihitung dari kinerja pembangunan pusat dan daerah. Indikator ini akan memberikan hasil evaluasi atas pencapaian Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal pelaksanaan kinerja RKP 2019 dengan proses pemantauan, evaluasi, rekomendasi melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, kunjungan lapangan, bilateral meeting, dan pengisian aplikasi e-Monev sebagai amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2006. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengendalian K/L pelaksana dalam pencapaian sasaran/indikator/target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun berjalan. Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya melakukan pengendalian tersebut kepada K/L mitranya saja, namun menyeluruh kepada K/L pelaksana lain menggunakan koridor PN.
4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas akan diubah ke dalam 2 kelompok sasaran program dan diterjemahkan menjadi 6 IKU (3.1-3.2; 4.1-4.4) dan dimaksudkan dalam pencapaian layanan dukungan kepada K/L/D yang berkualitas, serta layanan dukungan internal dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berkualitas. Sebagian besar rancangan IKU ini berfokus pada indeks dan nilai kinerja yang akan dievaluasi oleh

Kementerian keuangan (Nilai Kinerja Anggaran), KemenPAN dan RB (Nilai Kinerja RB) dan BPK (Opini BPK).

Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja dan memudahkan dalam penyusunan *cascading* indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Dalam hal ini rancangan IKU selanjutnya akan mengukur aspek: (i) perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, serta (ii) kinerja pembangunan nasional. Ukuran yang akan digunakan berupa indeks sehingga lebih terukur secara kuantitatif. Rancangan IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

2. Kinerja Pembangunan Nasional

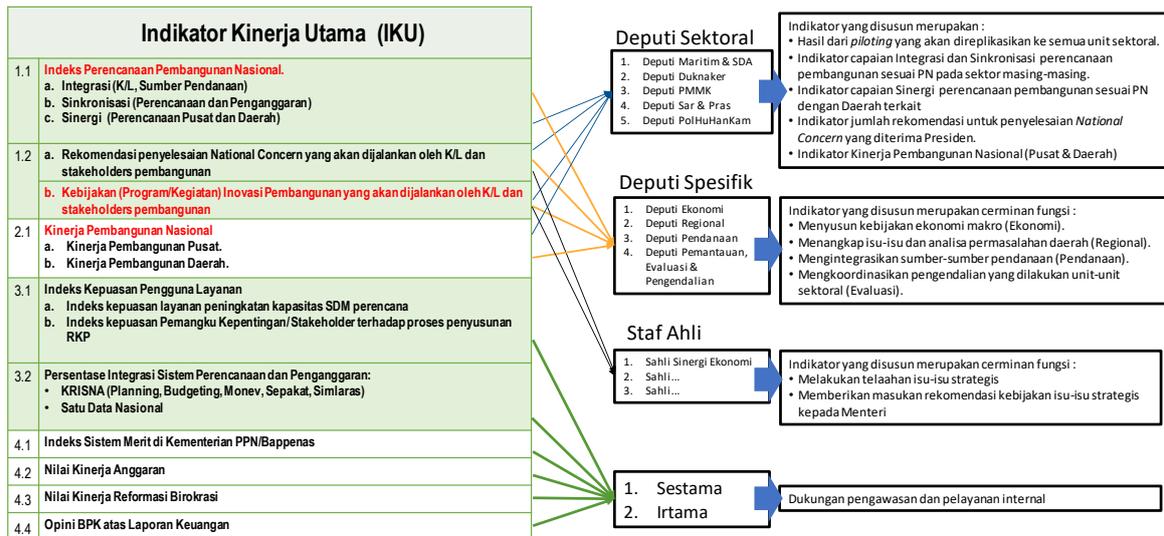
Kinerja Pembangunan Nasional akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan melalui pengukuran realisasi capaian sasaran pokok pembangunan.

3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal dan Eksternal dan pengawasan akuntabilitas kinerja yang mengukur tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan tingkat akuntabilitas kerjanya.

2.3. CASCADING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas, setiap unit kerja Eselon I mempunyai peran masing-masing dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8. Cascading IKU Kementerian PNN/Bappenas Tahun 2019 kedalam UKE I



Selanjutnya indikator kinerja Eselon I dijabarkan ke dalam indikator kinerja Eselon II dibawahnya. Penjabaran indikator kinerja ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya *bridging* IKU 2019 ke rancangan IKU 2020-2024, proses *cascading* dan mekanisme kerja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas pun berubah menggunakan koridor PN/PP/KP.

Cascading dan mekanisme meliputi perencanaan dan pengendalian yang melibatkan koordinasi dan peranan tiap Penanggung Jawab (PJ) PN, PP, KP, dan Pembangunan Bidang. Melalui mekanisme tersebut, maka PJ PN/PP/KP/Bidang saling berkoordinasi dalam pengukuran dan perhitungan capaian kinerja perencanaan RKP 2020 dan capaian kinerja pengendalian pelaksanaan RKP 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Mekanisme Kerja dan Peranan PJ PN/PP/KP/Bidang dalam Perencanaan dan Pengendalian

PENANGGUNG JAWAB	PERENCANAAN RKP 2020	PENGENDALIAN RKP 2019
PJ PN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PN 2. Menentukan program prioritas 3. Menentukan kegiatan prioritas bersama dengan penanggung jawab PP 4. Mengendalikan penanggung jawab PP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level PP 5. Menghitung indeks perencanaan PN masing-masing yang berasal dari penanggung jawab PP (integrasi, sinkronisasi, sinergi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur realisasi sasaran/target PN masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja PN dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi PN berdasarkan laporan realisasi PP (penjelasan tentang realisasi PN) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024
PJ PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan sasaran, indikator dan target PP bersama penanggung jawab PN 2. Menentukan kegiatan prioritas bersama penanggung jawab PN 3. Mengendalikan penanggung jawab KP di dalam melaksanakan proses integrasi dan sinkronisasi di level KP 4. Menghitung indeks perencanaan PP masing-masing yang berasal dari penanggung jawab KP (integrasi, sinkronisasi, sinergi) 5. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan PP kepada penanggung jawab PN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur realisasi sasaran/target PP masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja PP dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi PP berdasarkan laporan realisasi KP (penjelasan tentang realisasi PP) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 3. Menyampaikan laporan kinerja PP kepada penanggung jawab PN
PJ KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan sasaran, indikator dan target KP 2. Mengendalikan pelaksanaan KP di dalam proses integrasi dan sinkronisasi 3. Menghitung indeks perencanaan KP masing-masing (integrasi, sinkronisasi, sinergi) 4. Melaporkan hasil perhitungan indeks perencanaan KP kepada penanggung jawab PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan kinerja KP dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi KP (penjelasan tentang realisasi KP) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024 2. Menyampaikan laporan kinerja KP kepada PJ PP
PJ Bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan sasaran, indikator dan target pembangunan bidang 2. Mengendalikan pelaksanaan bidang di dalam proses integrasi dan sinkronisasi 3. Menghitung indeks perencanaan bidang masing-masing (integrasi, sinkronisasi, sinergi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur realisasi sasaran/target bidang masing-masing 2. Menyusun laporan kinerja pembangunan bidang dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisa realisasi bidang (penjelasan tentang realisasi) b. Membandingkan capaian realisasi dengan capaian tahun sebelumnya c. Membandingkan capaian realisasi dengan sasaran target RPJMN 2020 – 2024

2.4. KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pemetaan *bridging* IKU 2019 ke dalam rancangan IKU 2020-2024, terdapat perbedaan dan penajaman dalam mekanisme perhitungan, pengukuran serta pendekatan dengan menggunakan koridor PN/PP/KP. Kamus indikator meliputi formula dan definisi operasional dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2019 yang secara substantif telah disesuaikan menggunakan koridor PN/PP/KP tersebut.

1. Capaian Kinerja Perencanaan RKP 2020

Capaian ini akan dihitung menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkualitas”. Sehingga dalam perhitungan capaian ini pun juga menggunakan pengukuran dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur meliputi.

(i) Integrasi

Dalam pengukuran integrasi perencanaan pembangunan ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penajaman perhitungan dalam koridor PN/PP/KP melalui indikator: “Persentase (%) keselarasan muatan RKP 2020 dengan rancangan RPJMN 2020-2024”, dan “Persentase (%) keselarasan muatan Renja K/L 2020 dengan RKP 2020”. Pengukuran indikator tersebut selengkapnya dapat dilihat pada rumus IKU sebagai berikut:

$$\text{\% keselarasan muatan RKP dengan RPJMN lingkup bidangnya (PN)} = \frac{\text{Rata-rata keselarasan muatan RKP [PP] yang sesuai dengan RPJMN lingkup bidangnya}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Keselarasan muatan RKP adalah agregat keselarasan KP di bawah PP dalam PN yang diampu.
2. Rata-rata % keselarasan muatan RKP yang sesuai dengan RPJMN lingkup bidangnya adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP di bawah PN.
3. Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran PP yang diampu dalam RKP 2020 telah sesuai/relevan dengan sasaran prioritas dalam rancangan RPJMN 2020-2024.
 - b. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (di bawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP.

(ii) Sinkronisasi

Dalam pengukuran sinkronisasi perencanaan pembangunan ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan dalam koridor PN/PP/KP melalui indikator “Persentase (%) keselarasan muatan RKA K/L 2020 dengan RKP 2020”. Pengukuran indikator tersebut selengkapnya dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\% \text{ keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP lingkup bidangnya (PN)} = \frac{\text{Rata-rata keselarasan muatan Renja K/L [PP] yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Muatan adalah agregat keselarasan muatan Renja K/L dengan KP dibawah PP dalam PN yang diampu.
2. Rata-rata % keselarasan muatan Renja K/L yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP di bawah PN.
3. Muatan RKP dan Renja dikatakan selaras dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP di bawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020.
 - b. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (di bawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diintegrasikan hingga PN yang diampu.

(iii) Sinergi

Dalam pengukuran sinergi perencanaan pembangunan ini, Kementerian PPN/Bappenas melakukan perhitungan dalam koridor PN/PP/KP melalui indikator “Persentase % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya (PN)”. Pengukuran indikator tersebut selengkapnya dapat dilihat pada rumus berikut.

$$\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya (PN)} = \frac{\text{Rata-rata keselarasan muatan RKA K/L [PP] yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Muatan adalah output kegiatan K/L yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L dalam rangka mendukung pencapaian sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu.
2. Rata-rata % keselarasan muatan RKA K/L yang sesuai dengan RKP lingkup bidangnya adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua KP dibawah PP dalam PN yang diampu.

3. Muatan RKA dan RKP dikatakan selaras dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020
 - b. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP dibawah PP dalam PN yang diampu telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diagregatkan hingga PN yang diampu.

2. Capaian Kinerja Pengendalian Pelaksanaan RKP 2019

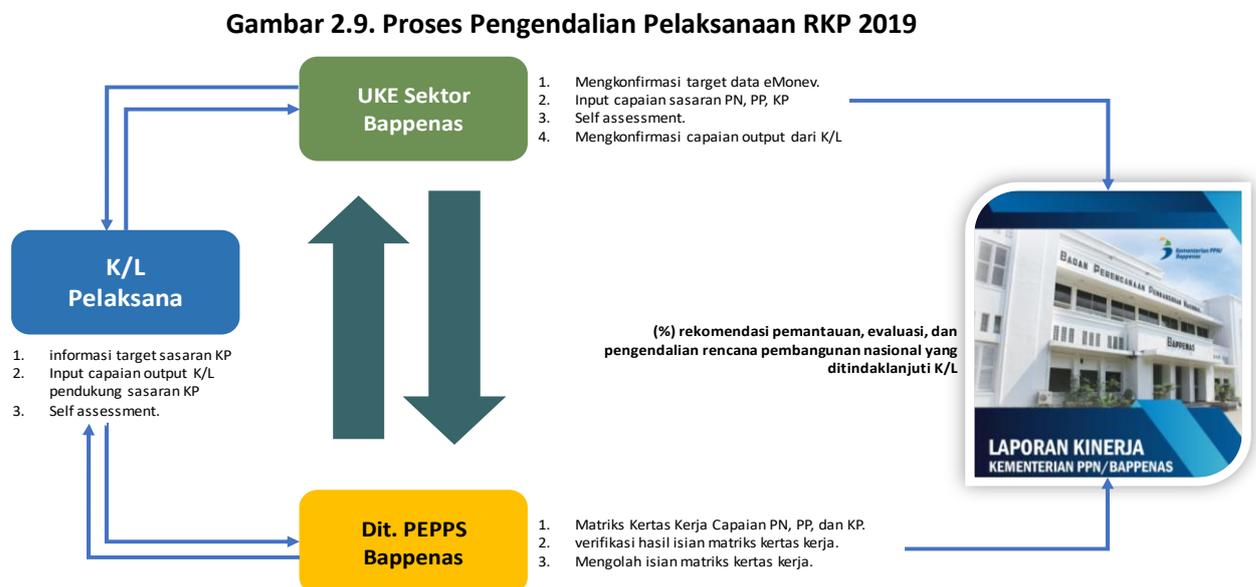
Metode penilaian capaian kinerja pengendalian RKP 2019 ini ditentukan berdasarkan:

- a. Hasil pencapaian sasaran (menggunakan metode Analisis *Gap*); dan
- b. Hasil dukungan output K/L (menggunakan metode rata-rata tertimbang)

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah:

- a. Telaah capaian sasaran PN-PP-KP (keselarasan *outcome* dan dukungan *output*).
- b. Telaah capaian dukungan *output* K/L (keselarasan *output* kegiatan K/L terhadap pagu anggaran PN-PP-KP).
- c. Kesimpulan kinerja dengan kategori Baik-Cukup Baik-Kurang Baik berdasarkan Indeks Kinerja PN.

Secara rinci proses Pengendalian Pelaksanaan RKP 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Sumber: Direktorat PEPPS Bappenas 2019

Perhitungan capaian kinerja pelaksanaan RKP 2019 dilakukan melalui pendekatan analisa indikator “Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L”.

Secara umum, Kinerja Pembangunan Nasional dapat diidentifikasi dengan menghitung nilai rata-rata hasil evaluasi pencapaian sasaran dan hasil evaluasi dukungan output K/L. Kesimpulan kinerja pembangunan nasional tersebut dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$KPNi = (0,5 \times KSPNi) + (0,5 \times KOPNi)$$

dimana: KPNi adalah rata-rata kinerja PN ke-i;
KSPNi adalah kinerja berdasarkan capaian sasaran PN ke-i;
KOPNi adalah kinerja berdasarkan dukungan output K/L PN ke-i.

Evaluasi RKP 2019 dilaksanakan dalam rangka memenuhi mandat PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, sebagai bahan penyiapan penyusunan rancangan RKP 2021 dengan fokus pada evaluasi kinerja pembangunan. Sesuai dengan cakupan substansi evaluasi yang dilakukan, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

Pertama, Evaluasi Pencapaian Sasaran dititikberatkan pada telaah atas kinerja pelaksanaan PN-PP-KP dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dokumen RKP 2019 secara garis besar, strukturnya memuat Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang. Adapun, evaluasi RKP 2019 hanya difokuskan pada evaluasi pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Secara hierarki pelaksanaan, sasaran dan indikator pada Prioritas Pembangunan Nasional ditetapkan mulai dari PN-PP-KP.

Kedua, Evaluasi Dukungan Output K/L disusun berdasarkan rincian output K/L yang berperan dalam mendukung pencapaian sasaran KP hingga ke PP dan PN RKP 2019. Informasi mengenai output K/L diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan Renja-KL sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

Berkaitan dengan ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana mengkonstruksikan metode evaluasi RKP berdasar data hasil pelaksanaan Renja-KL yang dilaporkan melalui eMonev Bappenas. Hal ini erat kaitannya dengan struktur dokumen RKP serta ketersediaan dan kualitas data hasil pelaksanaan Renja-KL (e-Monev) itu sendiri.

Data hasil pelaksanaan Renja-KL (eMonev) adalah data capaian pembangunan yang dilakukan oleh K/L yang secara hierarki pelaksanaan, sasaran dan indikatornya ditetapkan pada kegiatan dan komponen kegiatan K/L. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional pada dokumen RKP, pencapaian PN-PP-KP, sebagai hasil pelaksanaan Renja-KL, masih belum secara utuh terlihat hubungan antara keduanya. Proses yang telah berlangsung selama ini pada saat penyusunan dokumen RKP dan RenjaKL 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, telah dilakukan penandaan (tagging) pada keluaran (output) Kegiatan yang mendukung pencapaian PN-PP-KP RKP 2019.

Dalam penyusunan evaluasi RKP 2019, upaya untuk menggunakan data hasil pelaksanaan Renja-KL (e-Monev) telah diinisiasi dengan mempertimbangkan proses penandaan (tagging) keluaran (output) Kegiatan yang mendukung pencapaian PN-PP-KP. Data hasil pelaksanaan Renja-KL (e-Monev) pada hierarki keluaran (output) K/L hingga triwulan IV menjadi salah satu dasar pengukuran kinerja pembangunan nasional.

Dengan demikian, beberapa hal yang menjadi keterbatasan, baik yang terkait dengan struktur dokumen RKP maupun pemanfaatan data hasil pelaksanaan Renja-KL, di antaranya (1) evaluasi tidak mencakup pencapaian Pembangunan Bidang; (2) pemanfaatan data hasil pelaksanaan Renja-KL (e-Monev) terbatas pada capaian hierarki keluaran (output) Kegiatan K/L; dan (3) kelengkapan dan akurasi penandaan (tagging) data hasil pelaksanaan Renja KL (e-Monev) terhadap hierarki PN-PPKP belum dilakukan terhadap seluruh keluaran (output) Kegiatan K/L.

3. Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020

Capaian indikator ini diukur dari tersusunnya dokumen RKP Tahun 2020 yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif dan dijadikan acuan/pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Capaian indikator ini berasal dari Capaian indikator ini berasal dari 3 indikator yang dilaksanakan, yaitu:

- (1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi,
- (2) Opini atas Laporan Keuangan; dan
- (3) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Ketiga ukuran tersebut merupakan ukuran yang dinilai oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, ukuran (1) dan (3) dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) dan ukuran (2) dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Masing-masing dari penilaian ini dibobot secara merata sehingga didapat nilai dan dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. (Baik Sekali = 91 - 100%; Baik = 81 - 90%; Cukup baik = 71 - 80%; Kurang baik = < 70%).

Secara rinci formulasi kamus indikator tersebut di atas dapat dilihat dalam lampiran

2.5. ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019.

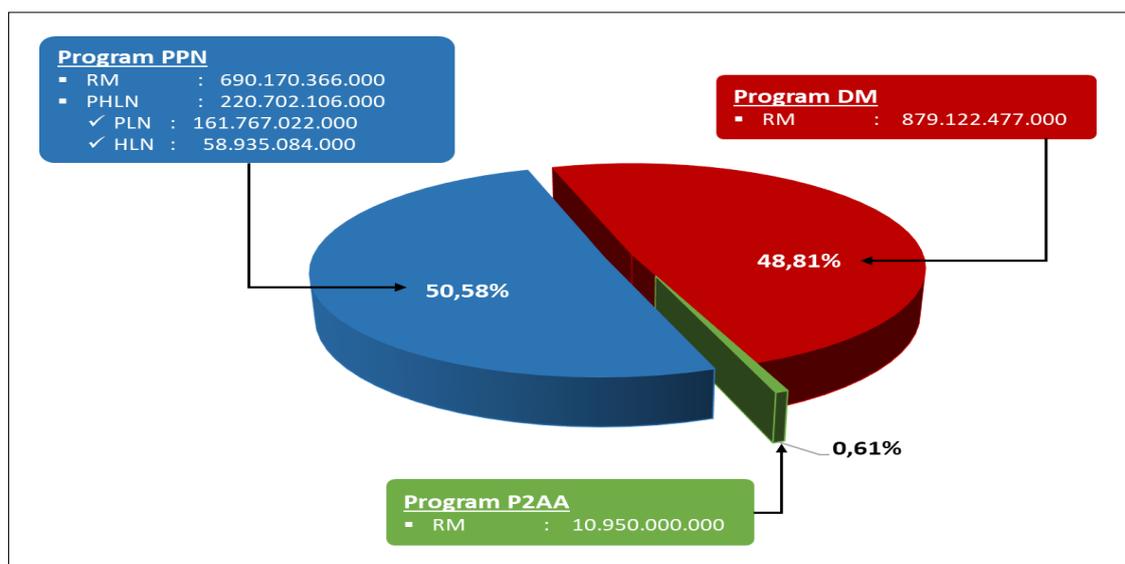
Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.833.959.634.000,00 yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM), Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN), dan Hibah Luar Negeri (HLN). Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 3 (tiga) Program, seperti yang terlihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.4. Program dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2019 (dalam Milyar Rupiah)				TOTAL
		RM	PHLN		Jumlah	
			PLN	HLN		
1	Perencanaan Pembangunan Nasional	723,17	161,77	58,94	220,70	943,88
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	879,12	0	0	0	879,12
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	10,95	0	0	0	10,95
TOTAL		1.579,93	161,77	58,94	220,70	1.833,95

Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas

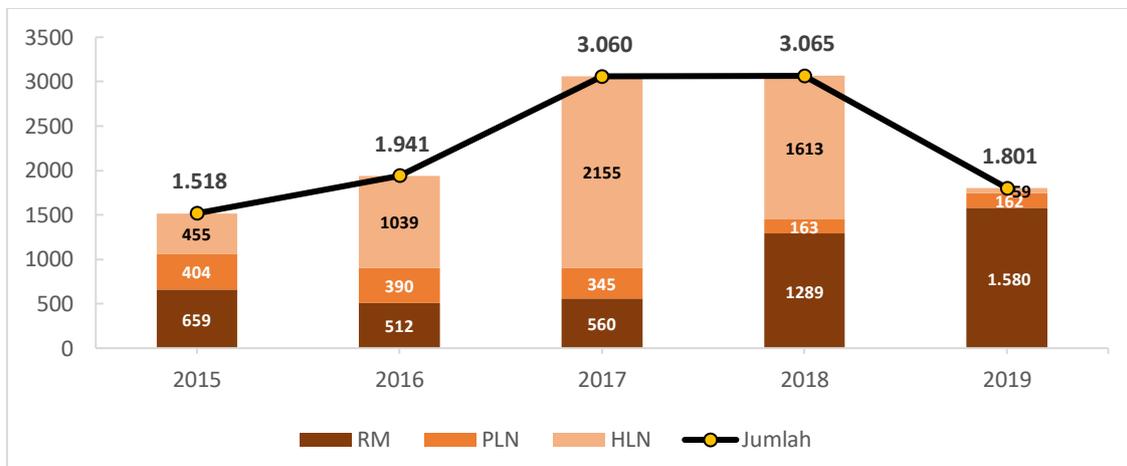
Gambar 2.10. Porsi Alokasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2019



Sumber : Pagu DIPA Revisi IV Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

Anggaran pada tahun 2019 tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis, *money follows program* dan lintas bidang/sector serta difokuskan pada penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, antara lain melalui kegiatan kajian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Secara keseluruhan, alokasi anggaran tahun 2019 meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini sejalan dengan meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan pertambahan lingkup tugas baru, diantaranya seperti: Kajian Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pembangunan Rendah Karbon, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Komite Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), dan *Indonesia Development Forum* (IDF).

Gambar 2.11. Perkembangan Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019



Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2019)

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2019

Pengukuran capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan realisasinya. Pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 dan dalam waktu bersamaan dilakukan penyusunan RPJMN dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.

Untuk mengetahui peningkatan capaian kinerja tahun 2019 perlu disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut persandingan capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2018 dan 2019

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga/Daerah	100%	99,91%	100%	100%
		Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	92,38%	100%	90,35%
2	Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas dan Laporan Kinerja UKE I

Berdasarkan Tabel 3.1. menunjukkan bahwa secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2019. Namun, hanya IKU “Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” belum optimal dalam pencapaian target. IKU tersebut pencapaiannya sebesar 90,35%.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi diantaranya seperti:

1. Adanya perubahan anggaran Kementerian K/L, khususnya pengurangan anggaran *Output* Kegiatan K/L yang mendukung tercapainya sasaran/target Prioritas Nasional RKP 2019.
2. Terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/subkomponen kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam Prioritas Nasional RKP 2019.
3. Belum optimalnya peran dan fungsi pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terhadap pelaksanaan *Output* Kegiatan K/L yang mendukung tercapainya sasaran/target Prioritas Nasional RKP 2019.

Secara umum, hubungan sebagian besar pencapaian sasaran PN-PP-KP telah selaras dengan dukungan output K/L yang diberikan. Artinya program dan kegiatan K/L (1) telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP RKP 2019 dan (2) telah optimal berperan dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP RKP 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, keselarasan tersebut masih perlu ditingkatkan pada PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dan PN 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2019

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 telah dihasilkan dokumen perencanaan RKP Tahun 2020 yang dituangkan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran RKP 2020. Selain itu menghasilkan Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, serta koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam urusan perencanaan pembangunan nasional.

Sementara itu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah dihasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia bagi aparatur perencana baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Rekapitulasi capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2019**

No.	IKU Menteri	<i>Bridging</i> Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II	Target IKU	Capaian IKU
1	Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	Capaian Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2020	Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024	100%	100%
			Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2020 dengan RKP 2020	100%	
		Capaian Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2020	Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2020 dengan RKP 2020	100%	100%
2	Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020		Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020	1 dokumen	1 dokumen
3	Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Nasional RKP 2019	Persentase (%) Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	90,35%
4	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	BAIK
		Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Skor RB K/L	A	
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor Evaluasi AKIP	A	

Sumber: Perjanjian Kinerja Menteri/Kepala Bappenas dan Laporan Kinerja UKE I

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya sesuai target. Keberhasilan capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, akan diuraikan pembahasan capaian kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2019 melalui pengukuran menggunakan *bridging* pengukuran rancangan IKU 2020-2024 dalam koridor Prioritas Nasional (PN):

Sasaran Strategis (SS) 1

Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

Sasaran strategis perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah sesuai dengan Visi-Misi dan tujuan dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas. Strategi tersebut dapat terwujud melalui keselarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan nasional antara Kementerian/Lembaga/Daerah. Berikut merupakan uraian capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

3.1.2.1. Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah

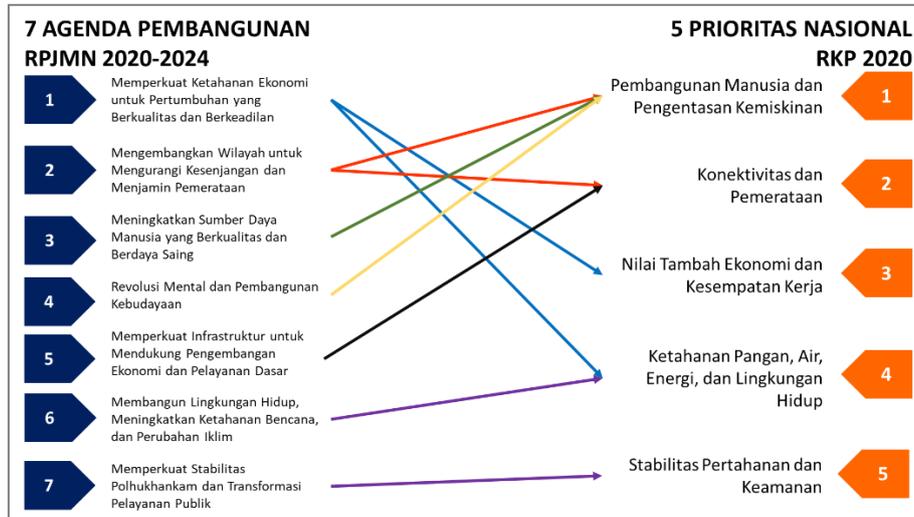
Secara keseluruhan, kinerja IKU “Persentase (%) Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah” telah dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan tercapai 100%. Berikut uraian dari pelaksanaan IKU tersebut.

A. Capaian Keselarasan Perencanaan RKP 2020

RKP 2020 merupakan tahun terakhir titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan nasional, dikarenakan pada saat bersamaan dilakukan penyusunan Rancangan RPJMN 2020-2024. Penyelarasan antara RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 menjadi penting karena RKP 2020 merupakan menjadi tahun pertama pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.

Adapun tema pembangunan dalam RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2019, telah dilakukan penyesuaian antara 5 (lima) PN RKP 2020 dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan 2020-2024.

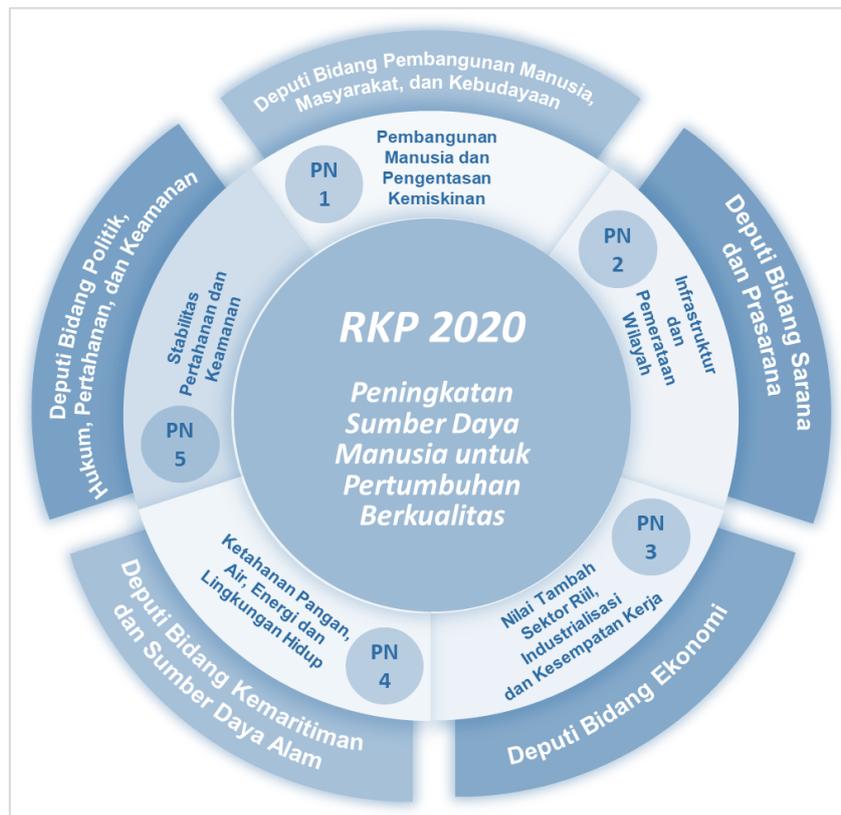
Gambar 3.1. Pemetaan 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan 5 PN RKP 2020



Sumber: Tim Penyusun RPJMN 2020-2024

Seperti pada penyusunan RKP tahun-tahun sebelumnya, PN dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon I pengampu bidang tersebut. Pada RKP 2020, terdapat 5 Unit Kerja Eselon I yang menjadi penanggung jawab, yaitu:

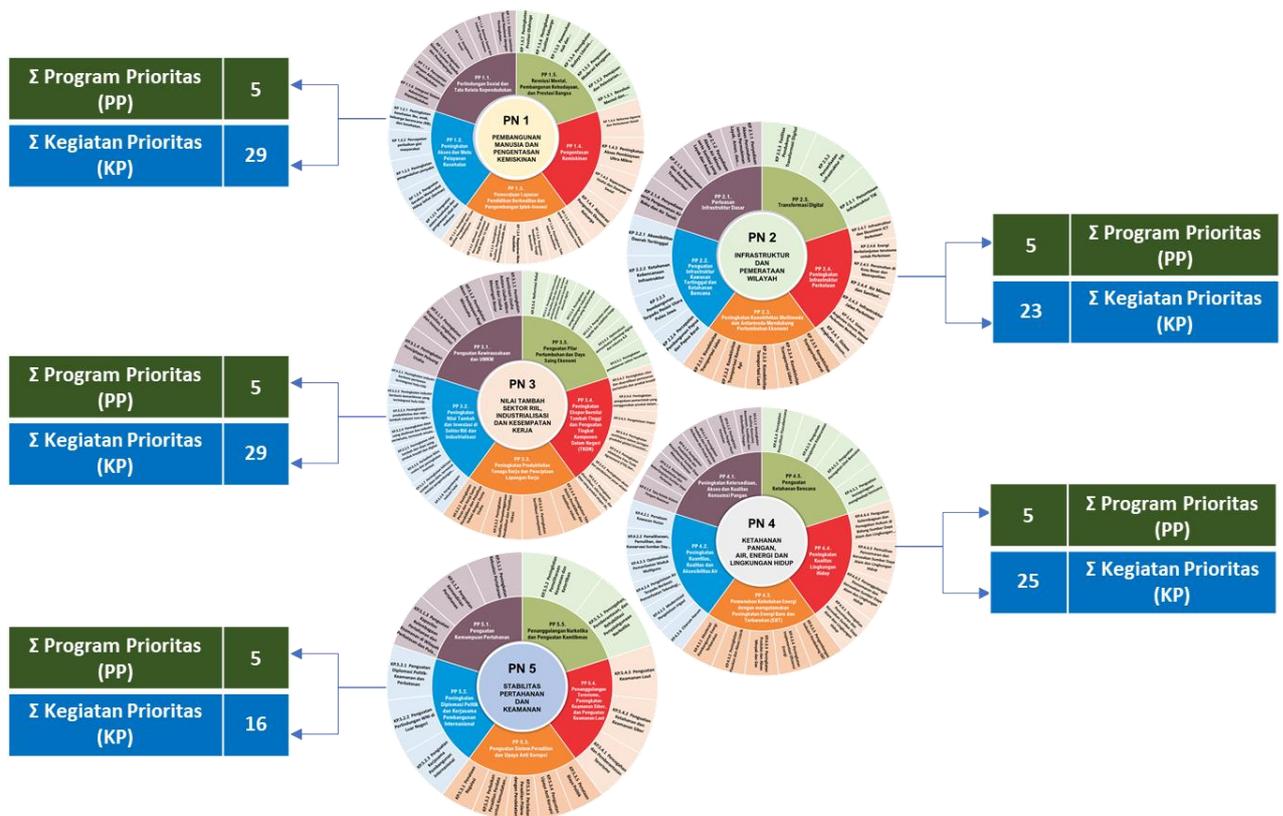
Gambar 3.2. Penanggung Jawab Prioritas Nasional (PN) RKP 2020



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2020

Secara keseluruhan penilaian capaian kinerja keselarasan berdasarkan hasil pemetaan Jumlah K/L, Jumlah Sasaran, Jumlah Indikator Kegiatan Prioritas, serta Jumlah *Output* Kegiatan K/L yang mendukung PN dalam RKP 2020 sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Gambar 3.3. Pemetaan Jumlah Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang mendukung PN dalam RKP 2020



Sumber: RKP 2019 (diolah)

Dari Gambar 3.3, diketahui bahwa dari semua indikator dalam PN, PP dan indikator KP telah terpetakan berdasarkan RKP 2020. Sedangkan untuk *output* kegiatan K/L dalam Renja K/L dipetakan berdasarkan data pada aplikasi KRISNA RKP 2020. Semua *output* K/L yang telah tercatat pada aplikasi KRISNA tersebut akan dianggarkan pelaksanaannya pada tahun 2020.

Tabel 3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja IKU “% Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah” Tahun 2019

NO	IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II	Capaian Tahun 2019					Total Capaian IKU UKE I	Capaian IKU Menteri
				Capaian Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2020						
				PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5		
1	Persentase % Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	Capaian Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2020	Persentase (%) Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase (%) Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L 2020 dengan RKP 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Capaian Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional RKP 2020	Persentase (%) Keselarasan Muatan RKA K/L 2020 dengan RKP 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I, 2019

Tabel di atas merupakan rekapitulasi untuk mengukur tingkat kesesuaian antara RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 pada masing-masing penanggungjawab PN. Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras apabila sasaran Kegiatan Prioritas yang diampu dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 secara substansi sudah sesuai/relevan dengan sasaran prioritas RPJMN 2020- 2024 yang sudah ditentukan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. RKP 2020 dalam penyusunannya telah melibatkan seluruh sektor dan seluruh tingkatan pemerintahan dalam rangka mencapai sinkronisasi dan sinergi. Sinergi tersebut dilakukan melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi termasuk juga melalui kegiatan rapat koordinasi pembangunan pusat (rakorbangpus), musyawarah perencanaan pembangunan provinsi (musrenbangprov), dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas).

Untuk memastikan keselarasan antara RKP dan RPJMN dilakukan reviu secara bersama-sama antara Bappenas dan semua mitra kerja, serta Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalam RPJMN benar-benar dioperasionalkan di kementerian dan lembaga. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen kesepakatan tiga pihak dan selanjutnya dijadikan acuan bagi masing masing pihak untuk menyesuaikan. Selanjutnya, capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas diuraikan sebagai berikut.



PN 1 DALAM RKP 2020

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan kebudayaan.

Permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan pada tahun 2020 adalah: (1) pelaksanaan perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan; (2) pemenuhan layanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan, masih belum dapat menjangkau seluruh penduduk; (3) daya tahan ekonomi kelompok miskin dan rentan masih rendah; (4) ketahanan budaya dan karakter bangsa, termasuk budaya berkompetisi, perlu diperkuat dalam kondisi pertukaran budaya global yang dinamis.

a. Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” dalam PN 1

Capaian kinerja keselarasan muatan RKP 2020 telah terpetakan langsung (100%) ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan RKP tahun 2020 telah sesuai dengan fokus prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024; (2) sasaran PP yang diampu dalam RKP 2020 telah sesuai/relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024; dan secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (di bawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Agenda Pembangunan ke-3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan sasaran pembangunan “Terpenuhinya Layanan Dasar” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 1 melalui Kegiatan Proritas “Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi”.
- Agenda Pembangunan ke-4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan sasaran pembangunan “Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 1 melalui Kegiatan Proritas “Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan” dengan Sasaran Kegiatan “Semakin Mantapnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan.

Capaian matrik hasil capaian keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran.

b. Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L 2020 dengan RKP 2020” dalam PN 1

Capaian kinerja keselarasan muatan Renja K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan *output* Renja K/L telah sesuai dan mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020; (2) sasaran *output* kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP di bawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (di bawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diagregatkan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Kementerian Kesehatan memiliki Kegiatan “Pembinaan Gizi Masyarakat”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat” yang memiliki indikator “Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus”.

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan memiliki Kegiatan “Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila” yang memiliki indikator “Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)”.

Capaian matrik hasil capaian keselarasan Renja K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Sinkronisasi Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2020 dalam PN 1

Capaian kinerja keselarasan muatan RKA K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020 telah terpetakan/dianggarkan dalam *output* kegiatan RKA K/L; (2) sasaran *output* kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (di bawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diagregratkan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan Prioritas “Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian Kesehatan “Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan” dengan *Output* Kegiatan “Pengembangan fasilitas rujukan di kawasan Indonesia Timur”.
- Sasaran Kegiatan Prioritas “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan “Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya” dengan *Output* Kegiatan “Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat”.

Capaian keselarasan antara RKA K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.



PN 2 DALAM RKP 2020

INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN WILAYAH

Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 diarahkan untuk perluasan penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan bencana, keberlanjutan, dan pemerataan antar wilayah menjadi perhatian khusus untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan transformasi digital.

Hingga saat ini, masih terdapat beberapa isu kinerja infrastruktur yang dihadapi, antara lain masih besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum dan sanitasi); belum optimalnya konektivitas transportasi pada jalur utama logistik serta dukungan pada kawasan prioritas serta belum memadainya sistem angkutan umum massal perkotaan. Disamping itu, terdapat permasalahan berupa masih belum meratanya layanan TIK yang berkualitas di seluruh wilayah negeri.

a. Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” dalam PN 2

Capaian kinerja keselarasan muatan RKP 2020 telah terpetakan langsung (100%) ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan RKP tahun 2020 telah sesuai dengan fokus prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024; (2) sasaran PP yang diampu dalam RKP 2020 telah sesuai/relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024; dan secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Agenda Pembangunan ke-5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan sasaran pembangunan “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 2 melalui Kegiatan Proritas “Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman yang layak, aman, dan terjangkau”.
- Agenda Pembangunan ke-2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” dengan sasaran pembangunan “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 2 melalui Kegiatan Proritas “Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat” dengan Sasaran Kegiatan “Terselenggarakan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”.

Capaian keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran.

b. Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L 2020 dengan RKP 2020” dalam PN 2

Capaian kinerja keselarasan muatan Renja K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan output Renja K/L telah sesuai dan mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP di bawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan

kecerapaian PP dan diintegrasikan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau” yang memiliki indikator “Jumlah Hunian Baru Layak yang Terbangun melalui Peran Pemerintah Kementerian PUPR memiliki Kegiatan “Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Penyediaan”.
- Kementerian PUPR memiliki Kegiatan “Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat” yang memiliki indikator “Panjang Jalan Nasional, Trans Papua dan Perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya”.

Capaian keselarasan antara Renja K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Sinkronisasi Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2020 dalam PN 2

Capaian kinerja keselarasan muatan RKA K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020 telah terpetakan/dianggarkan dalam output kegiatan RKA K/L; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diintegrasikan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan Prioritas “Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian PUPR “Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman” dengan output “Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan”
- Sasaran Kegiatan Prioritas “Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi “Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal” dengan output kegiatan “Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal”.

Capaian keselarasan antara RKA K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.



PN 3 DALAM RKP 2020

NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI DAN KESEMPATAN KERJA

Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital.

PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun 2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi struktural, rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” dalam PN 3

Capaian kinerja keselarasan muatan RKP 2020 telah terpetakan langsung (100%) ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan RKP tahun 2020 telah sesuai dengan fokus prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024; (2) sasaran PP yang diampu dalam RKP 2020 telah sesuai/relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Agenda Pembangunan ke-1 “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dengan Sasaran Pembangunan “Meningkatkan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di 65 sektor riil dan industrialisasi” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 melalui Kegiatan Prioritas “Peningkatan hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatkan jumlah kawasan industri yang berpotensi”.

- Agenda Pembangunan ke-1 “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dengan Sasaran Pembangunan “Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 melalui Kegiatan Prioritas “Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMKM yang mengakses kredit di lembaga keuangan formal”.

Capaian keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Laporan Kinerja Kedeputian Penanggungjawab PN 3.

b. Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L 2020 dengan RKP 2020” dalam PN 3

Capaian kinerja keselarasan muatan Renja K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan output Renja K/L telah sesuai dan mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP di bawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan kecercapaian PP dan diagregatkan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah memiliki Kegiatan “Penumbuhan dan pengembangan Industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar” dan memiliki indikator “Jumlah UMK/kelompok yang ditingkatkan kapasitas usahanya”.
- Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kegiatan “Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha” dan memiliki indikator “Jumlah wirausaha dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan”.

Capaian keselarasan antara Renja K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Sinkronisasi “Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2020” dalam PN 3

Capaian kinerja keselarasan muatan RKA K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020 telah terpetakan/dianggarkan dalam output kegiatan RKA K/L; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan

ketercapaian PP dan diintegrasikan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan “Meningkatnya nilai tambah dan investasi di subsector industry, kimia, logam, dan otomotif” sudah teranggarkan dalam Output Kegiatan Kementerian Perindustrian “Peningkatan kapasitas produksi 17 juta ton baja nasional (2020-2024)”.
- Sasaran Kegiatan “Meningkatnya produk ekspor dan jasa” sudah teranggarkan dalam Output Kegiatan Kementerian Perdagangan “Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center”.

Capaian keselarasan antara RKA K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.



PN 4 DALAM RKP 2020

KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 terkait PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah: (1) stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang aman, berkualitas dan bernutrisi; (2) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) rendahnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) penurunan daya dukung, daya tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5) meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi serta upaya pembangunan berketahanan bencana masih belum optimal.

a. Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” dalam PN 4

Capaian kinerja keselarasan muatan RKP 2020 telah terpetakan langsung (100%) ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan RKP tahun 2020 telah sesuai dengan fokus prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024; (2) sasaran PP yang diampu dalam RKP 2020 telah sesuai/relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024; dan (3) secara garis besar dan substansi,

seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Agenda Pembangunan ke-6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” dengan sasaran pembangunan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 4 melalui Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup”.
- Agenda Pembangunan ke-1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” dengan sasaran pembangunan “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 4 melalui Kegiatan Prioritas “Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pembangunan pembangkit Energi Terbarukan.

Capaian keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran.

b. Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L 2020 dengan RKP 2020” dalam PN 4

Capaian kinerja keselarasan muatan Renja K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan output Renja K/L telah sesuai dan mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP di bawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diintegrasikan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Kegiatan “Pembinaan Rehabilitasi dan reklamasi Hutan, Rehabilitasi lahan serta Konservasi tanah dan Air”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber daya air dan Ekosistemnya” yang memiliki indikator “Luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif yang meningkat”.
- Kementerian ESDM memiliki Kegiatan “Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan”

yang memiliki indikator “Pembangunan PLT Panas Bumi 2.273 MW; PLT Bioenergi 1.922,5 MW; PLT ET lainnya 6.949,7 MW”.

Capaian keselarasan antara Renja K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Sinkronisasi Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2020 dalam PN 4

Capaian kinerja keselarasan muatan RKA K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020 telah terpetakan/dianggarkan dalam output kegiatan RKA K/L; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diintegrasikan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan Prioritas “Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber daya air dan Ekosistemnya” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Pembinaan Rehabilitasi dan reklamasi Hutan, Rehabilitasi lahan serta Konservasi tanah dan Air” dengan output “Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis secara Vegetatif”
- Sasaran Kegiatan Prioritas “Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian ESDM “Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi” dengan output kegiatan “Infrastruktur EBTKE; PLTS Rooftop; dan Biogas Komunal”.

Capaian keselarasan antara RKA K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.



PN 5 DALAM RKP 2020

STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan siber.

Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 adalah: (1) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti aksi terorisme dan separatisme; (2) adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan WNI di luar

negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya praktik korupsi di berbagai bidang; (5) maraknyaperedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; serta (6) gangguan keamanan siber.

a. Integrasi “Keselarasan Muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” dalam PN 5

Capaian kinerja keselarasan muatan RKP 2020 telah terpetakan langsung (100%) ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan RKP tahun 2020 telah sesuai dengan fokus prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan RPJMN 2020-2024; (2) sasaran PP yang diampu dalam RKP 2020 telah sesuai/relevan dengan sasaran Agenda Pembangunan Rancangan RPJMN 2020-2024; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Agenda Pembangunan ke-7 “Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan sasaran pembangunan “Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 5 melalui Kegiatan Proritas “Penataan Regulasi” dengan Sasaran Kegiatan “Terwujudnya regulasi yang berkualitas”.
- Agenda Pembangunan ke-7 “Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan sasaran pembangunan “Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri” yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah terpetakan dalam dokumen RKP 2020 PN 5 melalui Kegiatan Proritas “Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri” dengan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri”.

Capaian keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran.

b. Integrasi “Keselarasan Muatan Renja K/L 2020 dengan RKP 2020” dalam PN 5

Indikator keselarasan antara Renja K/L dengan RKP 2020 dapat tercapai 100%. Capaian tersebut dibuktikan dengan adanya keselarasan seluruh Kegiatan dalam Renja K/L yang selaras dengan Indikator Kegiatan Prioritas RKP 2020 supaya nantinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tidak keluar dari prioritas tujuan yang sudah ditentukan sehingga Agenda Pembangunan dalam RPJMN dapat tercapai. Keselarasan tersebut dapat dibuktikan diantaranya sebagai berikut:

- Kementerian Hukum dan HAM memiliki Kegiatan “Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Penataan Regulasi” yang memiliki indikator “Jumlah SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum”.

- Kementerian Luar Negeri memiliki Kegiatan “Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri”. Kegiatan K/L tersebut sudah selaras dengan Kegiatan Prioritas “Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri” yang memiliki indikator “Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan”.

Capaian keselarasan antara Renja K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.

c. Sinkronisasi Keselarasan Muatan RKA K/L dengan RKP 2020 dalam PN 5

Capaian kinerja keselarasan muatan RKA K/L telah terpetakan langsung (100%) ke dalam RKP 2020. Hal tersebut dibuktikan: (1) muatan prioritas pembangunan nasional dengan RKP tahun 2020 telah terpetakan/dianggarkan dalam output kegiatan RKA K/L; (2) sasaran output kegiatan K/L telah sesuai/relevan dengan sasaran KP dibawah PP dalam PN yang diampu dalam RKP 2020; dan (3) secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP dalam PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP dan diagregratkan hingga PN yang diampu. Keselarasan tersebut dicontohkan antara lain sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan Prioritas “Terwujudnya regulasi yang berkualitas” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM “Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum”
- Sasaran Kegiatan Prioritas “Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri” sudah teranggarkan dalam Kegiatan Kementerian Luar Negeri “Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri” dengan output kegiatan “Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri”.

Capaian keselarasan antara RKA K/L dengan RKP 2020 dapat dilihat pada lampiran.

B. Capaian Keselarasan Perencanaan RKP Provinsi 2020 dengan RKP 2020

Capaian kinerja keselarasan muatan perencanaan RKP Provinsi 2020 dengan muatan RKP 2020 hanya termuat ke dalam IKU Kedeputian Bidang Pengembangan Regional. Hal itu dikarenakan sesuai Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, yaitu terkait penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial di bidang pengembangan regional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga /Daerah.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional (Musrenbangnas) yang ditujukan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan melalui sinkronisasi rencana kerja kementerian/lembaga di pusat dengan usulan kegiatan dan pendanaan dari daerah. Keselarasan

antara RKPD Provinsi 2020 dengan RKP 2020 dihitung dengan membandingkan jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang mengusulkan kegiatan di setiap Program Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP 2020 melalui aplikasi Musrenbang, dengan jumlah lokasi (Provinsi) yang diprioritaskan di tiap Prioritas Nasional RKP 2020 dalam aplikasi KRISNA-RKP.

Dalam RKP 2020 telah ditetapkan lima PN yang terdiri dari 25 PP yang menjadi fokus perencanaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penjabaran secara detail ke lima PN telah dimasukkan ke dalam aplikasi KRISNA-RKP. Sebagai bentuk penyelarasan perencanaan tahunan antara pusat dan daerah, maka ke-5 PN RKP 2020 juga menjadi acuan dalam pengusulan kegiatan oleh daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui aplikasi e-Musrenbang. Keselarasan yang diukur dari jumlah provinsi yang mengusulkan kegiatan di setiap Program Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP 2020 melalui aplikasi e-Musrenbang sesuai lokasi prioritas, menunjukkan keselarasan antara perencanaan tahunan pusat (RKP) dan daerah (RKPD Provinsi) sebesar 85,59%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 97,67%. Namun, capaian ini masih di atas target sebesar 80%. Target 80% ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua prioritas nasional merupakan prioritas daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan permasalahan yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya.

Dalam RKP 2020, terdapat 1 Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, yang sebagian besar kegiatannya merupakan urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak banyak daerah yang mengusulkan kegiatan ini, sehingga PN ini dikeluarkan dari perhitungan.

Penggunaan aplikasi oleh daerah seringkali mengalami kendala teknis yakni kesalahan dalam melakukan input rencana usulan yang sesuai dengan prioritas nasional, sehingga mengurangi keselarasan muatan RKPD dengan RKP. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem aplikasi secara lebih intensif kepada daerah. Selain itu, terdapat pembatasan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) untuk dibahas dalam Musrenbangnas, sehingga usulan daerah yang dibahas dalam Musrenbangnas hanya usulan pilihan sesuai dengan Pro PN pilihan.

C. Pembangunan Bidang RKP 2020

C.1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

Pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui pembangunan di masing-masing bidang, dengan upaya penguatan melalui pengarusutamaan dan koordinasi lintas bidang, yang satu sama lain saling terkait.

Kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Empat kebijakan pengarusutamaan di dalam RKP 2020 mencakup pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, dan modal sosial budaya. Sementara, dua kebijakan pembangunan lintas bidang mencakup kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Kementerian PPN/Bappenas yang berperan sebagai penyusun kebijakan di bidang perencanaan pembangunan termasuk lintas sektor dan lintas bidang telah melakukan upaya dan koordinasi dengan K/L terkait dalam merumuskan Renja dan RKA K/L sehingga dapat mendukung perwujudan upaya yang termasuk dalam pengarusutamaan dan pembangunan Lintas Bidang, seperti perencanaan dan penganggaran dalam program K/L diantaranya adalah Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Program Pelestarian Budaya; dll.

C.2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Hakikat pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara sistematis, terencana, serta berkelanjutan. Pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan meliputi pemenuhan hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

Muara pembangunan manusia dan masyarakat adalah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan nasional panjang, menengah dan tahunan yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu: terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

Dengan ditetapkannya sasaran, tujuan dan arah kebijakan dalam Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, maka Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam mewujudkan keseluruhan aspek/subbidang yang termasuk di dalamnya melalui pengawasan

perencanaan dan penganggaran program K/L pendukung/pelaksana untuk mendukung target sasaran dan indikator yang termasuk sehingga outcome yang diinginkan dapat tercapai. Seperti yang tertuang dalam perencanaan dan penganggaran dalam program K/L diantaranya adalah Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial; Program Kerukunan Umat Beragama; dll.

C.3. Bidang Pembangunan Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi terdiri atas sembilan bidang yaitu: (1) Bidang Keuangan Negara; (2) Bidang Stabilitas Harga; (3) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi; (4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri; (5) Bidang Kerja sama Internasional; (6) Bidang Jasa Keuangan; (7) Badan Usaha Milik Negara; (8) Bidang Data dan Informasi Statistik; serta (9) Bidang Ketenagakerjaan.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengawalan atas perencanaan program dan kegiatan K/L melalui penelaahan dalam trilateral meeting sehingga yang Renja K/L yang dianggarkan mendukung terwujudnya sasaran dan target subbidang dalam Pembangunan Ekonomi. Seperti yang tertuang dalam perencanaan dan penganggaran dalam program K/L diantaranya adalah Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dll.

C.4. Bidang Iptek

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) erat kaitannya dengan kemampuan suatu negara untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka transisi dari resource-based ke knowledge-based economy, penguasaan Iptek yang berujung pada

penciptaan inovasi menjadi penekanan arah pembangunan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 perlu dibangun kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Pendekatannya dilakukan secara menyeluruh melalui penciptaan ekosistem inovasi.

Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat internasional. Hal itu mengindikasikan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

Walaupun demikian, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu ditunjukkan, antara lain, oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengawalan pada K/L pelaksana (seperti: Kemenristek, LIPI dan BPPT) atas perencanaan hingga penganggaran dalam rangka pemenuhan target sasaran/indikator tersebut. Contohnya, seperti yang tertuang dalam perencanaan dan penganggaran dalam program K/L diantaranya adalah Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek; Program Penguatan Riset dan Pengembangan; dll.

C.5. Bidang Pembangunan Politik

Pembangunan Bidang Politik tahun 2020 diarahkan untuk mengawali pencapaian target RPJMN 2020-2024, yang sangat erat kaitannya dengan Visi RPJPN 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat: tegaknya supremasi hukum; birokrasi yang netral dan efisien; masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang otonom; serta menciptakan kemandirian nasional dalam ketidakpastian geopolitik global dan regional.

Tantangan terberat dalam pembangunan politik dalam negeri adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.

Berkenaan dengan pembangunan luar negeri, tantangannya adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri. Selain itu, bersama negara-negara berkembang lainnya, diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, meningkatnya dukungan dan peran berbagai pelaku dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri, dan terlaksananya hubungan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Sikap Pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif ditujukan pula untuk mendukung upaya memperkuat peranan kelembagaan regional, terutama untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang pada tingkat regional.

Dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan arah kebijakan dalam Pembangunan Bidang Politik, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pengawalan melalui perencanaan dan penganggaran program K/L untuk mendukung tercapainya PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada RKP 2020. Contohnya, seperti yang tertuang dalam perencanaan dan penganggaran dalam program K/L diantaranya adalah Penguatan Keamanan Laut; Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas; Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber; dll.

C.6. Bidang Pembangunan Aparatur

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Pembangunan bidang aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan SDM Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Birokrasi merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Arah kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2020 dengan memperhatikan sasaran dan target pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran dan target Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas birokrasi yang didukung melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas birokrasi, perluasan inovasi dan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pengawalan perencanaan dan penganggaran program K/L untuk mendukung terwujudnya sasaran dan target dari bidang tersebut, antara lain seperti: Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Meningkatnya Implementasi Manajemen ASN berbasis Merit; dsb.

C.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

Pembangunan kewilayahan dan tata ruang merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 khususnya mewujudkan agenda Nawacita ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pembangunan kewilayahan dan tata ruang mencakup penyediaan informasi geospasial; pengelolaan tata ruang dan pertanahan; pembangunan kawasan strategis; perkotaan; desa, kawasan perdesaan, dan daerah transmigrasi; daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; serta desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara nasional, pembangunan daerah hingga saat ini masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan antarwilayah, yaitu antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara pusat-pusat pertumbuhan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan dengan wilayah perdesaan. Kesenjangan yang dimaksud terutama kesenjangan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya yang melimpah belum optimal dilakukan, sementara upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis yang dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum memberikan peran yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya penguatan terhadap sinkronisasi dan sinergi antarsektor, antarpelaku, dan antara pusat dan daerah perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pencapaian target sasaran RKP 2020 melalui pembangunan bidang Kewilayahan dan Tata Ruang. Optimalisasi kedelapan aspek di atas dilakukan dengan proses pengawalan perencanaan dan penganggaran kegiatan dan program K/L yang mendukung sasaran, indikator dan target tersebut.

Prioritas Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang memiliki indikator capaian lebih dari 40 indikator. Setiap indikator tersebut telah diterjemahkan ke dalam Renja K/L dan dianggarkan di dalam RKA K/L. Sebagai contoh adalah kegiatan Penataan Kawasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka mendukung sasaran Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, serta Kegiatan Survei dan Pemetaan Tematik dalam mendukung pembangunan Kawasan Strategis.

C.8. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kerangka pembangunan infrastruktur pada periode lima tahun kedepan difokuskan pada 3 sasaran utama, yaitu: (1) infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar; (2) infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi; dan (3) infrastruktur untuk mendukung pembangunan perkotaan.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi, ketenagalistrikan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengarusutaman pembangunan infrastruktur dalam rancangan RPJMN 2020-2024 yaitu: Kesetaraan Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Pembangunan Berkelanjutan; Modal dan Sosial Budaya; Transformasi Digital; dan Ketahanan Bencana. Hal ini juga didukung oleh mendorong strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan kreatif seperti KPBU dan pendanaan non-APBN lainnya.

Untuk itu, prioritas bidang sarana dan prasarana dalam RKP 2020 antara lain: (1) percepatan penyediaan layanan dasar di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan; (2) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan layanan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal; (3) peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi; (4) peningkatan ketahanan air; serta (5) peningkatan infrastruktur tangguh bencana.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam mengintegrasikan perencanaan dan mensinkronkan penganggaran program K/L dalam rangka mendukung sasaran/target yang telah ditentukan dalam Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana ini, seperti pada program: Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian; Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dll.

C.9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) merupakan upaya untuk: (1) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (2) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; serta (3) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah: (1) masih terjadinya degradasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu, karang, dan padang lamun) serta masih tingginya sampah plastik di laut; (2) semakin tingginya tantangan produksi komoditas pertanian dalam negeri dan fluktuasi harga komoditas pertanian; (3) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (4) tingkat kebakaran hutan dan angka deforestasi yang tinggi; (5) produksi hasil hutan tidak maksimal; (6) konflik tenurial dan belum terselesaikan tata

batas kawasan (7) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan belum optimalnya penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (8) belum maksimalnya penerapan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan.

Pada prinsipnya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut.

Berkenaan dengan implementasi bidang tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya dalam pengawalan perencanaan dan penganggaran program K/L sehingga dapat terarah mendukung sasaran dan indikator dalam pembangunan bidang ini, contohnya seperti: Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dsb.

3.1.2.2. Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L

Pengukuran capaian kinerja IKU “Persentase (%) Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” dilakukan dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan RKP 2019. Hal tersebut Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanah untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, kinerja IKU tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2019 tetapi belum tercapai target 100%. Rekapitulasi capaian kinerja IKU di atas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rekapitulasi Capaian IKU “% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” Tahun 2019

IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	Capaian Kinerja Tahun 2019					Total Capaian IKU UKE I Tw IV	Capaian IKU Menteri Tw IV
		KINERJA PENGENDALIAN RKP 2019 (%)						
		PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5		
% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L	Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Nasional RKP 2018	98,20	92,32	85,98	78,53	96,71	90,35	90,35

Sumber: Rekapitulasi Laporan Kinerja UKE I, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengendalian telah dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2019. Namun, capaian kinerja IKU tersebut sebesar 90,35% sehingga belum mendapatkan hasil maksimal.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi diantaranya seperti:

1. Adanya perubahan anggaran Kementerian K/L, khususnya pengurangan anggaran *Output* Kegiatan K/L yang mendukung tercapainya sasaran/target Prioritas Nasional RKP 2019.
2. Terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/subkomponen kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam Prioritas Nasional RKP 2019.

3. Belum optimalnya peran dan fungsi pemantauan dan pengendalian oleh penanggung jawab Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terhadap pelaksanaan *Output* Kegiatan K/L yang mendukung tercapainya sasaran/target Prioritas Nasional RKP 2019.

Secara umum, hubungan sebagian besar pencapaian sasaran PN-PP-KP telah selaras dengan dukungan output K/L yang diberikan. Artinya program dan kegiatan K/L (1) telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP RKP 2019 dan (2) telah optimal berperan dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP RKP 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, keselarasan tersebut masih perlu ditingkatkan pada PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dan PN 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.

Pencapaian PN hingga triwulan IV tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 di antaranya permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM). Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan antarinstansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN.

Selanjutnya, permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi yaitu kurangnya peningkatan sarana dan prasarana sehingga menjadi faktor penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP 2019.

Ke depan, peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas diharapkan akan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan sinergitas program pembangunan K/L/D; (2) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP; dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas nasional RKP.

Berikut penjelasan ringkas pencapaian setiap PN RKP 2019, yang memuat capaian beberapa indikator penting (*outcome*) dan simpulan kinerja pelaksanaan PP yang menggambarkan capaian *immediate outcome*.

I. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 1 RKP 2019:

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Prioritas Nasional (PN) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Guna mencapai sasaran PN ini, maka diperlukan kerja sama antarsektor dan berbagai pemangku kepentingan yang dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP) yang kemudian dijabarkan dalam 21 Kegiatan Program (KP) dan dilaksanakan oleh 20 K/L.

2) Pencapaian Kinerja PN

Keberhasilan dari indikator kinerja PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar diukur dari persentase perbandingan antara hasil capaian dengan target kinerja pada sasaran PN RKP 2019 yang menjadi tanggung jawab teknis Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Indikator ini menilai konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai sasaran/target pembangunan. Berikut capaian pelaksanaan PN 1 RKP 2019 hingga Triwulan IV.

Tabel 3.5. Capaian PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran	Target	Capaian hingga TW IV 2019	Notifikasi
1	Meningkatnya kualitas SDM			
	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,98	71,39	Tidak Tercapai
2	Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan			
	Tingkat kemiskinan (persen)	8,50-9,50	9,22	Tercapai
3	Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan			
	Rasio gini (nilai)	0,380-0,390	0,380	Tercapai

Sumber: Perhitungan Evaluasi RKP 2019 Triwulan IV, Kedepuitan PEPP (diolah 2020)

	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Kinerja Pembangunan Berdasarkan			
a. Pencapaian Sasaran (%)	99,73 ●	85,59 ●	88,06 ●
b. Dukungan <i>Output</i> K/L (%)	96,67 ●		
c. Rata-Rata Kinerja	98,20 ●		
Keselarasn Kinerja Pembangunan	Selaras		
Kesimpulan Kinerja Pembangunan	Baik		

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;
○ tidak dapat diberikan notifikasi

Berdasarkan pencapaian sasaran, kinerja outcome (PN) menunjukkan kinerja yang baik sedangkan kinerja *immediate outcome* (PP) dan output (KP) menunjukkan kinerja yang cukup baik (realisasi 60-90 persen, notifikasi kuning).

Disamping itu, dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN-PP-KP sebesar 96,67 persen. Dukungan output K/L sudah optimal dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP sesuai dengan target yang ditetapkan. Hubungan kinerja pembangunan menunjukkan kondisi yang selaras, artinya program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PNPP-KP.

Bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka rata-rata kinerja PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar sebesar 98,20 persen dan masuk dalam kategori kinerja baik. Secara rinci capaian masing-masing sasaran dapat dilihat di lampiran.

3) Tindak Lanjut

Rekomendasi umum yang dapat diberikan terkait dengan pelaksanaan PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, yaitu (1) perbaikan pelaksanaan program jaminan sosial; (2) peningkatan sistem pemantauan untuk menilai secara efektif capaian, tujuan dan dampak dari berbagai program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; (3) peningkatan kapasitas dan peranan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi, edukasi, penanganan permasalahan sosial di daerah, maupun inovasi penyediaan layanan di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah; (4) pemantauan dan evaluasi untuk menilai secara efektif capaian tujuan dan dampak dari berbagai program bantuan sosial; serta (5) perbaikan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil.

II. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 2 RKP 2019

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan tersebut, salah satu tantangan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman diarahkan pada: (1) peningkatan sistem logistik; (2) pembangunan infrastruktur; (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; (4) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; serta (5) penanggulangan bencana. PN 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman dilakukan melalui 5 PP yang kemudian dijabarkan dalam 20 KP dan dilaksanakan oleh 22 K/L.

2) Pencapaian Kinerja PN

Keberhasilan kinerja PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman diukur dari persentase perbandingan antara hasil capaian dengan target kinerja pada sasaran PN RKP 2019 yang menjadi tanggung jawab teknis Kedepuitan Bidang Pengembangan Regional. Berikut tabel capaian pelaksanaannya.

Tabel 3.6. Capaian PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

No.	Sasaran	Target	Capaian hingga TW IV 2019	Notifikasi
1	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal			
	Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	15,0-15,5	17,06	Tercapai
2	Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal			
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	6,9-7,1	5,01	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya perdagangan antardaerah			
	Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	19,2	23,2	Tercapai
4	Meningkatnya indeks pembangunan TIK			
	ICT Development Index (nilai)	4,9-5,2	4,99 (capaian 2018)	Tercapai

Sumber: Perhitungan Evaluasi RKP 2019 Triwulan IV, Kedepuitan PEPP (diolah 2020)

	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Kinerja Pembangunan Berdasarkan			
a. Pencapaian Sasaran (%)	90,64 ●	94,38 ●	90,57 ●
b. Dukungan <i>Output</i> K/L (%)	93,99 ●		
c. Rata-Rata Kinerja	92,32 ●		
Keselarasan Kinerja Pembangunan	Selaras		
Kesimpulan Kinerja Pembangunan	Baik		

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;
○ tidak dapat diberikan notifikasi

Berdasarkan pencapaian sasaran, kinerja outcome (PN) dan immediate outcome (PP) menunjukkan kinerja yang baik sedangkan kinerja output (KP) menunjukkan kinerja yang cukup baik. Disamping itu, dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN-PP-KP sebesar 93,99 persen. Dukungan output K/L telah optimal dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP sesuai dengan target yang ditetapkan. Hubungan kinerja pembangunan menunjukkan kondisi yang selaras, artinya program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP.

Bila ditarik kesimpulan secara umum, maka rata-rata kinerja PN 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman sebesar 92,32 persen dan masuk dalam kategori kinerja baik. Secara rinci capaian masing-masing sasaran dapat dilihat di lampiran.

3) Tindak Lanjut

Upaya penguatan struktur ekonomi lokal di daerah 3T dan desa fokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah; peningkatan nilai tambah pada produk pertanian; peningkatan akses permodalan baik konvensional maupun pemanfaatan digital platform; perluasan akses pasar baik online maupun offline bagi para pelaku ekonomi di daerah 3T dan desa bekerja sama dengan offtaker dengan memanfaatkan e-commerce sebagai media pemasaran/penjualan; dan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas menuju pusat distribusi/aktivitas ekonomi. Selain itu, pemberian pelatihan peningkatan kapasitas kepada penduduk yang belum bekerja agar dapat berwirausaha dan/atau terqualifikasi untuk bekerja; menjaga kestabilan harga dan penguatan BDT terutama bagi penduduk miskin di 3T dan desa.

Solusi dan tindak lanjut yang diperlukan dalam mencapai target ICT Development Index di antaranya mendorong perluasan akses terhadap infrastruktur TIK dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, sehingga memudahkan adopsi pemanfaatan pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Harga layanan telekomunikasi yang terjangkau dapat dicapai dengan insentif tertentu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam mengeluarkan regulasi terutama yang berkaitan dengan tarif retribusi penggelaran jaringan telekomunikasi di daerah yang rendah bagi operator telekomunikasi.

III. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 3 RKP 2019:

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Prioritas Nasional 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya dilakukan melalui 5 PP dan 21 KP dan dilaksanakan oleh 30 K/L.

2) Pencapaian Kinerja PN

Keberhasilan dari indikator kinerja PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya diukur dari persentase perbandingan antara hasil capaian dengan target kinerja pada sasaran PN RKP 2019 yang menjadi tanggung jawab teknis Kedeputusan Bidang Ekonomi. Berikut capaian pelaksanaan PN 3 RKP 2019 hingga Triwulan IV.

Tabel 3.7. Capaian PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

No.	Sasaran	Target	Capaian hingga TW IV 2019	Notifikasi
1	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya			
a.	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,8	3,64	Tidak Tercapai
b.	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	5,1	3,80	Tidak Tercapai
c.	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	5,3	4,62	Tidak Tercapai
d.	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	7	4,45	Tidak Tercapai
e.	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	6,3	-0,87	Tidak Tercapai
f.	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	270,0 – 280,0	278,6	Tercapai
g.	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	2,6 – 2,9	2,51	Tidak Tercapai
h.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	4,0 – 5,0	2,94	Tidak Tercapai

Sumber: Perhitungan Evaluasi RKP 2019 Triwulan IV, Kedepatian PEPP (diolah 2020)

	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	
Kinerja Pembangunan Berdasarkan				
a.	Pencapaian Sasaran (%)	73,88 	83,86 	88,27 
b.	Dukungan <i>Output</i> K/L (%)	98,08 		
c.	Rata-rata Kinerja Pembangunan (%)	85,98 		
Keselarasan Kinerja Pembangunan		Kurang Selaras		
Kesimpulan Kinerja Pembangunan		Cukup Baik		

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan:  realisasi >90% target;  realisasi 60-90% target;  realisasi <60% target;
 tidak dapat diberikan notifikasi

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja outcome (PN), *immediate outcome* (PP) dan output (KP), ketiganya menunjukkan kinerja yang cukup baik (realisasi 60-90 persen, notifikasi kuning). Disamping itu, dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN-PP-KP sebesar 98,08 persen. Dukungan output K/L telah optimal dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP sesuai dengan target yang ditetapkan. Hubungan kinerja pembangunan menunjukkan kondisi yang kurang selaras, artinya program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan belum dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP.

Bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka rata-rata kinerja PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya sebesar 85,98 persen dan masuk dalam kategori kinerja cukup baik. Secara rinci capaian masing-masing sasaran dapat dilihat di lampiran.

3) Tindak Lanjut

Tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif, antara lain (1) perbaikan rantai distribusi melalui tata kelola sistem pangan; diversifikasi pasar untuk produk pertanian; (2) pengoptimalan kegiatan pembinaan dan penyuluhan; debottlenecking masalah industri; (3) penyederhanaan regulasi dan prosedur investasi; (4) percepatan realisasi proyek-proyek pemerintah, terutama proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (5) percepatan pelaksanaan pendidikan nonformal dan pelatihan vokasi; (6) peningkatan kerja sama dengan K/L terkait data IO pariwisata; serta (7) pendampingan dari Tim BPS Pusat ke K/L serta menggunakan sarana portal kolaborasi.bps.go.id untuk meningkatkan komunikasi dengan BPS pusat.

IV. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 4 RKP 2019:

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Prioritas Nasional 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dilakukan melalui 4 PP yang kemudian dijabarkan dalam 18 KP dan dilaksanakan oleh 11 K/L.

2) Pencapaian Kinerja PN

Keberhasilan dari indikator kinerja PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air diukur dari persentase perbandingan antara hasil capaian dengan target kinerja pada sasaran PN RKP 2019 yang menjadi tanggung jawab teknis Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Berikut capaian pelaksanaan PN 4 RKP 2019.

Tabel 3.8. Capaian PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

No.	Sasaran	Target	Capaian hingga TW IV 2019	Notifikasi
1	Tercapainya produksi sumber daya energi			
	Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari)	2025	1809	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)			
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,9	98,89	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan			
	a. Pertumbuhan produksi padi/beras (%)	2,4	-7,76	Tidak Tercapai
	b. Pertumbuhan produksi jagung (%)	3,0	4,3	Tercapai
	c. Pertumbuhan produksi kedelai (%)	11,1	-34,74	Tidak Tercapai
	d. Pertumbuhan produksi gula (%)	15,2	3,85	Tidak Tercapai
	e. Pertumbuhan produksi daging sapi (%)	7,0	-2,56	Tidak Tercapai
	f. Pertumbuhan produksi Ikan (%)	8,1	8,84	Tercapai
	g. Pertumbuhan produksi garam (%)	9,8	5,56	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan			
	Skor pola pangan harapan (nilai)	92,5	90,8	Tidak Tercapai
5	Meningkatnya ketersediaan air			
	Kapasitas air baku (m3/detik)	78,68	81,4	Tercapai
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,5 –68,5	66,56	Tercapai

Sumber: Perhitungan Evaluasi RKP 2019 Triwulan IV, Kedepatian PEPP (diolah 2020)

	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Kinerja Pembangunan Berdasarkan			
a. Pencapaian Sasaran (%)	64,05 ●	89,79 ●	89,72 ●
b. Dukungan <i>Output</i> K/L (%)	93,00 ●		
c. Rata-Rata Kinerja	78,53 ●		
Keselarasan Kinerja Pembangunan	Kurang Selaras		
Kesimpulan Kinerja Pembangunan	Cukup Baik		

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target.

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja outcome (PN), immediate outcome (PP) dan output (KP), ketiganya menunjukkan kinerja yang cukup baik. Disamping itu, dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN-PP-KP sebesar 93,00 persen. Dukungan output K/L telah optimal dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP sesuai dengan target yang ditetapkan. Hubungan kinerja pembangunan menunjukkan kondisi yang kurang selaras, artinya program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan belum dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP.

Bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka rata-rata kinerja PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air sebesar 78,53 persen dan masuk dalam kategori kinerja cukup baik. Secara rinci capaian masing-masing sasaran dapat dilihat di lampiran.

3) Tindak Lanjut

Permasalahan dalam pencapaian sasaran PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air yang berkaitan dengan produksi sumber daya energi khususnya migas adalah (1) eksplorasi dan pengembangan blok migas, (2) belum dikembangkannya metode terbaru untuk penemuan resources dan reserves, (3) belum optimalnya pengembangan lapangan onstream tepat waktu, dan (4) kurangnya pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi.

Tantangan pencapaian rasio elektrifikasi saat ini selain untuk mencapai target 100 persen, pemerintah juga terus menyelesaikan kualitas kelistrikan, sehingga ke depan ditargetkan pelayanan listrik dapat dinikmati selama 24 jam terutama di daerah 3T. Dalam pencapaian target indikator pertumbuhan produksi pangan, beberapa permasalahan seperti perubahan iklim berdampak pada terjadinya kemarau panjang pada tahun 2019 sehingga membuat produksi komoditas pertanian menurun. Selain itu, minimnya keinginan petani dalam menerapkan good agricultural practices (GAP) dan rendahnya tingkat adopsi teknologi di tingkat petani menyebabkan produktivitas tanaman di bawah kondisi ideal dan dari segi kelembagaan masih terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

V. KINERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PN 5 RKP 2019: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

1) Gambaran Umum Pelaksanaan

PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan SDM dan SDA, serta terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis. Prioritas Nasional 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilakukan melalui 5 PP yang kemudian dijabarkan dalam 20 KP dan dilaksanakan oleh 47 K/L.

2) Pencapaian Kinerja PN

Keberhasilan dari indikator kinerja PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu diukur dari persentase perbandingan antara hasil capaian dengan target kinerja pada sasaran PN RKP 2019 yang menjadi tanggung jawab teknis Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Indikator ini menilai konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai sasaran/target pembangunan. Berikut capaian pelaksanaan PN 5 RKP 2019 hingga Triwulan IV.

Tabel 3.9. Capaian PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No.	Sasaran	Target	Capaian hingga TW IV 2019	Notifikasi
1	Terjaganya stabilitas keamanan nasional			
	a. <i>Clearance rate</i> (%)	60	65	Tercapai
	b. <i>Response time</i> kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	18'00"	15'00"	Tercapai
	c. <i>Global Military Index</i> (nilai)	0,31	0,28	Tercapai
2	Terselenggaranya kesuksesan Pemilu			
	a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) (nilai)	75	72,39 (IDI 2018)	Tidak Tercapai
	b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	77,5	81,97 (Pemilu Presiden dan Wapres) 81,69 (Pemilu Legislatif)	Tercapai

Sumber: Perhitungan Evaluasi RKP 2019 Triwulan IV, Kedepuitan PEPP (diolah 2020)

	Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Kinerja Pembangunan Berdasarkan			
a. Pencapaian Sasaran (%)	99,30 ●	94,83 ●	93,65 ●
b. Dukungan <i>Output</i> K/L (%)	94,11 ●		
c. Rata-Rata Kinerja (%)	96,71 ●		
Keselarasannya Kinerja Pembangunan	Selaras		
Kesimpulan Kinerja Pembangunan	Baik		

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan: ● realisasi >90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi <60% target;
○ tidak dapat diberikan notifikasi

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja outcome (PN), *immediate outcome* (PP) dan output (KP), ketiganya menunjukkan kinerja yang. Disamping itu, dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN-PP-KP sebesar 94,11 persen. Dukungan output K/L telah optimal dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP sesuai dengan target yang ditetapkan. Hubungan kinerja pembangunan menunjukkan kondisi yang selaras, artinya program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PNPP-KP.

Bila ditarik kesimpulan secara umum, yaitu dengan memperhatikan kedua aspek tersebut di atas, maka rata-rata kinerja PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu sebesar 96,71 persen dan masuk dalam kategori kinerja baik. Secara rinci capaian masing-masing sasaran dapat dilihat di lampiran.

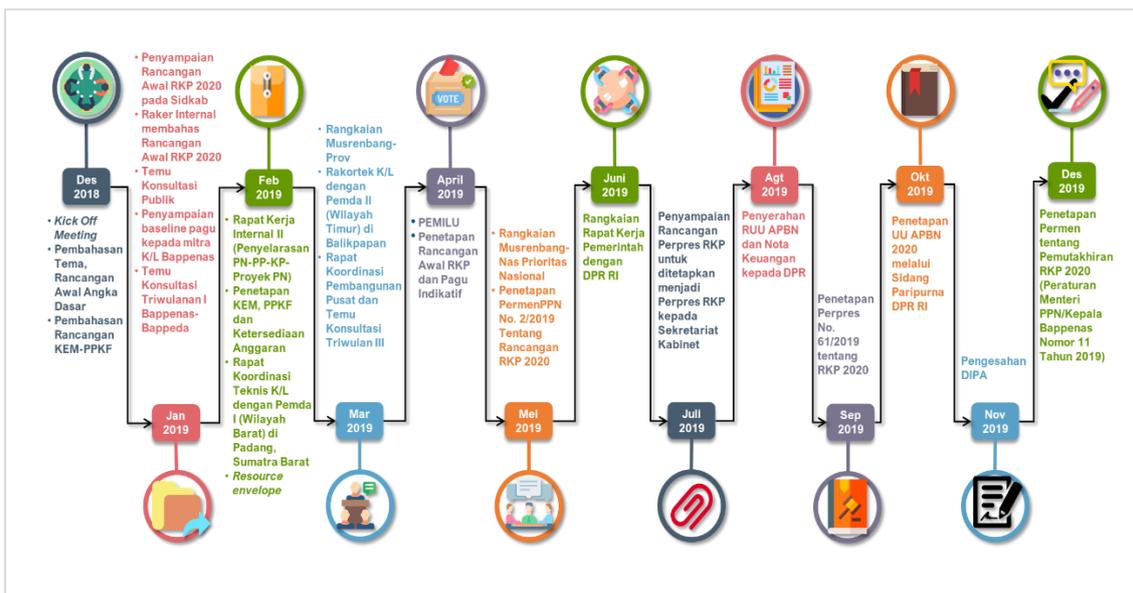
3) Tindak Lanjut

Tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, yaitu (1) menjaga dan meningkatkan kinerja response time dengan pemberian bimbingan teknis, pelatihan patwal secara terpusat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung, dan pengoptimalan penggunaan call center; (2) meningkatkan pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sehingga kesiapan alutsista menjadi lebih optimal; serta (3) mengoptimalkan nilai IDI dan tingkat partisipasi politik dengan penguatan sinergi antarlembaga dan perumusan model pendidikan politik, pemilih, dan pengawasan partisipatif yang lebih inovatif.

3.1.2.3. Rancangan Perpres RKP 2020

Capaian kinerja IKU “Rancangan Peraturan Presiden RKP 2020” telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas hingga tercapai 100%. Hal ini dibuktikan oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang RKP Tahun 2010 beserta pemutakhirannya melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2020. Berikut secara singkat gambaran serangkaian proses penyusunan dokumen RKP Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.4. Alur Kerja Proses Perpres RKP 2020



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan RKP 2020 masih mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjembatani RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024.

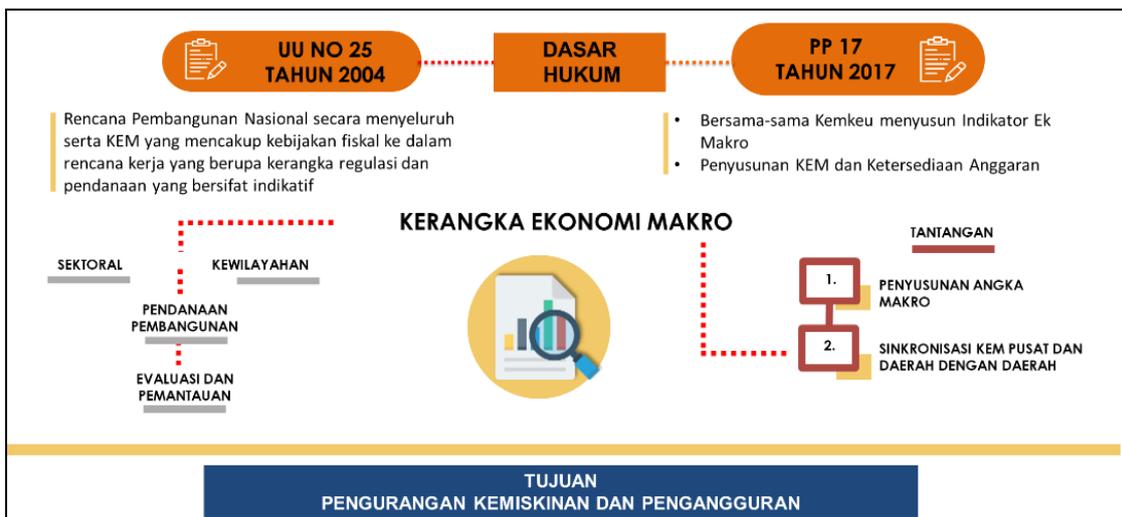
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2020 dijadikan pedoman pada saat K/L menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2020 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2020 dengan pendekatan *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2020. Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, yang

kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki *core business* dalam perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP, Kementerian PPN/Bappenas diberi mandat untuk melakukan perhitungan proyeksi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) pada proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Misalnya pada RKP 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun KEM sejak bulan Desember 2018 dan ditetapkan pada Februari 2019 melalui Sidang Kabinet Paripurna.

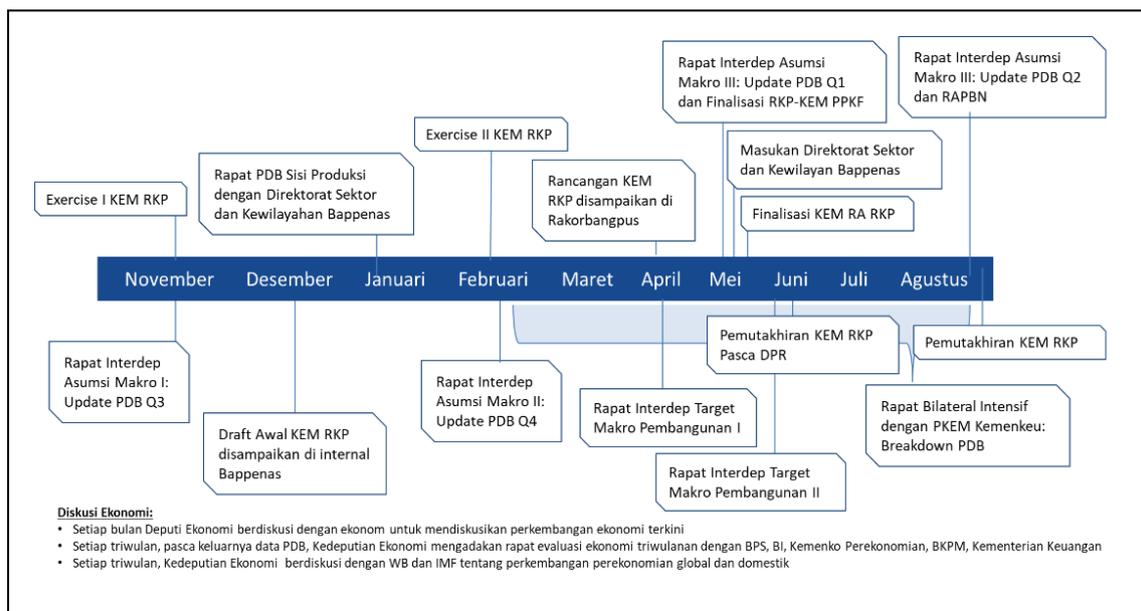
Dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) RKP 2020, terdapat proses dan tahapan yang diampu oleh Kedeputusan Ekonomi dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan 3.6:

Gambar 3.5. Alur Kerja Kerangka Ekonomi Makro



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2020, 2019

Gambar 3.6. Alur Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro



Sumber: Tim Penyusunan RKP 2020, 2019

Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan KEM RKP 2020 telah dilakukan sejak akhir tahun 2018, tepatnya sejak bulan November. Pada bulan ini, tim KEM yang anggotanya bersifat lintas direktorat dan kedeputian melakukan exercise pertama terhadap KEM RKP 2020. Exercise pertama ini dilakukan dengan memfokuskan pada evaluasi kondisi ekonomi terkini dan outlook untuk tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020. Exercise terus dilakukan dan diupdate setiap triwulan, disesuaikan dengan publikasi resmi pertumbuhan ekonomi atau jika ada perkembangan ekonomi lain yang perlu direspon dengan cepat.
2. Pada bulan yang sama, koordinasi dengan kementerian lain, dilakukan melalui mekanisme rapat interdep asumsi makro yang dilakukan setelah publikasi resmi pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2020. Tim asumsi makro melibatkan:
 - Kementerian PPN/Bappenas (Deputi Bidang Ekonomi dan PMK)
 - Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJPPR)
 - Bank Indonesia
 - Kemenko Bidang Perekonomian
 - Kementerian ESDM
 - SKK Migas

Rapat tim asumsi makro membahas dan menyepakati asumsi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SPN, harga minyak dunia, dan lifting migas) untuk tahun 2019-2023.

Rapat tim asumsi makro terus dilakukan setiap triwulan, selepas publikasi resmi pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, meski penyusunan KEM RKP selesai pada pertengahan tahun, tetapi berbagai indikator ekonomi yang dimuat dalam APBN atau Nota Keuangan juga melalui mekanisme rapat tim asumsi makro, dimana angka yang digunakan merupakan kesepakatan bersama, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

3. Setelah asumsi makro disepakati, koordinasi penyusunan KEM diikuti oleh rapat koordinasi teknis untuk membreakdown lebih detail asumsi makro dan arah kebijakan keseluruhan. Rapat koordinasi teknis bisa dilakukan sewaktu waktu sesuai kebutuhan, bahkan dalam beberapa waktu mendahului rapat interdep asumsi makro.
4. Setelah KEM disepakati lintas kementerian, termasuk sasaran PDB sisi lapangan usaha, koordinasi penyusunan KEM dilakukan di dalam internal Bappenas. Sasaran PDB lapangan usaha didiskusikan bersama direktorat sektor dan mitra KL terkait, seperti gambar berikut:

Gambar 3.7. Koordinasi Penetapan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

	Pertanian	<input type="checkbox"/> Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian.
	Pertambangan	<input type="checkbox"/> Direktorat Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian ESDM
	Industri	<input type="checkbox"/> Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian
	Listrik	<input type="checkbox"/> Direktorat ETI dan Kementerian ESDM
	Perdagangan	<input type="checkbox"/> Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional dan Kementerian Perdagangan
	Konstruksi	<input type="checkbox"/> Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian.
	Infokom	<input type="checkbox"/> Direktorat Energi, Teknologi, dan Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi
	Jasa Keuangan	<input type="checkbox"/> Direktorat dengan Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan
	Transportasi	<input type="checkbox"/> Direktorat Transportasi dan Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber: Tim Penyusunan RKP 2020, 2019

5. Hasil KEM disampaikan kepada Kedeputian PMK untuk dijadikan dasar dalam perhitungan sasaran kemiskinan dan rasio gini. Untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Direktorat PMAS menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan berdasarkan sasaran pertumbuhan ekonomi. Hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan disampaikan ke Kedeputian SDM untuk menghitung sasaran IPM.
6. Tim KEM menghitung sasaran pertumbuhan wilayah (pulau dan provinsi) untuk dijadikan acuan oleh Kedeputian Regional dalam merumuskan sasaran dan arah pengembangan wilayah.

7. Koordinasi juga dilakukan terkait target makro pembangunan lainnya, yakni sasaran pertumbuhan ekspor non migas dan PMA/PMDN. Untuk sasaran pertumbuhan ekspor non migas, rapat koordinasi dilakukan dengan Kementerian Perdagangan, direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Untuk sasaran PMA/PMDN, rapat koordinasi dilakukan dengan BKPM, direktorat PIKEI Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
8. Proses koordinasi terus dilakukan sepanjang tahun, terutama jika ada data ekonomi terbaru.
9. Tim KEM juga kerap mengadakan berbagai diskusi dengan ekonom swasta, akademisi, atau lembaga internasional untuk berbagai pandangan tentang kondisi ekonomi terkini dan outlook ke depan.

Secara umum, KEM RKP menjadi payung bagi proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. KEM memberikan gambaran secara utuh kondisi perekonomian yang dihadapi ke depan, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas atau program di bawahnya. Perhitungan KEM juga menentukan besarnya ketersediaan anggaran (*resource envelope*) untuk dibagikan ke dalam prioritas dan program kementerian/lembaga.

Sasaran Strategis (SS) 2

Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, pada RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah Manajemen Tata Kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih. Indikator kinerjanya berupa Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

3.1.2.4. Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas

Secara keseluruhan capaian kinerja IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas” dari tahun 2017-2018 telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan tercapai dengan kategori “Baik”. Namun, capaian kinerja tahun 2019 melalui *bridging* IKU “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi” (dengan cara penilaian skor RB dan evaluasi AKIP) sampai dengan terselesainya penulisan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja IKU “Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas” Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya.

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian IKU "Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PPN/Bappenas" Tahun 2017-2019

IKU Menteri	Bridging Pengukuran Rancangan IKU 2020-2024	IKU UKE I/II Tahun 2019	Capaian 2017		Capaian 2018		Capaian 2019	
			IKU Menteri	IKU UKE I/II	IKU Menteri	IKU UKE I/II	IKU Menteri	IKU UKE I/II
Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK	BAIK	WTP	BAIK	WTP	BAIK	WTP
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Skor RB K/L		A (80,93)		A (81,59)		A (82,48)
		Skor Evaluasi AKIP		BB (77,49)		A (80,08)		A (81,19)

Sumber: Laporan Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas (diolah, 2020)

Uraian hasil capaian pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

A. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai opini WTP sejak Laporan Keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 yaitu 12 (dua belas) tahun berturut-turut. Dengan tercapainya opini WTP, maka menunjukkan terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Dengan semakin meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas, maka semakin bertambah total anggaran dan Satuan Kerja (Satker) yang dimiliki dari yang awalnya 1 (satu) Satker menjadi 4 (empat) Satker Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Satker Daerah (dekonsentrasi).

Pada tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja

di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja keras dalam hal pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.

Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahankelemahan yang ada.

B. Nilai Reformasi Birokrasi

Dalam rangka penerapan prinsip *good governance*, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan reformasi birokrasi (RB) untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada kondisi dan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 dan tertuang dalam *Roadmap* RB Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019.

Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas secara rutin dilaksanakan dengan melibatkan Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Tim Agen Perubahan, baik Tim RB dan Tim Agen Perubahan pada level Kementerian maupun Tim RB dan Tim Agen Perubahan Unit Kerja Eselon I. Hal tersebut mengharuskan Biro Renortala sebagai penanggungjawab Tim RB Kementerian untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian PAN dan RB selaku pembina pelaksanaan RB nasional dikarenakan adanya penyesuaian mekanisme penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 30/2018 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Adapun penyesuaian yang dimaksud antara lain:

1. Penambahan Sub Kriteria Penilaian
 - Penguatan Tata Laksana (Kualitas pengelolaan Arsip)
 - Penguatan Pengawasan (Tingkat penyampaian LHKPN dan LHKASN; Level Maturitas SPIP; Jumlah pengaduan; dan Indeks Kapabilitas APIP)
2. Perluasan Objek Penilaian
 - Penilaian capaian kegiatan Reformasi Birokrasi sampai kepada tingkat Unit Kerja

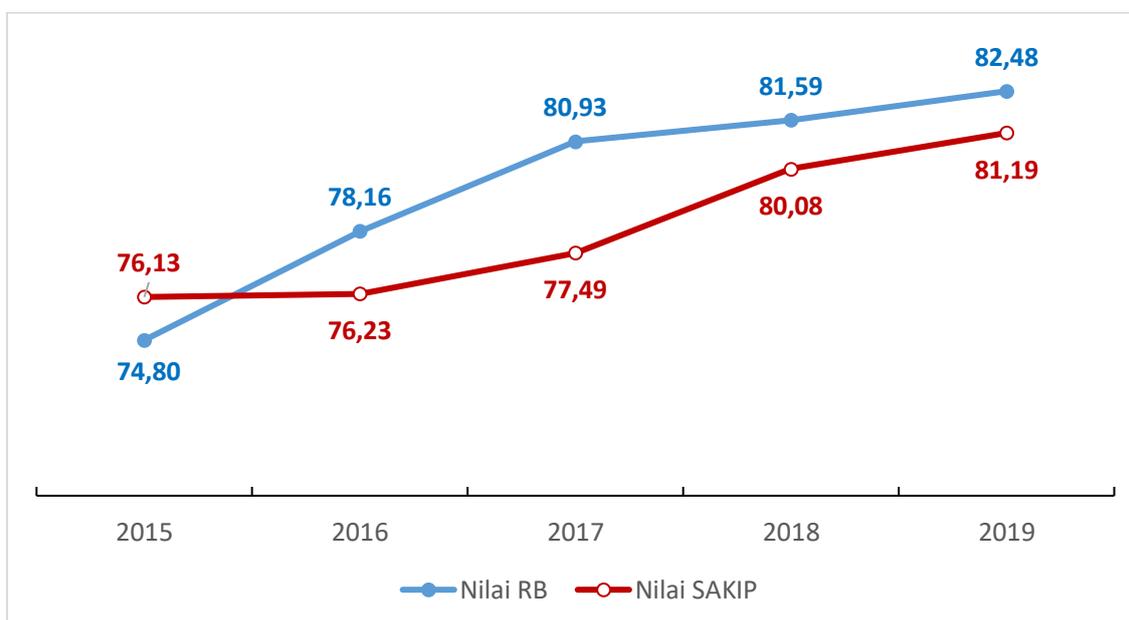
Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan RB 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Kick-Off* pelaksanaan RB 2019;
2. Pertemuan koordinasi dengan tim *person-in-charge* (PIC) RB dan tim Agen Perubahan;
3. Monev pelaksanaan RB secara berkala;

4. Inventarisasi dokumen data dukung RB;
5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) melalui diskusi panel asesor yang diketuai oleh Inspektorat Utama sebagai asesor internal Bappenas;
6. Input nilai PMPRB secara *on-line*;
7. Pelaksanaan evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB;
8. Pelaksanaan survey internal dan survey eksternal untuk menilai kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pelaksanaan RB ini telah berhasil sesuai dengan target kategori A dengan skor 82,48 (2019). Kedepan, harus terus ditingkatkan untuk mencapai skor maksimal kategori A dengan skor 90. Walaupun ada peningkatan dari 81,59 (2018) menjadi 82,48 (2019), terdapat subkomponen penilaian yang perlu perhatian kedepannya untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pada penataan sistem manajemen SDM dan pelayanan eksternal/publik. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan capaian indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bagian dari RB di area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja. Tren peningkatan ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Gambar 3.8. Nilai RB dan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019



Sumber: Kementerian PANRB, 2015-2019 (diolah)

Upaya perubahan yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan antara lain seperti:

1. Kementerian PPN/Bappenas telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional melalui pembuatan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Melakukan reviu atas implementasi *Agent Of Change/AoC* sehingga dapat meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
3. Telah melakukan identifikasi/analisis peraturan perundangan yang tidak harmonis terhadap sebagian peraturan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan *assessment* kepada sebagian besar pegawai dan pemetaan kompetensi pegawai didasarkan pada dokumen *Human Capital Development Program*. Hasil *assessment* telah ditindaklanjuti untuk pengembangan kompetensi pegawai dalam bentuk diklat, pelatihan, dan tugas belajar.

Beberapa catatan dari Tim Evaluator Kementerian PANRB yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lebih banyak dilakukan pada tingkat Kementerian PPN/Bappenas. Evaluasi yang kami lakukan terhadap Deputy Bidang Ekonomi serta Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menunjukkan kondisi belum seluruhnya terinternalisasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kinerja individu belum didasarkan pada kinerja organisasi. Kondisi ini mengakibatkan kinerja pegawai pada setiap tingkatan tidak selalu selaras dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi;
3. Mendorong pembangunan dan pengembangan ZI dengan menyinergikan peran TPI dan tim ZI di tingkat unit kerja dalam mengawal pelaksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat terwujud unit kerja Menuju WBK/WBBM.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa rekomendasi terhadap peningkatan capaian seluruh area perubahan yang perlu ditindaklanjuti di tahun berikutnya serta dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Cakupan implementasi reformasi birokrasi agar sampai dan terinternalisasi kepada seluruh unit Eselon I dan unit kerja vertikal di bawahnya. Program – program yang menjadi percepatan reformasi birokrasi (*quick wins*) hendaknya dikawal dan dapat diperoleh hasilnya sehingga dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
2. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan “agen perubahan” serta mengidentifikasi langkah – langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan *mindset* aparatur dapat terwujud;
3. Menggerakkan upaya dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dengan melakukan identifikasi unit kerja yang dicanangkan kemudian melakukan pembangunan

yang berkesinambungan hingga unit tersebut dinyatakan layak masuk dalam predikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Independen; dan

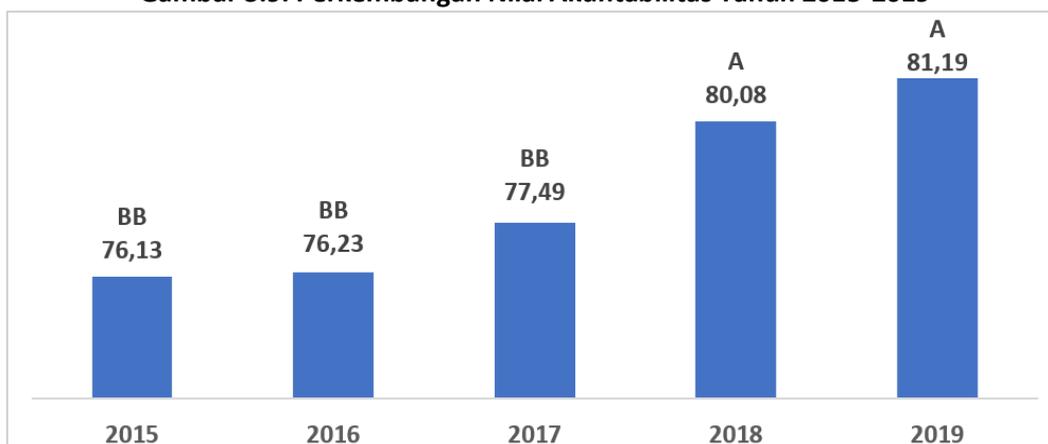
4. Ukuran kinerja individu agar mengacu pada kinerja organisasi dan dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 menunjukkan hasil evaluasi SAKIP dengan nilai 81,19 predikat A atau naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (nilai 80,08). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PPN/Bappenas sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Perkembangan capaian hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

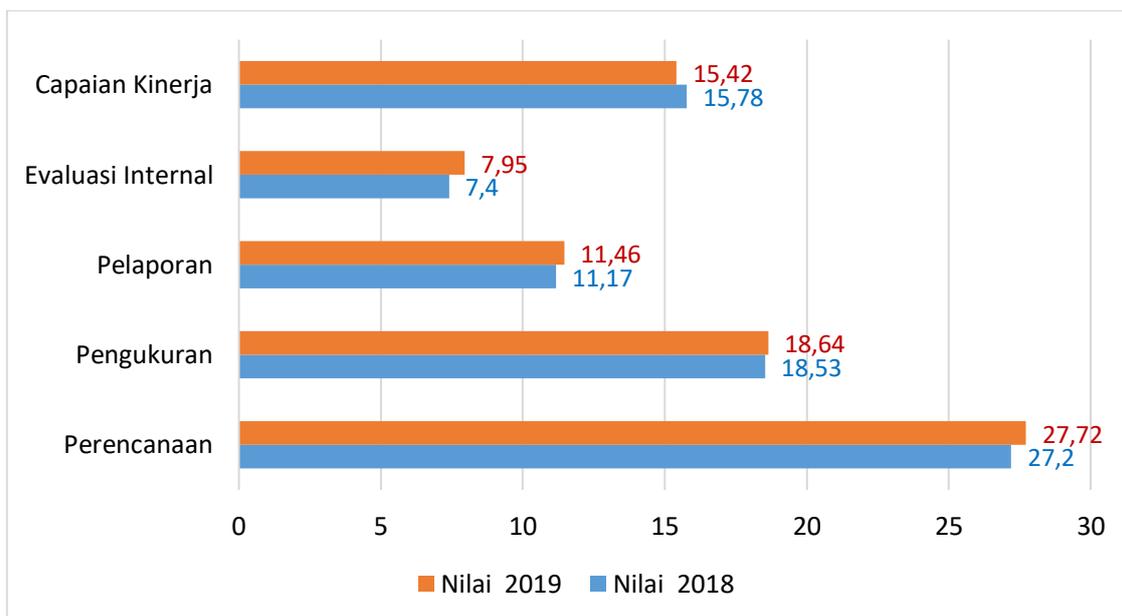
Gambar 3.9. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2015-2019



Sumber: Kementerian PANRB (diolah, 2019)

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Capaian Kinerja. Kementerian PAN dan RB menilai bahwa Laporan kinerja di tingkat Kementerian dan Unit Kerja telah menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, namun kedepan perlu penyajian analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2018-2019.

Gambar 3.10. Nilai Komponen Akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018-2019



Sumber: Kementerian PANRB, 2018-2019

Walaupun Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan penilaian yang baik, tetapi masih ada beberapa rekomendasi guna lebih mendapatkan nilai yang tinggi. Proses perbaikan telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, namun ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, yaitu:

Tabel 3.11. Upaya Perbaikan SAKIP Kementerian PPN/Bappenas atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB

Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Tindak Lanjut Kementerian PPN/Bappenas
1. Memanfaatkan hasil reviu atas indikator kinerja utama ke dalam penetapan dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja	1. Sampai akhir tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas terus menerus melakukan penyempurnaan indikator kinerja.

Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB	Tindak Lanjut Kementerian PPN/Bappenas
2. Memanfaatkan hasil <i>cascading</i> kinerja untuk menyusun rencana aksi dan ukuran kinerja individu dan mengaitkannya dengan pemberian <i>reward and punishment</i> .	2. Kementerian PPN/Bappenas sedang merumuskan penilaian kinerja mulai dari Eselon I hingga individu.
3. Mengembangkan aplikasi <i>e-performance based budgeting</i> yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga informasi kinerja.	3. Aplikasi <i>e-performance</i> sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran hingga informasi kinerja
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk umpan balik perbaikan penerapan manajemen kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.	4. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyederhanaan terhadap program, yang semula 3 program menjadi 2 program. Hal ini dikarenakan program tersebut bukan merupakan program Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya terus untuk meningkatkan capaian kinerja. Selain capaian kinerja yang teruang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penugasan dalam hal perencanaan pembangunan strategis dari Presiden diantaranya seperti: perencanaan strategis pemindahan Ibu Kota Negara, kebijakan Keuangan Syariah, Inovasi Percepatan Pembangunan Model Perubahan Iklim; serta Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

Terkait mengenai capaian kinerja lainnya melalui penugasan dari Presiden dapat dilihat pada uraian berikut:

3.1.2.5. Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya merupakan kinerja dalam hal penugasan strategis terkait perencanaan pembangunan nasional. Secara keseluruhan, capaian kinerja ini telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Secara rinci kinerja lainnya uraian sebagai berikut:

A. Perencanaan Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara

Penyiapan Pemindahan Ibu Kota Negara telah dilaksanakan secara intensif dan mendalam sejak 2017 hingga 2019. Dimulai dari kajian teknis mengenai alternatif strategi, alternatif lokasi, konsep rancang bangun, kesesuaian dan kemampuan lahan, strategi pembiayaan, dampak ekonomi, lingkungan, hingga kajian sosial budaya yang diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi berbagai kementerian/lembaga. Selain itu, sesuai komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam merencanakan proses perencanaan yang partisipatif, serangkaian dialog nasional telah diselenggarakan di Pusat dan di Daerah dengan melibatkan berbagai *stakeholder* utama seperti pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pemerhati

lingkungan, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga riset, kementerian/lembaga terkait termasuk TNI dan Polri. Pada tanggal 16 Agustus 2019 Presiden telah memohon izin kepada masyarakat Indonesia melalui MPR dan secara resmi mengumumkan calon lokasi pada tanggal 26 Agustus 2019 yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Menindaklanjuti permohonan izin presiden tersebut, untuk menciptakan kajian yang komprehensif Bappenas melakukan beberapa terobosan antara lain melalui penyiapan aspek legal pemindahan Ibu Kota Negara bersama-sama dengan DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait, dengan rincian sebagai berikut: (1) penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara, (2) Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Khusus, (3) Peraturan Presiden mengenai Badan Otorita serta (4) Peraturan Presiden mengenai Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Lokasi Calon Ibu Kota Baru. Terobosan lain yang telah dilakukan ialah bersama KLHK melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan keselarasan pembangunan Ibu Kota Negara dengan strategi pembangunan rendah karbon. Bersamaan dengan itu, Bappenas bekerjasama dengan ATR/BPN dan KLHK melaksanakan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada kawasan ibu kota negara baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan Ibu Kota Negara dan keadilan bagi masyarakat setempat.

Pada tahun 2019 beberapa hal telah dilakukan seperti: (1) penyusunan peta dasar 1:5000; (2) penyusunan FS dan Konsep *Masterplan*; (3) penyusunan Masterplan dengan melibatkan talenta terbaik lokal, nasional dan internasional, sebagai panduan bagi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara baru; (4) penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Negara (IKN) dan RDTR Pusat Pemerintahan dan Pusat Ekonomi; (5) pencadangan tanah untuk akses infrastruktur dan kawasan inti; (6) penyusunan konsep desain IKN dan Urban Design serta RTBL; dan (7) berbagai kerangka regulasi yang diperlukan.

B. Kebijakan keuangan syariah yang terlembagakan dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Untuk menjalankan amanat dan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 Tentang KNKS, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyiapan kelembagaan KNKS. Selain penyiapan kelembagaan KNKS, Kementerian PPN/Bappenas senantiasa melakukan koordinasi pembahasan substansi dengan dewan pengarah KNKS lainnya, yakni Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Agama.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun demikian, industri halal dan keuangan syariah belum mencapai kondisi optimal, yang mana membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh. Menyadari hal itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, dimulai dari penerbitan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) pada tahun 2015.

Ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2016, serta peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) di tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2019, sebagian langkah awal implementasi MAKSI dan MEKSI, KNKS bersama dengan pemangku kepentingan menyusun Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024. Dokumen ini merupakan rujukan atau sebagai dokumen referensi bagi kementerian/Lembaga maupun institusi dalam melaksanakan rencana pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

Secara umum, dokumen rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 mencakup tema strategis, *key performance indicators* (KPI), dan rincian inisiatif strategis yang dituangkan dalam *project charters* pengembangan ekonomi syariah Indonesia meliputi lima bidang strategis: 1) Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, 2) Inovasi Produk, Pendalaman Pasar dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah, 3) Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah, 4) Hubungan Eksternal, Prmosi dan Hukum, 5) Pendidikan dan Riset Ekonomi Bisnis Islam.

Tanggal 26 April 2019 – [Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest)]

KNKS menyelenggarakan acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) bertempat di The Trans Luxury Bandung. Acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan industri halal di Indonesia kepada masyarakat, sekaligus bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup halal. Upaya tersebut juga dilakukan dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah untuk koordinasi, mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka pembangunan.

Tanggal 14 Mei 2019 – [Peluncuran MEKSI]

KNKS meluncurkan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 (MEKSI) sebagai bagian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terutama pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Peluncuran MEKSI dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. MEKSI merupakan rencana induk pengembangan ekonomi syariah yang mencakup seluruh sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MEKSI merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu: (1) penguatan *halal value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI)

sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini; (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama *halal value chain*; serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Bersamaan dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, turut dilaksanakan penandatanganan sejumlah *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai pihak seperti Universitas dan Swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

Tanggal 17 Oktober 2019 – [Indonesia Peringkat 1 dalam GIFR Award]

Indonesia menerima penghargaan sebagai peringkat pertama (1) di dalam Global Islamic Finance Report 2019. Penghargaan ini diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai sekretaris KNKS yang mewakili Presiden RI sebagai ketua KNKS. GIFR 2019 merupakan laporan tahunan perbankan dan keuangan syariah yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2010.

Laporan ini telah diakui sebagai sumber intelijen pasar terotentik untuk industri keuangan syariah global. Laporan ini dipublikasikan oleh *Cambridge Institute of Islamic Finance* (Cambridge-IIF) dan diproduksi oleh Cambridge IFA, sebuah *think thank* global untuk industri perbankan dan keuangan yang berbasis di Inggris.

Tanggal 12 – 16 November 2019 – [Indonesia Sharia Economic Festival ke-6]

KNKS bersama seluruh dewan pengarah turut berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) yang ke-6. ISEF 2019 merupakan *event* ekonomi syariah terbesar di Indonesia yang diselenggarakan tiap tahun. ISEF 2019 memberikan makna dan arti luas dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, international branding karena ISEF 2019 telah menjadi bagian dari agenda ekonomi syariah dunia. Kedua, platform pertemuan dan kesepakatan domestik dan internasional karena dalam ISEF 2019 dihasilkan Deklarasi Jakarta Pembentukan Usaha Induk Bisnis Pesantren secara nasional, branding UMKM ke global, hubungan dan komitmen antar disainer, serta gerakan infak dan wakaf nasional. Ketiga, strategic integrator karena ISEF 2019 telah menjadi wadah silaturahmi strategis antar pelaku usaha seperti pesantren, UMKM, korporasi domestik dan internasional. Keempat, peningkatan literasi dan pengetahuan ekonomi syariah karena ISEF 2019 menjadi forum yang dikenal masyarakat baik domestik dan internasional.

Perhelatan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) 2019 menghasilkan kesepakatan dan transaksi bisnis senilai Rp 22,63 triliun. Capaian tersebut diperoleh sepanjang ISEF 2019 pada 12-16 November 2019 di Jakarta *Convention Center* yang mempertemukan 30 pembeli, 163 penjual, dan 273 peserta pameran.

Komitmen pengembangan usaha diperoleh dari 31 transaksi, total senilai Rp 22,50 triliun yang terjadi antara pesantren dan UMKM dengan korporasi domestik dan global serta perbankan. Komitmen tertinggi terjadi di sektor keuangan senilai Rp 11,27 triliun dan di bidang

infrastruktur senilai Rp10,68 triliun. Kesepakatan temu bisnis (*business matching*) diperoleh dari 161 transaksi total senilai Rp149,30 miliar. Kesepakatan tertinggi berasal dari sektor makanan dan minuman dan sektor agrikultur.

Gelaran ISEF juga menarik minat masyarakat untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi syariah melalui berbagai forum dan kajian ekonomi syariah internasional. Melalui forum 5th *International Islamic Monetary Economics and Finance Conference* (IIMEFC) 2019 telah diterima 250 makalah yang disampaikan oleh 510 penulis yang berasal dari 25 negara.

C. Inovasi Percepatan Pembangunan Model Perubahan Iklim

Sepanjang kurun waktu 2019, berbagai capaian telah dihasilkan ICCTF sebagai upaya mendukung pemerintah. Pelaksanaan program dan kegiatan ICCTF mendapatkan dukungan yang berasal dari rupiah murni APBN serta pendanaan hibah dari UKCCU (*United Kingdom Climate Change Unit*), USAID (*United States Agency for International Development*) dan DANIDA (*Danish International Development Agency*).

Anggaran tersebut di samping digunakan bagi pelaksanaan proyek swakelola di masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan platform Pembangunan Rendah Karbon kepada masyarakat luas, penguatan kelembagaan ICCTF, upaya replikasi dan *scaling-up*, kajian penilaian dampak proyek dan operasional sekretariat ICCTF. Adapun dalam konteks penanganan perubahan iklim di tingkat kebijakan, ICCTF juga melaksanakan berbagai kajian tematik, khususnya dalam lingkup ekosistem gambut yang diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengambil kebijakan. Kajian ini diantaranya adalah:

1. Kajian Pemetaan Gambut Indonesia Menggunakan Satelit Aktif dan Pasif
2. Kajian Valuasi Ekonomi Lahan Gambut
3. Kajian Biodiversitas dan Bioprospeksi Gambut di Indonesia
4. Kajian Validasi Pemetaan Gambut Papua

Selanjutnya, pada tahun ini juga ICCTF mendanai 8 proyek *scaling-up* yang didanai hibah USAID dan 5 proyek dari hibah UKCCU. Secara total, sebanyak 76 proyek telah didanai ICCTF sejak tahun 2010-2019. Sebagai upaya penilaian terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, ICCTF telah melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap dampak intervensi program melalui kajian *impact assessment* terhadap terhadap 47 proyek yang didanai dengan hibah dari USAID dan UKCCU sejak tahun 2016.

Alokasi dana hibah yang diterima ICCTF dari mitra pembangunan disalurkan sesuai dengan perjanjian hibah antara ICCTF dengan mitra pembangunan. Dalam hal ini, dana hibah yang berasal dari UKCCU digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan gambut sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui 3 R, yaitu Revegetasi, *Rewetting* dan Revitalisasi. Lokasi kegiatan untuk hibah UKCCU pun terbatas pada lima provinsi, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sementara hibah dari USAID diperuntukkan

bagi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan aksi mitigasi dan adaptasi. Adapun hibah yang berasal dari DANIDA dialokasikan untuk mendukung pengembangan kapasitas ICCTF, termasuk di antaranya pengembangan kelembagaan, komunikasi dan mobilisasi pendanaan (*resource mobilization*).

Sementara itu, dalam kurun waktu 2010-2019, ICCTF telah memfasilitasi pelaksanaan 76 kegiatan terkait perubahan iklim yang tersebar di 99 lokasi. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam menurunkan emisi sebanyak 9,4 Mton CO₂e atau setara dengan pemenuhan 1% target NDC. Berbagai kegiatan yang dilakukan difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu mitigasi perubahan iklim berbasis lahan, peningkatan adaptasi dan ketahanan iklim, serta pengembangan energi baru terbarukan.

D. Capaian Kementerian PPN/Bappenas dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) merupakan salah satu bentuk kerjasama pembangunan internasional. Pada RPJMN 2015-2019 arah kebijakan di bidang politik luar negeri antara lain “Meningkatkan Peran Indonesia dalam KSST”. Strateginya adalah melalui: (a) Intervensi kebijakan KSST; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi Kementerian/Lembaga (K/L), swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional menginisiasi penyusunan “*Grand Design* Peran BUMN/Swasta dalam Optimalisasi KSST di Indonesia”. *Grand design* memuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk optimalisasi KSST melalui peran BUMN/Swasta. Pada jangka panjang, *grand design* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan KSST untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peran mitra BUMN/Swasta, terutama melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Kementerian PPN/Bappenas berkontribusi aktif dalam inisiasi pembentukan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI). Lembaga dibentuk dalam rangka mewujudkan *one gate policy* kerjasama pembangunan internasional khususnya pelaksanaan pemberian hibah. Dalam struktur LDKPI, Menteri PPN/Kepala Bappenas merupakan bagian dari Dewan Pengarah yang bertugas memberikan arah dan kebijakan serta pengawasan pelaksanaan tugas LDKPI.

Sebagai bentuk pengembangan inovasi kebijakan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan *piloting* kegiatan KSST. Pada tahun 2019, telah dikembangkan model kegiatan di bidang infrastruktur dan farmasi melalui peran aktor non-pemerintah, serta dukungan terhadap penyusunan MoU KSST Indonesia-Suriname di bidang inseminasi buatan ternak. Kegiatan bertujuan untuk mempromosikan produk Indonesia, terutama ke pasar non-tradisional, melalui

pelibatan aktor non-pemerintah. Salah satu hasilnya telah dibuktikan dari KSST Indonesia-Kyrgyzstan di bidang inseminasi buatan ternak yang telah memberikan keuntungan ekonomi berupa ekspor 12.500 dosis semen beku.

KSST di Bidang Infrastruktur: Penyelenggaraan *Strengthening Indonesia - Nigeria Development Cooperation through Reverse Linkage Program: Knowledge Sharing on Road and Bridge Development* bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Kementerian PUPR. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 1-3 Oktober 2019 di Jakarta dan Bandung, serta dihadiri oleh 5 orang perwakilan delegasi Nigeria, perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan PT Wijaya Karya, Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara. *Output* dari kegiatan *knowledge sharing* adalah *joint workplan* kerjasama bidang infrastruktur Indonesia-Nigeria yang berisikan rencana Pemerintah Nigeria untuk memanfaatkan produk dan teknologi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikembangkan Pusjatan. Pola kerjasama ini sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu kerjasama pembangunan internasional diarahkan pencapaian kepentingan nasional, khususnya manfaat ekonomi.

KSST di Bidang Farmasi: Penyelenggaraan *Familiarisation Visit Program Development of a Reverse Linkage Project between Senegal and Indonesia in Vaccine Production* bekerja sama dengan PT Bio Farma. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 2-6 Desember 2019 di Bandung dan dihadiri oleh 5 orang delegasi Senegal yang berasal dari Institut Pasteur dan Lembaga Pendanaan Investasi. *Output* dari kegiatan *knowledge sharing* adalah *joint workplan* yang berisikan rencana Bio Farma sebagai penyedia beberapa produk vaksin dan untuk Republik Senegal. *Joint workplan* yang disepakati akan ditindaklanjuti dengan penyusunan MoU.

Selain itu, KSST merupakan salah satu modalitas dalam pencapaian Tujuan ke-17 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yaitu “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Polugri dan KPI turut mendukung pencapaian target 17.6 dan 17.9.

Target 17.6: meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

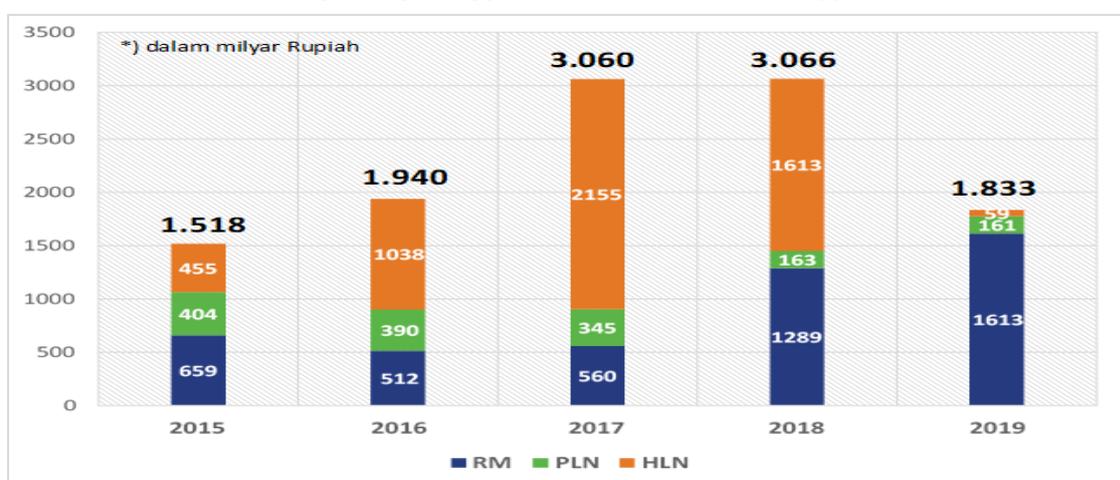
Target 17.9: meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

3.2. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Perkembangan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019

Selama 5 (lima) tahun ke belakang pagu anggaran kementerian PPN/Bappenas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan khususnya pada tahun 2017-2018. Pada Tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.833.959.634.000,-. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2019 kegiatan MCC yang dibiayai oleh Hibah telah berakhir. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

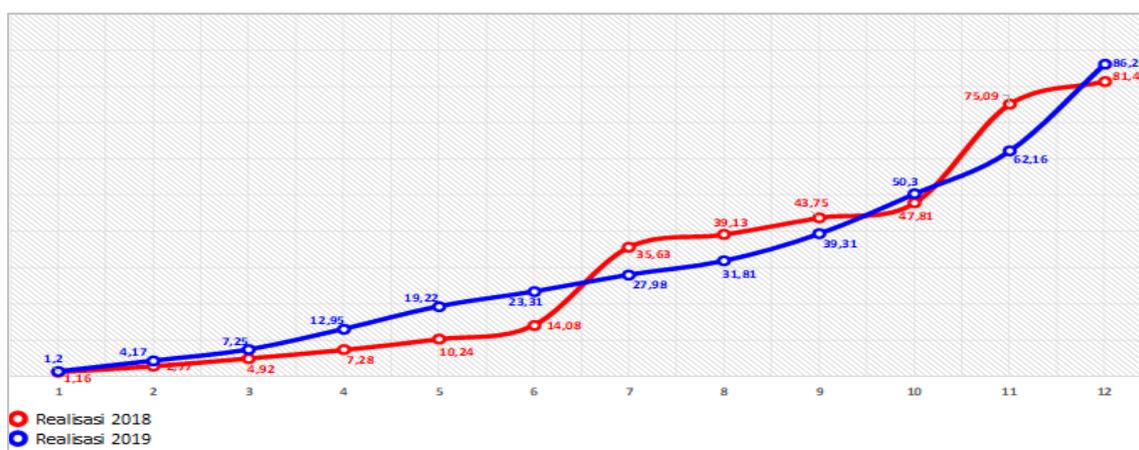
Gambar 3.11. Perkembangan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019



Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas (diolah 2019)

Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2018, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 5%. Realisasi anggaran tahun 2018 (81,42%) lebih rendah dibandingkan tahun 2019 (96,25%) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.12. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 – 2019



Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas (diolah 2019)

Secara rinci perbandingan realisasi per program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12. Pagu dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2018 – 2019**

PROGRAM	PAGU		REALISASI			
	2018	2019	2018	%	2019	%
PROGRAM UTAMA (TEKNIS)						
Perencanaan Pembangunan Nasional	2.180.345,98	943.887,16	2.122.447,21	97,34	835.029,39	88,47
PROGRAM PENDUKUNG (GENERIK)						
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	363.300,92	879.122,48	332.261,10	91,46	736.098,80	83,73
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur	5.350	10.950	5.182,79	96,87	10.602,64	96,83
JUMLAH	3.066.516,90	1.833.959,64	2.492.131,71	81,27	1.581.730,83	86,25

Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas (diolah 2019)

Dari beberapa gambar dan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas ke depan harus terus ditingkatkan. Capaian tersebut sangat berpengaruh besar terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas sehingga realisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pejanjian kinerja dan alokasi anggaran lebih tepat dan terukur pada tahun berikutnya lebih baik.

3.2.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

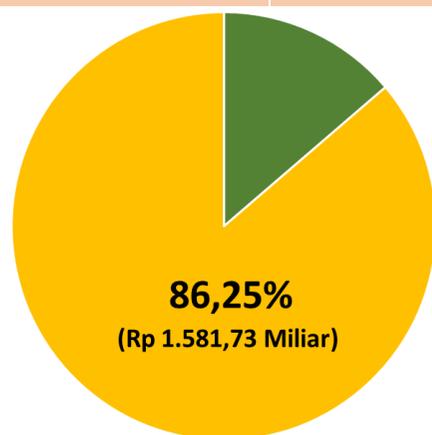
Kementerian PPN/Bappenas pada Tahun 2019 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.833.959.634.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1.579.938.860.000,-, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp. 33.318.680.000,-, PHLN sebesar Rp. 220.702.106.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.581.730.825.019,- (86,25%), yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1.357.560.770.000,- (85,92%), Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp. 29.604.990.000,- (87,23%), dan PHLN sebesar Rp. 195.105.063.408,- (88,40%). Anggaran tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program menurut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

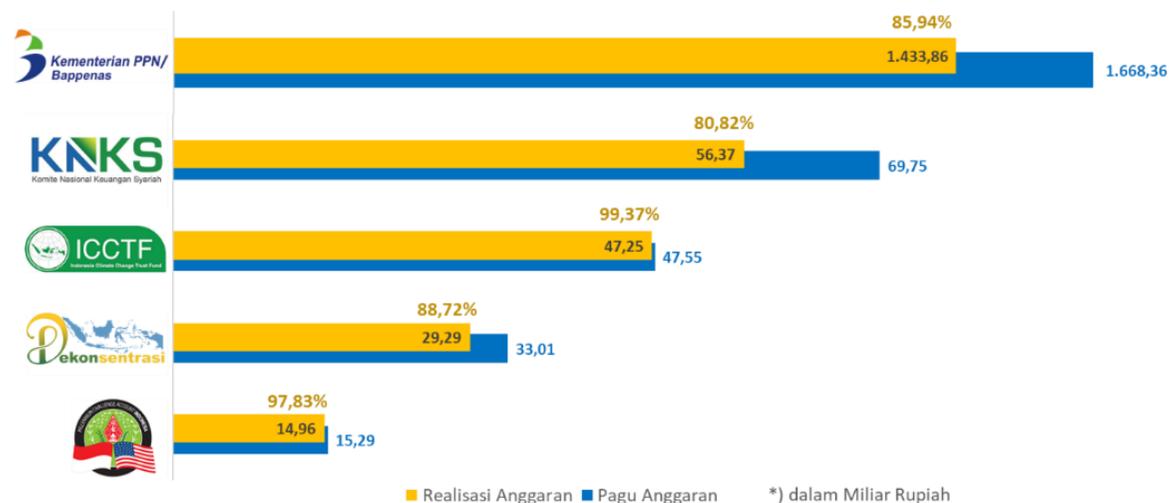
Tabel 3.13. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

PROGRAM	PAGU				REALISASI							
	RM	RMP	PHLN	JUMLAH	RM	%	RMP	%	PHLN	%	JUMLAH	%
PROGRAM UTAMA (TEKNIS)												
Perencanaan Pembangunan Nasional	689.866,38	33.318,68	220.702,10	943.887,16	610.859,33	88,53	29.064,99	87,23	195.105,07	88,4	835.029,39	88,47
PROGRAM PENDUKUNG (GENERIK)												
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	879.122,48	-	-	879.122,48	736.098,80	83,73			-		736.098,80	83,73
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur	10.950	-	-	10.950	10.602,64	96,83			-		10.602,64	96,83
JUMLAH	1.579.938,86	33.318,68	220.702,10	1.833.959,64	1.357.560,77	85,92	29.064,99	87,23	195.105,07	88,40	1.581.730,83	86,25



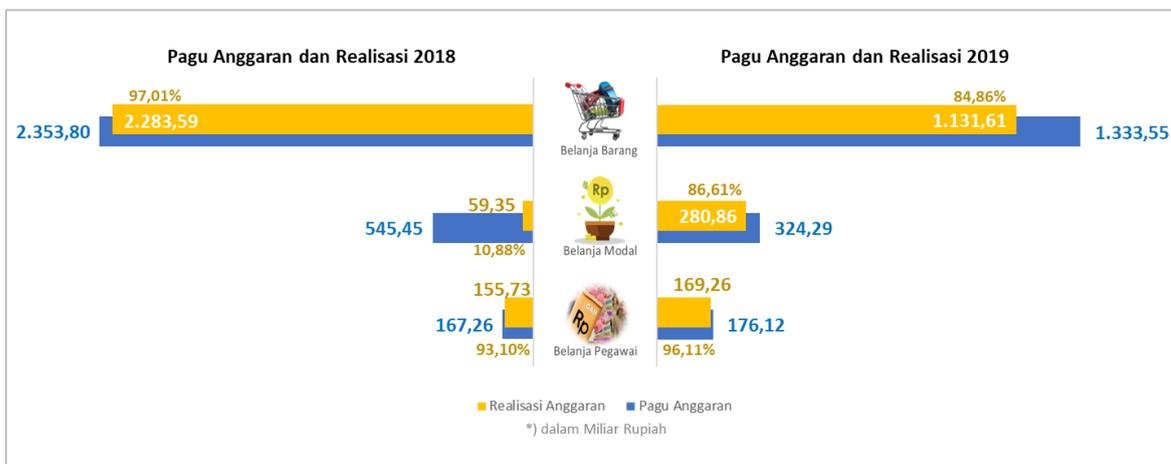
■ Efisiensi ■ Realisasi Anggaran

Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas (diolah 2019)



Sedangkan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan per Jenis Belanja, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.13. Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas (diolah 2019)

Jika dilihat dari jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2019 terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 96,11%, sedangkan realisasi terkecil adalah belanja barang (84,86%). Rendahnya belanja barang dikarenakan adanya beberapa belanja jasa konsultan yang mengalami gagal lelang.

BAB 4

Penutup



PE NUTUP

4.1. SIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015-2019. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Dalam rencana kinerja tahun 2019 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian: (i) sasaran strategis 1 mencapai 100%; dan (ii) sasaran strategis 2 mencapai 100%.

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1: Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
 1. Capaian IKU 1: Keselarasan Perencanaan Pembangunan RKP 2020 melalui IKU “Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah”, tercapai 100% dengan rincian:
 - i. Integrasi “% Keselarasan Muatan RKP dengan Rancangan RPJMN 2020-2024” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan muatan RKP 2020 sesuai dengan sasaran RPJMN 2020-2024.
 - ii. Integrasi “% Keselarasan Muatan Rencana Kerja K/L dengan RKP 2020” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan terhadap muatan Renja K/L yang mendukung sasaran RKP 2019.
 - iii. Sinkronisasi “% Keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2020” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan terhadap muatan (*output* kegiatan) RKA K/L telah dianggarkan sesuai dengan sasaran RKP 2020.
 - iv. Sinergi “% Keselarasan muatan RKP dengan RKPD Provinsi 2020” sebesar 100% dicapai melalui pemetaan capaian muatan RKP 2020 dengan RKPD Provinsi 2020.
 2. Capaian IKU 2: Rancangan Perpres RKP 2020, tercapai 100% dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang RKP Tahun 2020 dan pemutakhiran RKP melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2019.

3. Capaian IKU 3: Capaian Kinerja Pengendalian RKP 2019 melalui IKU “Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L” telah mencapai 90,35% melalui penilaian capaian sasaran PN dan capaian dukungan K/L. Secara umum, kinerja pelaksanaan ke 5 PN dalam RKP 2019 berada pada kategori “Baik”. IKU ini merupakan penajaman atau *bridging* dari IKU 2019 ke Rancangan IKU 2020-2024.
- B. Sasaran Strategis 2: Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih dengan IKU “Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas”, telah tercapai dengan “Baik”. Hal ini tercapai dari perolehan Opini WTP dari BPK dan Nilai RB yang mencapai 82,48 (predikat A) serta Penilaian SAKIP dari Kementerian PAN dan RB mencapai 81,19 (predikat A).

4.2. TINDAK LANJUT

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas ke depannya, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dan kerjasama berkelanjutan dengan *stakeholder* untuk mencapai perencanaan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional.
2. Menyusun rancangan regulasi dan kebijakan *clearing house* dalam mewujudkan perencanaan dan konsistensi penganggaran serta pengendalian rencana pembangunan sesuai target.
3. Merumuskan kebijakan dan tata kelola *evidence-based planning* untuk mendukung Kementerian PPN/Bappenas yang efektif, efisien dan keberlanjutan dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta koordinasi dengan institusi yang memiliki peran dan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan nasional.
5. Menyusun *roadmap* manajemen Jabatan Fungsional untuk meningkatkan penyeteraan peran dan fungsi Jabatan Fungsional dengan Jabatan Struktural.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Rencana Kerja Kegiatan (RKT)

Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

Rencana Kerja Tahun 2019

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019, telah disusun rencana kerja selama 1 tahun sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015-2019 serta memenuhi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang sudah ditetapkan. Berbagai kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang mengutamakan keselarasan untuk menghilangkan silo antarsektoral dilaksanakan oleh seluruh deputi sektoral dan didukung oleh Deputi Pendanaan dan Deputi Evaluasi, serta difasilitasi oleh Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama.

Berikut perencanaan kegiatan selama tahun 2019:

Tabel Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2019

NO	Kegiatan	I	II	III	IV
1	Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja embaga/Daerah				
a	Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)				
	• Kajian	√	√	√	√
	• Koordinasi penyusunan draft RKP 2020	√	√	√	√
	1. Persiapan (penjaman TOR, penyusunan jadwal rapat sesuai siklus perencanaan, pengumpulan materi/bahan RKP, analisis rekomendasi hasil monev dan usulan pemangku kepentingan, dan penyusunan kerangka laporan)	√			
	2. Rapim Tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP 2020	√			
	3. Penyampaian tema, sasaran arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP 2020 kepada Presiden RI	√			
	4. Sidang kabinet rancangan awal RKP 2020	√			
	5. Rapat koordinasi pertama dengan mitra K/L untuk menyiapkan materi RKP	√	√		
	6. Penyusunan rancangan awal RKP berdasarkan RPJMN 2015-2019, rancangan tema dan prioritas RKP, rekomendasi hasil monev, usulan K/L, usulan pemangku kepentingan, dan bahan-bahan lain yang terkait.	√			
	7. Penyusunan usulan untuk rancangan pagu indikatif RKP, berdasarkan rancangan awal RKP	√			
	8. Penyelenggaraan Rakorbangpus I	√			
	9. Rapat koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut Rakorbangpus I	√			
	10. Perbaikan rancangan awal RKP, termasuk alokasi anggaran, berdasarkan Surat Bersama Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif, untuk digunakan dalam pembahasan <i>Trilateral Meeting</i> RKP	√			
	11. Pendampingan Pemda dalam penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	√	√		
	12. Penyelenggaraan forum konsultasi publik		√		
	13. Penyelenggaraan Rakorbangpus II		√		
	14. Penyelenggaraan Pra-Musrenbangnas		√		
	15. Penyelenggaraan Musrenbangnas		√		
	16. <i>Trilateral Meeting</i> RKP		√		
	17. Perbaikan draft RKP berdasarkan Musrenbangnas dan <i>trilateral meeting</i>		√		
	18. Penetapan RKP		√		
	19. Rapat Pembahasan RKP dengan Panja DPR RI		√		

NO	Kegiatan	I	II	III	IV
	• Koordinasi penyusunan draft RPJMN 2020-2024	√	√	√	√
	1. Rapat kerja internal RPJMN 2020-2024	√			
	2. Pembahasan kaidah pelaksanaan, development constraint, PN	√			
	3. Penulisan narasi dan matriks naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024	√			
	4. Diskusi internal K/L terkait rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	√	√		
	5. Integrasi naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan Visi Misi Presiden terpilih		√		
	6. Diskusi Publik terkait rancangan awal RPJMN 2020-2024			√	
	7. Musrenbang RPJMN 2020-2024			√	√
b	Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP				
	• Kegiatan Koordinasi	√	√	√	√
	• Pendampingan K/L dalam penyusunan rancangan Renja K/L	√			
	• Musrenbangnas	√			
	• <i>Trilateral Meeting</i> , yang juga mencakup pembahasan rancangan Renja K/L	√	√		
	• Pendampingan K/L dalam perbaikan Renja K/L 2019 berdasarkan hasil <i>trilateral meeting</i> dan Musrenbangnas untuk menjadi dasar penyusunan RKA-K/L		√		
	• Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra		√		
	• Evaluasi kesesuaian Renja K/L dengan RKP		√		
c	Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP				
	• Kegiatan Koordinasi	√	√	√	√
	• Penyerahan Renja K/L oleh K/L mitra		√		
	• Pendampingan K/L dalam penyusunan RKA-K/L berdasarkan RKP		√	√	√
	• Penyusunan RKA-K/L oleh K/L mitra:		√	√	√
	1. Pagu Anggaran (RKA-K/L)		√		
	2. Penelaahan RKA-K/L I oleh K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan			√	
	3. RAPBN dan Nota Keuangan			√	
	4. Konsultasi dengan DPR			√	
	5. Penetapan APBN				√
	6. Alokasi anggaran K/L (Revisi RKA-K/L)				√
	7. Penelaahan RKA-K/L II oleh K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan				√
	8. DIPA K/L				√
	• Evaluasi kesesuaian RKA-K/L dengan RKP				√
d	Persentase (%) keselarasan muatan RKP dengan RKPD				
	• Temu Triwulanan Bappenas-Bappeda seluruh Indonesia	√	√	√	√
	• Rapat koordinasi teknis K/L dengan pemda	√			
	• Rangkaian musrenbang provinsi	√			
e	Penyelesaian penugasan tertentu				
	• Koordinasi dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	√	√	√	√
	• Pelaksanaan Sekretariat Komite Nasional Keuangan Nasional (KNKS)	√	√	√	√
	• Annual meeting WB-IMF 2019		√		√
	• Annual meeting ADB 2019		√		
2	Rancangan Perpres RKP Tahun 2020				
	• Pengesahan perpres RKP 2020		√		
3	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L				
a	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan				
	• Kegiatan Pemantauan/Evaluasi:	√	√	√	√
	• Rapat koordinasi pemantauan program dan kegiatan terkait sasaran prioritas nasional	√			
	• Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan terkait sasaran prioritas nasional tahun 2019		√	√	√

NO	Kegiatan	I	II	III	IV
	• Analisis hasil pemantauan		√	√	√
	• Rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemantauan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan oleh K/L	√	√	√	√
	• Penyusunan Lampiran Pidato Presiden		√	√	
	• Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan untuk menjadi bahan perencanaan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya			√	√
b	Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup ekonomi yang ditindaklanjuti K/L				
	• Hasil evaluasi pelaksanaan PN disampaikan kepada Deputi PEPP untuk dikompilasi, dianalisis dan dijadikan bahan untuk penyusunan RKP 2020	√	√	√	√
4	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas				
a	Nilai RB				
	• Kick-Off pelaksanaan RB 2019	√			
	• Pertemuan koordinasi dengan tim <i>person-in-charge</i> (PIC) RB dan tim Agen Perubahan	√	√		
	• Monev pelaksanaan RB secara berkala		√		√
	• Inventarisasi dokumen data dukung RB	√	√		
	• Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) melalui diskusi panel asesor yang diketuai oleh Inspektorat Utama sebagai asesor internal Bappenas	√			
	• Input nilai PMPRB secara on-line		√		
	• Pelaksanaan evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB		√		
	• Pelaksanaan survey internal dan survey eksternal untuk menilai kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas			√	
b	Opini BPK				
	• Pembinaan pertanggungjawaban keuangan pada 36 satker Kementerian PPN/Bappenas	√	√	√	√
	• Penyusunan laporan keuangan secara berjenjang dari masing-masing satker sampai Laporan Kementerian dan reviunya	√		√	√
	• Konsultasi kepada regulator	√	√		
	• Pendampingan pemeriksaan BPK	√	√		
	• Pemantauan tindak lanjut	√		√	√
	• Penyediaan layanan konsultasi melalui helpdesk, fasilitasi dan edukasi terkait pelaksanaan anggaran dan kegiatan	√	√	√	√
	• Serangkaian penugasan audit dan reviu dalam rangka menilai sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan	√	√	√	√
c	Skor Evaluasi SAKIP				
	• Penyusunan Laporan Kinerja Tahun				
	1. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019, reviu dan evaluasinya	√			
	2. Penajaman IKU Tahun 2019	√	√	√	√
	3. Monev berkala pelaksanaan kinerja kegiatan 2019 melalui aplikasi <i>e-performance</i>	√	√	√	√
	4. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019	√	√	√	√
	5. Pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB		√	√	
	• Penyusunan IKU 2020-2024				
	Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam rancangan IKU 2020-2024		√	√	√
	• Proses Penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024				
	Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024	√	√	√	√

LAMPIRAN B

- 1. Rencana Kerja (Renja) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019**
- 2. Rencana Kerja (Renja) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020**

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (055) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
B. VISI	: Mewujudkan Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat menghasilkan Rencana Pembangunan Nasional yang berkualitas, Sinergis, dan kredibel demi mencapai tujuan negara yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
C. MISI	: 01 Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional. 02 Merumuskan, menetapkan, menyelaraskan rencana pembangunan nasional (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah) 03 Menyusun dan mengkoordinasikan sistem data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan
D. FUNGSI	: 01 PELAYANAN UMUM

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
	Sasaran Strategis				
01	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas,				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis				
	Persentase (%) rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan	100	100	100	100
	Eselon 1				
05501	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	948.439.846	0	0	0
	Program				
0550106	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	948.439.846	0	0	0
	Sasaran Program				
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel				
	Indikator Sasaran Program				
	% Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100	100	100	100
	Rancangan Perpres RKP	1	1	1	1
	% Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga	100	100	100	100

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
02	Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u>				
	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	100	100	100	100
	<u>Eselon 1</u>				
05501	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	880.250.000	0	0	0
	Program				
0550101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	870.250.000	0	0	0
	Sasaran Program				
	Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih				
	Indikator Sasaran Program				
	Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai RB K/L	80	80	80	80
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Skor Evaluasi AKIP	A	A	A	A
	% penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	100	100	100	100
	Program				
0550103	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	10.000.000	0	0	0
	Sasaran Program				
	Terjaganya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas				
	Indikator Sasaran Program				
	% penyelesaian program kerja pengawasan tahunan (melalui peran Assurance dan Advisory) di Kementerian PPN/Bappenas	100	100	100	100
	% Rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100	100	100	100
	Tingkat persepsi stakeholders inspektorat utama atas pemberian nilai tambah dalam pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
	Tingkat kapabilitas aparat pengawas intern Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik
	% Implemetasi kebijakan dan sistem informasi pengawasan intern	100	100	100	100

F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN)			
		2020	2021	2022	2023
-		0	0	0	0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)			
			2020	2021	2022	2023
		a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBPN	0	0	0	0

Jakarta, 24-07-2019
Menteri PPN/Kepala Bappenas



Bambang Brodjonegoro

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2019**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.06-Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program : 01-Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

Sasaran Strategis : 01-Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.

Output Program : 01-Perencanaan Pembangunan Nasional

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2922-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Background Study RPJMN Bidang Pendidikan dan Agama	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan	1.500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Penyusunan RPJMN Bidang Pendidikan dan Agama	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup Pendidikan dan Agama	610-Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Agama	3.000.000
					611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan dan Agama
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Pengendalian Strategis Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan	-
641-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan dan Agama Berbasis PHLN	-				
2923-Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Alokasi Pendanaan Pembangunan 2018	5.502.600
		602-Sistem Regulasi Perencanaan	056-Pengembangan Sistem/regulasi	560-Pengembangan dan Pemutakhiran Database Alokasi Pendanaan Pembangunan Tahun 2019	456.168
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan pendanaan RKP	570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan RKP Tahun 2020	2.640.513
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan RPJMN	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Evaluasi Lingkup Pendanaan Pembangunan Tahun 2018	1.171.348
		610-Rancangan Perpres RKP	065-Penyusunan Rancangan Perpres RKP	650-Koordinasi Penyusunan Perpres RKP 2020	2.735.050
2925-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Peningkatan Substansi Sinergi Rencana Pembangunan Bidang Aparatur Negara	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Aparatur Negara	1.500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI	
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Aparatur Negara	610-Evaluasi Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2018	350.000	
			061-Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Aparatur Negara	611-Monitoring dan Evaluasi Kerangka Kelembagaan Tahun 2018	325.000	
			061-Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Aparatur Negara	612-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	400.000	
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Pengendalian Pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Aparatur Negara	400.000	
			064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	641-Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Open Government Indonesia/OGI)	500.000	
2926-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	052-Policy paper	520-Kajian (Policy paper) Pengembangan Kebijakan Smart City, khususnya terkait komponen Smart Mobility	400.000	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika	700.000	
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional jangka Menengah 2020-2024	700.000	
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	610-Monitoring Pembangunan Pembangkit 35.000 MW dan Pembangunan Jaringan Palapa Ring Timur	650.000	
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Strategis Perencanaan Program Listrik Kepulauan	611-Evaluasi Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil dan Pelaksanaan Program Akses TIK di daerah nonkomersil	650.000
					641-Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2	650.000
					642-Koordinasi Strategis Belt Road Initiative terkait Sektor Energi, Telekomunikasi dan Informatika	550.000
					643-Koordinasi Strategis Perencanaan PSN Lingkup Kedeputan Sarana dan Prasarana	550.000
					644-Koordinasi Strategis Perencanaan ASEAN Connectivity terkait Sektor Energi, Telekomunikasi dan	500.000
					645-Koordinasi Sekretariat Dewan TIK Nasional TA 2019	7.000.000
2927-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan	620-Evaluasi Pembangunan Daerah	9.000.000	
				621-Pemantauan RPJMN 2015-2019	2.000.000	
				622-Pemantauan RKP di Daerah	1.000.000	
				623-Penghargaan Pembangunan Daerah	10.000.000	
				624-Desk Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat	-	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI		
2928-Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan	620-Evaluasi RPJMN 2015-2019	20.000.000		
				621-Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	1.630.000		
				622-Evaluasi Tematik Bidang Pembangunan Polhukhankam	750.000		
				623-Evaluasi Tematik Bidang Pembangunan Ekonomi	750.000		
				624-Evaluasi Tematik Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	750.000		
				625-Evaluasi Pelaksanaan RKP	1.750.000		
				626-Pelaksanaan Quality Assurance Dalam Penyusunan RKP 2020	600.000		
				627-Penyusunan Lampiran Pidato Presiden	270.000		
				608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan pembangunan	640-Pemanfaatan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembangunan Nasional	-
2929-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Finalisasi Rackground Study RPJMN 2020-2024	1.500.000		
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2020 Bidang Hukum dan Regulasi	300.000
						571-Penelahaan Renja dan RKA Mitra K/L Bidang Hukum dan Regulasi	100.000
				604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN Periode 2020-2024 Bidang Hukum dan Regulasi	300.000
						571-Penelahaan Renstra Mitra KL Bidang Hukum dan Regulasi	100.000
				605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup Hukum dan Regulasi	610-Pengendalian dan Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Tahun 2019 Bidang Hukum dan Regulasi	165.525
						611-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 Bidang Lingkup	346.784
						612-Penyusunan Indeks rebangunan Hukum (IFI-1) Talrnn 2018	800.000
						613-Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Direktorat	250.000
						608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
				641-Kordinasi Implementasi SDG's Goal 16	100.000		
				642-Koordinasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri	130.000		
				643-Dukungan Pelaksanaan Kebijaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TA 2019	485.038		
				644-Koordinasi Arah Kebijakan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Nasional Tahun 2019	200.000		
				645-Koordinasi Implementasi SDG's Goal 16	-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2930-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	800.000
			052-Policy Paper	520-Policy Paper Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2020 Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	600.000
				571-Koordinasi Penyusunan Kebijakan DAK 2020 Bidang IKM dan Pariwisata	300.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	450.000
				611-Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	450.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan pembangunan	640-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Industri dan Pariwisata	300.000
				641-Koordinasi Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	1.000.000
		2931-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian
603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP				570-Koordinasi penyusunan RKP
604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	064-Koordinasi penyusunan RPJMN			640-Koordinasi Penyusunan RKP 2019 dan RPJMN 2020-2024	1.863.053
605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi			610-Evaluasi pencapaian target keuangan inklusif	942.440
				611-Pemantauan PHLN di bidang pemerataan dan pertumbuhan ekonomi	675.182
				612-Pemantauan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah Indonesia	426.005
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan pembangunan			640-Koordinasi strategis pendalaman pasar keuangan di Indonesia	1.049.414
				641-Koordinasi penguatan manajemen/tata kelola internal	-
				642-Sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah	75.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2932-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Daerah Tertinggal, Desa dan	1.800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2020 Lingkup Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 Lingkup Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,	1.200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2019 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	500.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2018 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	850.000
				641-Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan	850.000
				642-Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan	850.000
				643-Koordinasi Strategis Pengelolaan Pendanaan Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana dalam	400.000
				644-Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana	500.000
2933-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Background Study RPJMN Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan (Lanjutan)	-
				511-Kajian Kebijakan dan Strategi Hak-hak Kebudayaan dan Konteks Pembangunan	700.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	610-Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan	650.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	650.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan yang Bersumber Dari Pendanaan Alternatif (PHLN, SBSN, KPBU)	700.000
				641-Koordinasi Penyusunan Peraturan Badan Layanan Umum Untuk Lembaga Riset, dan Lembaga Pendanaan Inovasi	600.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2934-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Dampak Efektivitas Program Reforma Agraria Bidang Kehutanan dalam Peningkatan	700.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2020 bidang Kehutanan	950.000
			057-Koordinasi penyusunan RKP	571-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Sub Bidang Kehutanan	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan RKP Tahun 2019 Bidang Kehutanan	450.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2018 Bidang Kehutanan	500.000
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Proyek PHLN Tahun 2019 untuk Percepatan Pembangunan Bidang Kehutanan	550.000		
		641-Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals	6.900.000		
2935-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategi Pembangunan Perikanan Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Maritim	1.300.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan RKP lingkup Kelautan dan Perikanan	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Skenario Pembangunan Kelautan dan Perikanan: Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024	2.000.000
				571-Skenario Pembangunan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Air: Penyusunan Naskah Teknokratik	1.750.000
				572-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024	8.500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan RKP tahun berjalan lingkup Kelautan dan Perikanan	800.000
				611-Evaluasi RPJMN 2015-2019 lingkup Kelautan dan Perikanan	800.000
				612-Pengembangan database pembangunan kelautan dan perikanan	600.000
				613-Koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi DAK bidang Kelautan dan Perikanan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Reformasi Birokrasi Sektor Kelautan dan Perikanan	-
				641-Koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor Kemaritiman dan SDA	750.000
642-Koordinasi kegiatan PHLN bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.500.000				

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2936-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020	1.400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	1.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	1.626.300
				611-Evaluasi Terpadu Program dan Kegiatan Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	870.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Tahun Pelaksanaan 2019	600.000
641-Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan	1.850.000				
2937-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian penguatan pemerataan pelayanan kesehatan	1.100.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan RKP lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan RPJMN lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	1.200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Koordinasi strategis gerakan dan percepatan perbaikan gizi	1.000.000
				641-Koordinasi gerakan masyarakat hidup sehat	900.000
				642-Koordinasi strategis pengelolaan program kerjasama RI-Unicef 2016-2020	400.000
2938-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Potensi Penerimaan Pajak	1.300.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Tahun 2020 Bidang Keuangan	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 Lingkup	1.200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Keuangan Negara	450.000
				611-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Moneter	300.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Keuangan Negara dan Moneter	300.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2939-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Manajemen Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan RKP bidang Lingkungan Hidup	700.000
			057-Koordinasi penyusunan RKP	571-KOORDINASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMN 2020-2024	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	350.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup	500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan pembangunan	640-Koordinasi Pelaksanaan Hibah Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hayati, Iklim, dan Cuaca	500.000
				641-Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	500.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan DAK bidang Lingkungan Hidup	1.000.000
				643-Koordinasi Pelaksanaan SDG's (Goal 12 dan 13)	200.000
644-Dukungan Satker ICCTF	18.800.000				
645-Coremap WB dan ADB	200.000				
2940-Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Collaborative Governance untuk Pelayanan Publik	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2020	650.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024	1.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Monitoring RKP 2019	350.000
				611-Evaluasi RKP 2018	400.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan pembangunan	640-Koordinasi Strategis Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.900.000
				641-Koordinasi Strategis Strandar Pelayanan Minimum (SPM)	800.000
				642-Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN)	800.000
2941-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Roadmap Pengamanan Produksi Padi Nasional Jangka Panjang	4.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan RKP dan DAK	2.500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan RPJMN	1.500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan kinerja ekspor impor produk pertanian pasca AEC 2015	1.000.000
				611-Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2015-2019	1.000.000
				612-Koordinasi PHLN bidang pangan dan pertanian	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Kajian Pengembangan dan Operasionalisasi Sistem Pemodelan Pembangunan Pangan dan Pertanian	-
				641-Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Internal Direktorat Pangan dan Pertanian	-
2942-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian penyusunan kebijakan lingkup pengembangan UKM dan Koperasi	806.060
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka pendek	930.900
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Program dan Kegiatan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	702.540
				611-Evaluasi Perencanaan Peningkatan Kapasitas UMKM dan Koperasi	799.600
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Koordinasi percepatan pembangunan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	705.900
2943-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Peta Jalan Bantuan Sosial Tahun 2020-2024	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan RKP	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Finalisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	500.000
				571-Koordinasi Penyusunan Renstra K/L dengan RPJMN Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Perkembangan Integrasi Program Bantuan Sosial di Indonesia	600.000
				611-Evaluasi Efektivitas Layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dalam Penanggulangan	500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Koordinasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1.000.000
2944-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategi Implementasi Pendanaan Luar Negeri Bilateral dalam Memobilisasi Tambahan	550.000
			055-Rancangan Pendanaan	550-Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	900.000
			055-Rancangan Pendanaan	551-Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktifitas Pengembangan	2.000.000
			055-Rancangan Pendanaan	552-Koordinasi Peningkatan Kesiapan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	580.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Pemantauan Proyek-Proyek Yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bilateral	800.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pinjaman Luar Negeri Bilateral Jangka Menengah (2015-2019)	350.000
2945-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Strategi Kerjasama Luar Negeri Multilateral	1.545.931
			052-Rancang Pendanaan	520-Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Multilateral	1.355.309
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral	660.760
				611-Pemantauan Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral	400.000
				612-Review Peningkatan Kesiapan Kegiatan yang didanai Pinjaman Luar Negeri Multilateral	-
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	001-Tanpa Sub Output		-		
2947-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Bidang Air Baku dan Penanggulangan Banjir	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 Bidang Sumber Daya Air	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi lingkup Pengairan dan Irigasi	610-Pemantauan dan Evaluasi terhadap dampak dari kegiatan Dam Operational Improvement and Safety	4.974.436
				611-Flood Management in Selected River Basin	5.157.551
				612-Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Irigasi (IPDMIP)	4.000.000
				613-Komering Irrigation Project (Phase III)	1.461.750
				614-Rentang Irrigation Modernization Proiect (RIMP)	1.483.200
				615-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Irigasi Air	500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Strategis Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air	940.000
				641-Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air	1.100.000
				642-Koordinasi Strategis Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara	5.469.230
				643-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Pembangunan Citarum Harum	2.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI	
2948-Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	01-Tersunnya Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	054-Rancang bangun	540-Penyusunan Toolkit Pra Studi Kelayakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	1.200.000	
				541-Kajian Penyusunan Dokumen Standar Proyek KPBU	1.100.000	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	057-Koordinasi penyusunan RKP	5.100.000	
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Background Study Penyusunan RPJMN 2020-2024	1.000.000	
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPBU	800.000	
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Strategis Fasilitasi Skema Penilaian Kelayakan Proyek KPBU	3.100.000	
					641-Koordinasi Strategis Fasilitasi Pemerintah Dalam PINA	10.000.000
					642-Koordinasi Strategis Screening Proyek dan Penyusunan PPP Book	2.100.000
					643-Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Konektivitas	8.500.000
					644-Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Perkotaan	8.500.000
					645-Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Layanan Dasar	8.600.000
646-Koordinasi Strategis Kantor Bersama KPBU	-					
2949-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	01-Tersunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Kawasan	1.000.000	
			051-Kajian	511-Pengembangan Model Pembangunan Wilayah	1.500.000	
		602-Sistem/regulasi perencanaan	056-Pengembangan sistem/regulasi perencanaan	560-Pengembangan WebGIS Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik RKP 2020	550.000	
				561-Pengembangan Sistem Aplikasi Penyusunan RKP 2020	1.050.000	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan	800.000	
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057- Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024	1.000.000	
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Kebijakan	800.000	
				611-Temu Konsultasi Triwulanan, Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia	600.000	
		608-Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan	640-Harmonisasi Penyelarasan Perencanaan Tahunan Daerah RKPd dengan Perencanaan Pusat RKP	500.000	
		609-Rancangan Perpres RKP	065-Penyusunan Rancangan Perpres RKP	650-Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial dalam Mendukung Dalam Rangka	1.100.000	
				651-Pengembangan RKP On Map Berbasis Spasial Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan	7.000.000	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2950-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019 lingkup bidang	981.625
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2025 bidang	1.478.666
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Monitoring dan evaluasi lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi	459.346
				611-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK bidang perdagangan	436.588
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan pembangunan	640-Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas Sebagai Focal Point Indonesia untuk The	1.672.556
641-Koordinasi Terhadap Implementasi Hasil Perundingan Negotiating Group on Economic	1.471.219				
2951-Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Perencanaan Pendanaan Pembangunan	523.608
				511-Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1.524.726
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Pemantauan Perencanaan Pendanaan Pembangunan	674.453
				611-Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	677.700
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan	640-Koordinasi Strategis G-20 Working Group on Development	-		
2952-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	01-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Prakarsa Strategis Penghitungan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Sosialisasi Roadmap	1.050.000
			051-Kajian	511-Kajian Strategis Analisis Defisit Sektor Jasa dalam Neraca Pembayaran dan Dampaknya terhadap	900.000
			053-Modelling	530-Model Outlook Makro Ekonomi Indonesia	1.250.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	057-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	750.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	1.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Persiapan Sensus Penduduk 2020	600.000
				611-Evaluasi Pemanfaatan data SUTAS (Survei Pertanian Antar Sensus)	600.000
				612-Reformasi Birokrasi di Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	400.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Forum Masyarakat Statistik (FMS)	1.250.000
609-Rancangan Perpres RKP	065-Penyusunan Rancangan Perpres	650-Koordinasi Penyusunan Rancangan Perpres RKP	400.000		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2953-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Perkotaan, Perumahan, dan	750.000
				511-Profilng Kata Berkelanjutan dengan Menggunakan Indeks Kata Berkelanjutan	400.000
			052-Policy paper	520-Penyusunan Policy Paper Metropolitan Statistical Area	300.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Multipihak Penyusunan RKP, Renja dan RKA K/L tahun 2020 Lingkup Perkotaan, Perumahan	700.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Multipihak Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/ L Lingkup Perkotaan, Perumahan,	700.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup	610-Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman 2015-2019	700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Kelompok Kerja Perumahan, Air Minum, Sanitasi dan Kawasan Permukiman	2.550.000
			064-Pengendalian Pelaksanaan	641-Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional	1.150.000
064-Pengendalian Pelaksanaan	642-Pendampingan Teknis Kegiatan Hibah dan Pinjaman		550.000		
064-Pengendalian Pelaksanaan	643-National Slum Upgrading Project (NSUP)		4.750.000		
2954-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sistem Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan	750.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Program-Program Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	962.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Program-Program Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Kependudukan dan	400.000
			057-Koordinasi penyusunan RPJMN	571-Koordinasi Rencana Strategis Isu Kependudukan dan Perlindungan Sosial	400.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan	500.000
				611-Evaluasi Perluasan Cakupan Jaminan Sosial Sektor Informal	675.825
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Koordinasi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	962.000		
2956-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Penyusunan RKP Tahun 2020 bidang Pertahanan dan Keamanan	750.000
				571-Koordinasi Penyusunan Kegiatan PLN dan PDN ALutsista dan Almatus	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.250.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup Pertahanan dan Keamanan	610-Pemantauan RKP Tahun 2019 Bidang Pertahanan dan Keamanan	700.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2018 Bidang Hankam	500.000
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Kajian Akselerasi Pembangunan Keamanan Nasional 2020-2024	550.000		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2957-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Peran Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia	600.000
				511-Studi Perbandingan Demokrasi Ekonomi	600.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi penyusunan RKP 2020	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan RPJMN 2020-2024	600.000
				571-Penelaahan Renstra Mitra KL Bidang Politik Komunikasi	400.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi Lingkup Politik dan Komunikasi	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 Bidang Politik dan	600.000
				611-Review Pelaksanaan Sinergitas antar K/L Pada Program Penanggulangan Terorisme	500.000
				612-Review Penanganan Konflik Sosial (Sinkronisasi dan Integrasi)	550.000
				613-Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal Direktorat Politik dan Komunikasi Tahun 2019	200.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	643-Koordinasi Strategis Penguatan demokrasi Indonesia	800.000
2958-Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	01-Tersusunnya Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan	620-Pemantauan Program/Kegiatan Pembangunan Nasional Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan	4.565.000
				621-Evaluasi Program/Kegiatan Strategis Pembangunan Nasional	4.550.000
		607-Sistem/Regulasi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional	063-Koordinasi penyusunan sistem/regulasi pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional	630-Koordinasi Pendukung Program e-Monev	4.385.000
				631-Pengembangan Integrasi Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	-
				632-Koordinasi Penguatan Backbone Sistem Teknologi Informasi	5.800.000
2959-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian perencanaan terintegrasi sektor energi dan sektor transportasi	1.500.000
				603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-"Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	1.400.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Pelaksanaan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	750.000
				611-Evaluasi Sasaran Pencapaian Prioritas Nasional Ketahanan Energi RPJMN 2015-2019	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi strategis pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau	600.000
				641-Percepatan pembangunan energi baru dan terbarukan	600.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2960-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pemantapan dan Replikasi Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Data Spasial	600.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan	950.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 lingkup Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Informasi	1.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Reforma Agraria dan Informasi	850.000
		608-Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional	1.400.000
2961-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Inovasi Penciptaan Kesempatan Kerja Melalui Keterpaduan Lembaga Diklat dengan Industri	2.200.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 Bidang Ketenagakerjaan	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	350.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	450.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan	640-Evaluasi Pelaksanaan Penerapan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	400.000
2962-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	051-Kajian	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	057-Koordinasi penyusunan RKP 2020	1.950.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	2.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi lingkup	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2019 terkait lingkup Transportasi	1.850.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional	1.200.000
				641-Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar	3.020.000
				642-Koordinasi Strategis DAK Transportasi	4.100.000
643-Koordinasi Strategis Perencanaan Konektivitas ASEAN	1.380.000				
5203-Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	01-Terlaksananya Pengelolaan Hibah MCC	608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian pelaksanaan	640-Sekretariat Satker Pengelolaan Hibah MCC	7.500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
5215-Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Penyusunan Indeks Kebijakan Luar Negeri Indonesia	300.000
			052-Policy paper	520-Policy Paper Bidang Kerjasama Pembangunan Global Review Komitmen Indonesia Dalam G20 Bidang	135.300
				521-Policy Paper Bidang Politik Luar Negeri Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Radikalisme dan	199.000
				522-Policy Paper Bidang Kerjasama Regional Pemanfaatan Data Market Intelligence Kementerian	130.700
			053-Model	530-Knowledge Sharing Kegiatan Reverse Linkage Islamic Development Bank (IDB) Dalam Rangka KSST	-
		531-Knowledge Sharing Bidang Farmasi sebagai Implementasi Peningkatan Kualitas Kerjasama Global		-	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP	570-Penyusunan RKP Bidang Polugri dan KPI	200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Polugri dan KPI	765.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan evaluasi lingkup Politik	610-Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik Luar	335.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Koordinasi Pelibatan Indonesia Dalam Forum Kerjasama Pembangunan Internasional	961.657
				641-Koordinasi Pelaksanaan Bidang Politik Luar Negeri	200.000
				642-Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	200.000
				643-Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional	460.000
				644-Koordinasi Kerjasama Selatan-Sekatan dan Triangular Bidang Infrastruktur	810.000
645-Koordinasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Farmasi Sebagai Implementasi	845.000				
5216-Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Analisis Penyusunan Renja K/L	555.000
			602-Sistem/Regulasi Perencanaan	602-Sistem/Regulasi Perencanaan	560-Pengembangan Sistem Informasi KRISNA
		561-Pengembangan Sistem/Regulasi Perencanaan Pembangunan		1.300.000	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Koordinasi penyusunan RKP dan	570-Koordinasi penyusunan RKP dan Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L	1.300.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Koordinasi penyusunan RPJMN	570-Koordinasi penyusunan RPJMN	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Pemantauan dan Evaluasi	610-Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1.500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Sistem	640-Pengendalian Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	300.470

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI		
5217-Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	01-Tersusunnya Analisis Kebijakan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Penyusunan Analisis Kebijakan	1.800.000		
				511-Koordinasi Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan	1.000.000		
				512-Koordinasi Analisis Kinerja	700.000		
5246-Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Analisa Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan Global	382.382		
				511-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur	700.000		
				512-Penyusunan Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah	700.720		
				513-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1.000.000		
				514-Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Mendukung Implementasi Integrasi Perencanaan dan	700.000		
				515-Koordinasi Strategis Simplifikasi Regulasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi	1.500.000		
				516-Monitoring Pelaksanaan Simplifikasi Regulasi Tahun 2019	1.000.000		
				517-Forum Konsultasi Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan RKP	1.000.000		
				518-Analisa Pola Konsumsi Masyarakat	444.922		
				519-Lembaga Pembina Pendampingan Pembangunan	10.000.000		
				520-Penyempurnaan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	422.696		
				608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	640-Kegiatan Dekonsentrasi	32.368.712
						641-Kajian/Model Inovatif Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Perencanaan	85.976.807
609-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024	601-Tanpa Sub Output	069-Koordinasi penyusunan RPJMN	-				
5847-Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	01-Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	610-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	066-Koordinasi Penyelenggaraan	660-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Gelar	148.666.330		
			067-Koordinasi Penyelenggaraan	670-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Non Gelar	41.652.467		
			068-Koordinasi Pembinaan	680-Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan JFP	21.206.565		
			069-Fasilitasi Pembinaan dan Diklat	690- Kegiatan Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi	34.996.424		

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2019**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

Sasaran Program : 01-Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

Sasaran Strategis : 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

Output Program : 01-Layanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2911-Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	01-Tersusunnya Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	112-Tanpa Sub Output	112-Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	4.415.912
				115-Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-
		959-Layanan Protokoler	001-Tanpa Sub Output	113-Ketatausahaan dan persidangan pimpinan	-
				114-Protokoler lembaga	8.484.088
2912-Pembinaan dan Pelayanan Hukum	01-Tersusunnya Pembinaan dan Pelayanan Hukum	957-Layanan Hukum	091-Produk Hukum	091-Produk Hukum	2.400.000
				092-Bantuan Hukum	600.000
2913-Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	01-Tersusunnya Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	952-Layanan Perencanaan	110-Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	110-Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1.250.000
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	001-Tanpa Sub Output	111-Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas	1.250.000
		960-Layanan Manajemen Organisasi	001-Tanpa Sub Output	107-Evaluasi Organisasi	1.250.000
				108-Koordinasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	-
		960-Layanan Manajemen Organisasi	001-Tanpa Sub Output	109-Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tata Laksana	-
964-Layanan Kerjasama Internasional	001-Tanpa Sub Output	106-Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan	1.250.000		
2914-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	01-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	001-Tanpa Sub Output	093-Koordinasi Pengelolaan SDM	3.750.000
				094-Koordinasi Pengembangan SDM	13.800.000
				095-Koordinasi Kinerja Pegawai	1.950.000
				096-Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	2.200.000
2915-Pelayanan Umum dan Keuangan	01-Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Keuangan	955-Layanan Manajemen Keuangan	001-Tanpa Sub Output	102-Penerapan SAI	1.087.751
				103-Pelayanan Administrasi Satker	26.210.760
				104-Pelayanan Pengujian Pembayaran	3.752.565
		956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	001-Tanpa Sub Output	098-Pengelolaan BMN	4.548.240
				099-Pencatatan BMN	2.072.731
		962-Layanan Umum	001-Tanpa Sub Output	100-Pelayanan Dukungan Umum dan Perkantoran	12.838.300
				101-Pelayanan Perencanaan Fasilitas Umum Perkantoran dan Pengadaan	37.108.253
				994-Layanan Perkantoran	001-Tanpa Sub Output
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80.294.338

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2916-Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	01-Tersusunnya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	963-Layanan Data dan Informasi	001-Tanpa Sub Output	116-Dukungan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.951.000
				117-Pengelolaan Data dan TI	4.994.000
				119-Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	1.200.000
				120-pengembangan kapasitas TI	1.465.000
2918-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	01-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	001-Tanpa Sub Output	051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	99.000.000
2946-Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	01-Tersusunnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Tanpa Sub Output	051-Pengadaan kendaraan bermotor	-
				052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	125.000.000
				053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	61.572.337
				054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	188.427.663

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2019**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program : 01-Terjaganya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis : 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

Output Program : 01-Layanan Pengawasan Internal kementerian PPN/Bappenas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2920-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	01-Tersusunnya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	700.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	500.000
				301-Pelaksanaan Pengawasan (Audit, Evaluasi, dan Reviu)	-
				303-Pemantauan tindaklanjut laporan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	-
				304-Pendampingan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan peningkatan kapasitas APIP	-
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	900.000
003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	5.950.000			
2921-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	01-Tersusunnya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	1.200.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	150.000
				301-Pelaksanaan pengawasan (audit, evaluasi dan reviu)	-
				302-Koordinasi dan monitoring penilaian RB	-
				303-Pendampingan Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas Peningkatan Kapasitas APIP	-
			304-Pemantauan Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	-	
002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	250.000			
003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	600.000			

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2020**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.06-Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program : 01-Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel

Sasaran Strategis : 01-Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.

Output Program : 01-Perencanaan Pembangunan Nasional

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2922-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Percepatan Penerapan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama Tahun 2020a	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP Bidang Pendidikan dan Agama Tahun 2020	1.250.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-Koordinasi Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan K/L dan RPJMD Bidang Pendidikan dan Agama	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan		610-Pemantauan Terpadu Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Agama	750.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Dan Agama	750.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan		640-Pengendalian Strategis Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan	750.000
				641-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Dan Agama Berbasis Bantuan Pinjaman Dan Hibah	750.000
2923-Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2020 untuk	4.572.898
				511-Koordinasi Penyusunan Kebijakan Alokasi Pada Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	357.992
		602-Sistem Regulasi Perencanaan	056-Tanpa Sub Output		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek		570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2020	2.085.452
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah		570-KOORDINASI Penyusunan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (PERPRES RKP) Tahun 2021	2.746.212
				571-Kajian penajaman major project rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)	648.440
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan		610-Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Evaluasi Lingkup Pendanaan Pembangunan Tahun 2020	905.882
		608-Kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan		640-Pengembangan dan pemutakhiran database dalam rangka penyusunan pagu indikatif tahun 2021	483.124
610-Rancangan Perpres RKP			-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2925-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Skenario Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Aspek Aparatur Negara (ASN)	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP lingkup Aparatur Negara	702.500
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Finalisasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Aparatur	100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Prioritas Pembangunan Aparatur Negara Tahun 2020	725.000
				611-Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Aparatur Negara tahun 2019	500.000
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Koordinasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (OGI)	1.000.000		
2926-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	052-Tanpa Sub Output	510-Kajian Integrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) Intermitten ke dalam Grid	650.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	571-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 Lingkup Energi Telekomunikasi dan Informatika	1.050.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Integrasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi RPJMN 2020-2024 dalam lingkup Sektor Energi, Telekomunikasi dan Informatika	850.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 2019 Lingkup energi, Telekomunikasi dan Informatika	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Monev Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (RISPE)	650.000
				641-Koordinasi Strategis Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagalistrikan Nasional	650.000
				642-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital	650.000
643-Koordinasi Sekretariat Dewan Tik Nasional TA 2020	7.500.000				
2927-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Evaluasi Pembangunan Daerah	6.000.000
			621-Pemantauan Pembangunan di Daerah	1.000.000	
			622-Koordinasi Pembangunan	1.000.000	
			623-Penghargaan Pembangunan Daerah	7.000.000	
2928-Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	01-Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka P	057- Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Bidang Pengendalian Pembangunan	1.202.950
		606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Pemantauan Pembangunan Sektoral	2.573.007
				621-Evaluasi Tematik Pembangunan Sektoral	2.436.824
				622-Evaluasi Pelaksanaan RKP	1.963.839
				623-Penyusunan Lampiran Pidato Presiden 2020	823.380
608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pema	064-Tanpa Sub Output	640-Pemanfaatan Jasa Konsultan dalam Mendukung Pembangunan Nasional	-		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2929-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Penyusunan Kerangka Kelembagaan dalam rangka Pembangunan Hukum dan Peradilan	474.076
			052-Policy Paper	520-Penyusunan Policy Paper Optimalisasi Penerapan Alternatif Pemidanaan di Indonesia	450.921
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2021 Bidang Hukum dan Regulasi	537.090
				571-Penelahaan Renja dan RKA Mitra K/L Bidang Hukum dan Regulasi	20.700
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Pelaksanaan RPJMN Periode 2020-2024 Bidang Hukum dan Regulasi	200.495
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Tahun 2020 Bidang Lingkup Hukum dan Regulasi	179.350
				611-Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Bidang Lingkup Hukum dan Regulasi	498.270
				612-Pengembangan Penyusunan Indeks pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2019	515.436
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kordinasi Implementasi SDG's Goal 16	70.840
				642-Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Hibah Luar Negeri	153.360
				643-Dukungan Pelaksanaan Kebijaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TA 2020	497.224
				644-Koordinasi Arah Kebijakan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Nasional Tahun 2020	223.838

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2930-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	900.000
			052-Policy Paper	520-Policy Paper Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2020 Sektor Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	600.000
				571-Koordinasi Penyusunan Kebijakan DAK 2020 Bidang IKM dan Pariwisata	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Singkronisasi RPJMN 2020-2024 Bidang Industri,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.000
				611-Evaluasi Bidang Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Industri dan Pariwisata	400.000
				641-koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan	700.000
				642-Pengembangan Strategis Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	400.000
643-Koordinasi Strategis Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	700.000				
2931-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	051-Kajian Jasa Keuangan Syariah	710.858
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP tahun 2021	627.365
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi RPJMN 2020-2024	471.685
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Evaluasi PHLN di Bidang Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Anggaran 2020	598.696
				611-Pemantauan Sumber Pembiayaan Jangka Panjang	583.647
				612-Pemantauan Digitalisasi Jasa Keuangan	507.749
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kesekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah	38.200.000
				642-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal	4.000.000
				643-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Inovasi Produk, Pedalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Keuangan Syariah	4.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
				644-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah	4.000.000
				645-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah	4.000.000
				646-Penyusunan Kebijakan Syariah Terkait Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal	4.000.000
				647-Kesekretariatan PPK Komite Nasional Keuangan Syariah	1.800.000
2932-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun	600.000
				511-Kajian Penguatan Manajemen Kebencanaan Nasional	600.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Tahun 2021 dengan Kementerian/ Lembaga dalam	800.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2020 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	500.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2019 Bidang Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rawan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan	750.000
				641-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan	750.000
				642-Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu Melalui Program Solusi Lokal untuk Pengentasan	300.000
				643-Koordinasi Strategis Pemantapan Implementasi Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah	300.000
				644-Koordinasi Strategis Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dalam mendukung Percepatan	400.000
				645-Koordinasi Strategis Lembaga Pengelola Pendanaan Penanggulangan Bencana	400.000
				646-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana (PPPP)	1.500.000
				647-Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan	7.500.000
648-Koordinasi Strategis Desk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat	8.000.000				

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2933-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	511-Kajian Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan di Kalimantan	850.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Terpadu dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	611-Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	1.083.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian Strategis Pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan yang Bersumber Dari Pendanaan Alternatif	900.000
2934-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kehutanan	1.100.000
			520-Policy Paper	520-Value chain industri hasil hutan	-
				521-Digitalisasi pengelolaan hutan	-
				522-Forest based ecotourism cluster	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2021 bidang Kehutanan	725.000
				571-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Sub Bidang Kehutanan	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	590-Koordinasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020 - 2024 Bidang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun 2020 Bidang Kehutanan	500.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2019 Bidang Kehutanan	500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pencapaian SDGs Tujuan 15	550.000
				641-Kegiatan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	24.975.000
				642-Koordinasi Proyek Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Tahun 2020 untuk Percepatan Pembangunan Bidang Kehutanan	500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2935-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategi Penguatan Integrasi Hulu Hilir Perikanan dan Dukungan Lintas Sektor Dalam	2.000.000
			052-Policy Paper	052-Policy Study : Tantangan Sinergitas Pembangunan Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dalam	-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.000.000
				580-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Diseminasi RPJMN 2020 - 2024 Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2.900.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun Berjalan Lingkup Kelautan dan Perikanan	1.000.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RKP Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1.000.000
				613-Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	643-Dukungan Pendampingan dan Operasional Kegiatan PHLN Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000
				644-Dukungan Pendampingan dan Operasional POKJA 3 Kelautan dan Perikanan	31.600.000
2936-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kebijakan dan Strategi peningkatan peran perempuan dalam ketenagakerjaan	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	549.530
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan program dan kegiatan bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda dan olahraga	1.000.000
				611-Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Pelaksanaan TA 2020	700.000
				641-Koordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas TA 2020	700.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	1.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2937-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pembangunan Kesehatan	1.042.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1.628.780
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Sosialisasi RPJMN lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan	1.092.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	1.042.000
				641-Koordinasi Strategis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1.042.000
				642-Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI Unicef 2016-2020	575.000
				643-Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	14.300.000
2938-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Moneter	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Strategis Inovasi Kebijakan Pembiayaan	850.000
			052-Policy Paper	-	
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Bidang Keuangan Negara dan	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sinkronisasi Penyusunan Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024 Bidang Keuangan Negara	100.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Keuangan Negara dan Moneter	700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak Sektor Energi dan Cukai Hasil Tembakau	250.000
				641-koordinasi Strategis Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi	500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2939-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	510-Kajian	510-Kajian Analisis Kebijakan Penanganan Limbah dan Bahan Makanan yang Terbuang (Food Loss and Waste)	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	570-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021	1.000.000
				571-Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	590-Tanpa Sub Output	590-Finalisasi Penyusunan RPJM 2020-2024 Bidang Lingkungan Hidup	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	610-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	250.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019	250.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	1.000.000
				641-Koordinasi Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	500.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan SDG's (Goal 12 dan 13)	250.000
				643-Koordinasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim	8.000.000
644-Koordinasi Penyusunan Informasi Daya Dukung Lingkungan untuk Mendukung Satu Data Perencanaan	750.000				
2940-Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Potensi dan Tantangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	750.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tahun 2021	650.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan RPJMN 2020-2024 dengan Renstra K/L 2020-	600.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring RKP 2020 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah	400.000
			061-Tanpa Sub Output	611-Evaluasi RKP 2019 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah	400.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.500.000
				641-Koordinasi Strategis Penguatan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	850.000
				642-Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah	850.000
				643-Koordinasi Strategis Pembangunan Provinsi Aceh	4.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2941-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional	1.000.000
				511-Kajian Swasembada Protein	1.000.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP 2021 dan DAK Tahun 2021	1.000.000
				571-Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Internal Direktorat Pangan dan Pertanian TA 2020	-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Sosialisasi RPJMN	500.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Evaluasi Pelaksanaan Transfer Teknologi Melalui Pembangunan Techno Park Pertanian	1.000.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 Bidang Pangan dan Pertanian TA 2020	1.000.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian (Pengembangan Policy Lab)	1.500.000
				641-Koordinasi Strategis Perencanaan Pangan Dan Pertanian Tindak Lanjut Kerjasama Dengan Lembaga	-
				642-Koordinasi Penyusunan Rencana Jangka Menengah Sistem Pangan Nasional	2.000.000
2942-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Peran Koperasi (Worker Coop) Dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Potensi	800.000
				570-Koordinasi penyusunan RKP 2021 lingkup UMKM dan koperasi	820.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RPJMN lingkup UMKM dan koperasi	497.000
				605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output
		611-Evaluasi Perencanaan Peningkatan Kapasitas UMKM dan Koperasi	785.000		
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Wirausaha berbasis Oportunity	483.000
				641-Implementasi Perluasan Model Kemitraan Strategis Antara Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)	3.660.929
2943-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	1.000.000
				570-Koordinasi penyusunan RKP Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	500.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Finalisasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	-
				571-Koordinasi RPJMN Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	600.000
				611-Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	600.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1.000.000
				641-Koordinasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu	1.500.000
				642-Koordinasi Strategis Strategi Komunikasi	4.500.000
2944-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-kajian pengembangan model pelaksanaan (Delivery Model) dan penyaluran (Channeling)	414.900
			055-Rancangan Pendanaan	551-Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	661.503
				552-Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktivitas Pengembangan	2.247.875
				553-Koordinasi Peningkatan Kesiapan Pendanaan Luar Negeri Bilateral	549.541
				554-Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program Hibah Compact 2	15.000.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Proyek-Proyek Yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bilateral	769.289
				611-Evaluasi Pelaksanaan Proyek Melalui pendanaan Pinjaman pemerintah tiongkok	356.892
2945-Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	510-Kajian	510-Policy Paper pengembangan strategis kerjasama pendanaan luar negeri multilateral dengan uni eropa	542.000
			550-Rancang Pendanaan	520-Koordinasi kebijakan dan strategis pendanaan luar negeri multilateral	3.318.500
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	610-Tanpa Sub Output	610-Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Bersama dengan Mitra Pembangunan Multilateral	713.500
				611-Pengembangan Strandar Prosedur Perencanaan Pendanaan Luar Negeri Multilateral TA 2020	605.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	640-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis G-20 Working Group on Development	1.739.835
2947-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Sinergitas Penyediaan Air Baku di Pulau Terpencil dengan Melibatkan Kerjasama Swasta PDAM	500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air	400.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sosialisasi dan Integrasi RPJMN 2020-2024 Bidang Sumber Daya Air	200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi terhadap dampak dari kegiatan Dam Operational Improvement and Safety	3.200.000
				611-Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	5.129.123
				612-Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Irigasi Project (IPDMIP)	4.500.000
				613-Komering Irrigation Project (Phase III)	1.380.000
				614-Rentang Irrigation Modernization Proiect (RIMP)	1.400.000
				615-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Irigasi Air	350.000
				616-Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air	659.167
				641-Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air	550.000
				642-Koordinasi Strategis Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	3.025.000
				643-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Pembangunan Citarum Harum	1.125.000
				644-Koordinasi Strategis Perencanaan, Rehabilitasi, Rekonstruksi Infrastruktur Berketahanan Terhadap Ancaman Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi	400.000
2948-Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	01-Tersusunnya Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	054-Rancang bangun	540-Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Toolkit) Pra Studi Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan	1.250.000
				541-Koordinasi Strategis Rancang Bangun Infrastruktur dan Infrastruktur Ibukota Baru	6.200.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output		-
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	770.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU	1.900.000
				641-Koordinasi Strategis Fasilitasi Pemerintah untuk Pembiayaan Non Anggaran Pemerintah (PINA)	17.272.000
				642-Koordinasi Strategis Penyeleksian Proyek (Screening) dan Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Public Private	2.470.000
				643-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan	7.780.000
				644-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan	7.350.000
				645-Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Layanan Dasar	6.920.000
				646-Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	4.130.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2949-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Ekonomi	1.150.000
				511-Pengembangan Model Pembangunan Wilayah(PRADA)	1.500.000
				512-Penyusunan Proyeksi Ekonomi Wilayah Dalam RPJPN 2025-2045	500.000
		602-Sistem/regulasi perencanaan	056-Tanpa Sub Output	560-Pengembangan Web GIS Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik RKP 2021	550.000
				561-Pengembangan Mekanisme dan Tata Kelola Penyelarasan Perencanaan Pusatdan Daerah	500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan Tahun 2020	550.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan bidang pengembangan wilayah dan kawasan	800.000
				611-Temu Konsultasi Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia	600.000
				640-Harmonisasi Penyelarasan Perencanaan Tahunan Derah RKPd dengan Perencanaan Pusat RKP Tahun	500.000
		609-Rancangan Perpres RKP	065-Tanpa Sub Output	650-Pengelolaan Data dan Informasi Kewilayahan Berbasis Spasial dalam mendukung Penyusunan	1.100.000
				651-Pengembangan Studio RKP On Map Berbasis Spasial Bidang Pengembangan Wilayah 2020	250.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2950-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	061-Kajian Perhitungan Biaya Logistik Perdagangan	1.044.957
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021 lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi	886.307
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Disiminasi rencana pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2025 bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional	592.752
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan evaluasi lingkup bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional tahun 2019	954.273
				611-Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Bidang Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Tahun 2019	483.090
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas Sebagai Focal Point Indonesia untuk The	1.486.590
641-Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Pada Forum Kerjasama dan Pertemuan	978.481				
642-koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pendukung Hibah Indonesia-EU Trade Support Facility (TSF) Tahun 2020	278.550				
2951-Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Inovasi Pendanaan Pembangunan	568.578
				511-Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	1.358.024
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	631.676
				611-Evaluasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan	615.834

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2952-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	01-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Strategis Penyusunan Roadmap Transformasi Perubahan Struktur Ekonomi Nasional	980.000
				511-Kajian Pengembangan Indikator Makro dan Statistik	775.000
			053-Modelling	530-Model Outlook Makro Ekonomi Indonesia	1.350.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	057-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	850.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi RPJMN 2020-2024 Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	850.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020	520.000
				611-Evaluasi Pemanfaatan Data Potensi Desa (Podes)	515.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Forum Masyarakat Statistik (FMS)	1.255.000
609-Rancangan Perpres RKP	065-Tanpa Sub Output	650-Koordinasi Penyusunan Rancangan Perpres RKP	405.000		
2953-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	511-Kajian Tematik Indeks Kota Berkelanjutan	550.000
				512-Kajian Keterjangkauan Perumahan di Kawasan Metropolitan Terpilih	550.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Multipihak Penyusunan RKP, Renja dan RKA K/L tahun 2021 Lingkup Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	900.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Perkotaan, Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	900.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional	2.400.000
				641-Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional	1.300.000
				642-Pendampingan Teknis Kegiatan Hibah dan Pinjaman	800.000
				643-National Slum Upgrading Project (NSUP)	7.600.000
				644-Koordinasi Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara	130.000.000
2954-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Pengembangan Jaminan Pekerjaan (Unemployment Benefit) dalam Jaminan Sosial Bidang	900.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan RKP Lingkup Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	590-Koordinasi Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Bidang Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan	800.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Akses Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk	700.000
				611-Evaluasi Peta Jalan Jaminan Sosial	800.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Percepatan Pelaksanaan Kemudahan Berwarga Negara di Indonesia (Ease of Being Indonesian)	4.597.960

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2956-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Penyusunan RKP Tahun 2020 bidang Pertahanan dan Keamanan	1.270.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output		-
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan RKP Tahun 2020 Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.085.000
				611-Evaluasi RKP Tahun 2019 Bidang Pertahanan dan Keamanan	645.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output		-
2957-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Kelembagaan Partai Politik dalam Demokrasi	800.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP 2021 Bidang Politik dan Komunikasi	600.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Finalisasi RPJMN 2020-2024	200.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Bidang Politik dan	800.000
				611-Review Penyelenggaraan Pemilu 2019	800.000
				612-Review Efektifitas Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	700.000
				613-Review Hambatan Kebebasan Pers dalam Demokrasi	600.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	643-Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2020	1.193.860
2958-Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	01-Tersusunnya Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	606-Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	062-Tanpa Sub Output	620-Pemantauan Pelaksanaan Proyek Strategis Pembangunan Berbasis THIS (Tematik, Holistik,	2.250.000
			062-Tanpa Sub Output	621-Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.000.000
		607-Sistem/Regulasi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional	063-Tanpa Sub Output	630-Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.500.000
				631-Koordinasi Penyusunan Pelaporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	100.000
				632-Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	2.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2959-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Klasterisasi Hilirisasi Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Ekonomi di Daerah	950.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP Tahun 2021 Bidang Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	1.000.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Sosialisasi RPJMN 2020 - 2024 Sektor Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	750.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Peningkatan Akses Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Domestik	1.000.000
				611-Evaluasi Kebijakan Konservasi dan Efisiensi Energi	750.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Sektor Energi	800.000
				641-Koordinasi Strategis Implementasi, Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Geopark Yang Terintegrasi	750.000
				642-Koordinasi Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja (Pokja) II-ICCTF Bidang Energi	-
				643-Koordinasi Strategis Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia Untuk Sektor Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.000.000
		2960-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangun	051-Kajian
511-Kajian Reviu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008-2028	1.000.000				
603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output			570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lingkup Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan	1.700.000
604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output				-
605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output			610-Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Reforma Agraria dan Informasi	1.000.000
608-Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output			640-Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional	1.500.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2961-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Proyeksi Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja	1.500.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 Bidang Ketenagakerjaan	700.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi Finalisasi Penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 Bidang Ketenagakerjaan	450.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja	550.000
				611-Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	539.395
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Forum Komunikasi Reformasi Sistem Diklat Vokasi Tahap Kedua	5.000.000
2962-Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian		-
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	057-Koordinasi penyusunan RKP 2021 terkait lingkup Transportasi	1.200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Integrasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi RPJMN 2020-2024 lingkup Transportasi	1.300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKP 2019 terkait lingkup Transportasi	1.700.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Strategis Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional	1.000.000
				641-Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar	5.500.000
				642-Koordinasi Strategis Pelaksanaan DAK Transportasi	4.000.000
				643-Koordinasi Strategis Perencanaan Konektivitas ASEAN	1.300.000
		5203-Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	01-Terlaksananya Pengelolaan Hibah MCC	608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
5215-Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Reviu dan Ujicoba Pengukuran Indeks Diplomasi	300.000
				511-Kajian Pengukuran Dampak Ekonomi atas Kebijakan Pembangunan Internasional	200.000
			052-Policy paper	520-Policy PaperPemanfaatan Perjanjian Internasional	140.000
				521-Policy PaperEvaluasi keanggotaan Indonesia dalam forum dan Organisasi Internasional	140.000
				522-Policy PaperPemetaan kebutuhan perwakilan RI di kawasan Afrika	140.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Penyusunan RKP Bidang Polugri dan KPI	200.000
		604-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi RPJMN 2020-2024 Bidang Polugri dan KPI	440.742
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik Luar	340.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Koordinasi Pelibatan Indonesia Dalam Forum Kerjasama Pembangunan Internasional	1.500.000
				641-Koordinasi Pelaksanaan Bidang Politik Luar Negeri	250.000
				642-Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan Program Reverse Linkage	400.000
				643-Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional	460.000
				644-Pendukung Hibah Luar Negeri Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	550.000
				645-Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam mendukung Perdagangan dan Investasi	500.000
				646-Pengembangan Inisiatif Kemitraan Global, Berbagi pengalaman dan kerjasama Pembangunan dengan Organisation for Economic Cooperation and Development	550.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
5216-Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Kajian Analisis Penyusunan Renja K/L	600.000
		602-Sistem/Regulasi Perencanaan	602-Tanpa Sub Output	560-Koordinasi Pengembangan Sistem Dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Pada Sistem Informasi Krisna	2.975.000
				561-Pengembangan Sistem/Regulasi Perencanaan Pembangunan	1.300.000
				562-Koordinasi Pengembangan Sistem Dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Pada Sistem Informasi Krisna	2.900.000
		603-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek	057-Tanpa Sub Output	570-Koordinasi penyusunan RKP dan Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L	1.300.000
		605-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan	061-Tanpa Sub Output	610-Koordinasi Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1.500.000
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	640-Pengendalian Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	425.000
5217-Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	01-Tersusunnya Analisis Kebijakan Pembangunan	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Koordinasi Penyusunan Analisis Kebijakan	1.510.930
				511-Koordinasi Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan	1.250.000
				512-Koordinasi Analisis Kinerja	750.000
5246-Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	01-Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	601-Kebijakan Perencanaan Pembangunan	051-Kajian	510-Analisis Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan Global	286.103
				511-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur	771.577
				512-Pengembangan Kewirausahaan Sosial Dalam Rangka Percepatan Pengurangan Kesenjangan Antar	1.176.000
				513-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	780.000
				514-Optimalisasi Hubungan Kelembagaan Dalam Mendukung Implementasi Integrasi Perencanaan dan	700.000
				515-Koordinasi Strategis Simplifikasi Regulasi dan Penyusunan kerangka Regulasi RPJMN 2020-2024 dan	1.500.000
				516-Monitoring Pelaksanaan Simplifikasi Regulasi Tahun 2019	1.000.000
				517-Forum Konsultasi Publik Dalam Proses Perumusan Kebijakan RKP 2021	790.000
				518-Analisa Pola Konsumsi Masyarakat	3.233.220
				519-Penyempurnaan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	980.677
				520-Lembaga Pembina Pendampingan Pembangunan	10.000.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
		608-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	064-Tanpa Sub Output	641-Kajian/Model Inovatif Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Perencanaan	19.399.050
				642-Koordinasi Kelautan dan Perikanan	700.000
				643-Koordinasi Pangan dan Pertanian	3.500.000
				644-Koordinasi Lingkungan Hidup	4.000.000
				645-Pemindahan Ibu Kota Negara (Lintas Sektor)	8.000.000
				646-Koordinasi Perkotaan, Perumahan dan Permukiman	4.000.000
5847-Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	01-Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	610-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Perencana	066-Koordinasi Penyelenggaraan	660-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Gelar	141.835.146
			067-Koordinasi Penyelenggaraan	670-Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemantauan Diklat Non Gelar	12.934.925
			068-Koordinasi Pembinaan	680-Pembinaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan JFP	22.127.785
			069-Fasilitasi Pembinaan dan Diklat	690- Kegiatan Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi	33.714.900

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2020**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

Sasaran Program : 01-Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

Sasaran Strategis : 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

Output Program : 01-Layanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2911-Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	01-Tersusunnya Pelayanan Kehumasan, Keprotokol/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	112-Tanpa Sub Output	112-Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga	19.303.709
				115-Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	-
		959-Layanan Protokoler	112-Tanpa Sub Output	113-Ketatausahaan dan persidangan pimpinan	4.326.081
				114-Protokoler lembaga	9.370.210
2912-Pembinaan dan Pelayanan Hukum	01-Tersusunnya Pembinaan dan Pelayanan Hukum	957-Layanan Hukum	091-Produk Hukum	091-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1.375.200
				092-Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi	1.200.000
			092-Bantuan Hukum	092-Peningkatan Profesionalitas Pemberian Konsultasi dan Pendampingan Hukum	1.375.200
2913-Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	01-Tersusunnya Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	952-Layanan Perencanaan	110-Tanpa Sub Output	110-Pelayanan Penyusunan Program dan Anggaran	648.000
				953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	110-Tanpa Sub Output
		960-Layanan Manajemen Organisasi	110-Tanpa Sub Output	107-Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana	1.700.000
				108-Koordinasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	-
				109-Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tata Laksana	-
964-Layanan Kerjasama Internasional	110-Tanpa Sub Output	106-Pengembangan Kerjasama	1.100.000		
2914-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	01-Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	001-Tanpa Sub Output	093-Koordinasi Pengelolaan SDM	2.990.000
				094-Koordinasi Pengembangan SDM	10.800.000
				095-Koordinasi Kinerja Pegawai	1.850.000
				096-Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	1.360.000

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2915-Pelayanan Umum dan Keuangan	01-Terselenggaranya Pelayanan Umum dan Keuangan	955-Layanan Manajemen Keuangan	001-Tanpa Sub Output	102-Penerapan SAI	739.755
				103-Pelayanan Administrasi Satker	18.689.052
				104-Pelayanan Pengujian Pembayaran	3.502.565
		956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	001-Tanpa Sub Output	098-Pengelolaan BMN	2.149.584
				099-Pencatatan BMN	1.924.923
		962-Layanan Umum	001-Tanpa Sub Output	100-Pelayanan Dukungan Umum dan Perkantoran	15.111.967
				101-Pelayanan Perencanaan Fasilitas Umum Perkantoran dan Pengadaan	30.770.001
		994-Layanan Perkantoran	001-Tanpa Sub Output	001-Gaji dan Tunjangan	180.164.552
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	162.398.725				
2916-Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	01-Tersusunnya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	963-Layanan Data dan Informasi	001-Tanpa Sub Output	116-Dukungan Penyusunan Dokumen Perencanaan	700.000
				117-Pengelolaan Data dan TI	13.540.000
				119-Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	2.300.000
				120-pengembangan kapasitas TI	23.460.000
				121-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	20.000.000
2918-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	01-Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	001-Tanpa Sub Output	051-Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	86.150.476
2946-Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	01-Tersusunnya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Tanpa Sub Output	051-Pengadaan kendaraan bermotor	1.306.998
				053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	97.312.002
				054-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	151.381.000

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2020**

Nama Kementerian : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

Program : 055.01.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program : 01-Terjaganya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Strategis : 02-Manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang bersih

Output Program : 01-Layanan Pengawasan Internal kementerian PPN/Bappenas

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN	ALOKASI
2920-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	01-Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Administrasi Umum	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	850.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	400.000
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	1.050.000
			003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	4.450.000
2921-Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	01-Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Bidang Kinerja Kelembagaan	965-Layanan Audit Internal	001-Layanan Penjaminan/ Assurance	052-Pelaksanaan audit internal	1.380.000
				054-Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	150.000
			002-Layanan Pembinaan	056-Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	275.000
			003-Manajemen Internal	051-Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	1.445.000

LAMPIRAN C

Rekapitulasi Capaian Kinerja

Unit Kerja Eselon I

Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG EKONOMI

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup bidang ekonomi yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidang ekonomi	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	9.314.000.000	8.276.225.273	88,86
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisa Moneter	4.668.000.000	4.025.836.530	86,24
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	4.223.406.000	3.803.131.944	90,05
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	6.705.000.000	5.812.748.190	86,69
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.214.000.000	4.013.824.983	95,25

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan RKP	80%	85,59%	100%
		5. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pengembangan regional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		7. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pengembangan regional	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMD dengan RPJMN lingkup pengembangan regional	80%	67,16%	83%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup pengembangan regional	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	11.600.000.000	9.174.009.490	79,09
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	20.897.000.000	19.305.236.084	92,38
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Otonomi Daerah	9.650.000.000	8.300.126.777	86,01

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	52.584.450.000	49.763.249.173	94,63
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	6.300.000.000	6.110.696.130	97,00

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kemaritiman dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup kemaritiman dan sumber daya alam	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	20.396.302.000	20.012.985.068	98,12
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	16.965.546.000	13.841.694.572	81,59
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	4.959.160.000	4.903.679.610	98,88
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	12.070.308.000	10.834.081.027	89,76
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	7.698.116.000	7.597.710.269	98,70

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	-	-	-
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup kependudukan dan ketenagakerjaan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	5.595.000.000	4.952.890.125	88,52
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	5.900.000.000	5.477.589.792	92,84
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	8.069.825.000	6.773.080.535	83,93
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	5.680.000.000	4.753.665.528	83,69

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan /L	100%	93,11%	93,11%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	6.510.327.000	5.963.777.850	91,60
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	5.115.258.000	4.860.165.528	95,01

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	12.833.371.000	11.651.733.328	90,79
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	25.553.975.000	16.436.009.608	64,32

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup bidang ekonomi	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup sarana dan prasarana	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	12.617.800.000	12.138.217.424	96,20
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	26.817.329.000	21.064.881.794	78,55
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	56.200.000.000	42.082.858.234	74,88
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	16.900.150.000	15.583.257.440	92,21

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) keselarasan muatan RPJMN dengan RPJPN lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan muatan Renstra K/L dengan RPJMN lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup politik, hukum, pertahanan dan keamanan	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	4.311.556.000	4.068.144.186	94,35
2. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	5.000.000.000	4.334.027.798	86,68
3. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	8.250.000.000	6.208.766.450	75,26
4. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	5.250.000.000	5.169.527.573	98,47
5. Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	6.060.657.000	5.950.609.508	98,18

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan RKP lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%
		4. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup pendanaan pembangunan yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%
		5. Persentase (%) penyiapan regulasi sistem pendanaan pembangunan sesuai rencana	100%	100%	100%
		6. Persentase (%) keselarasan rancangan pendanaan RPJMN dengan muatan RPJPN	100%	100%	100%
2.	Rancangan Perpres RKP	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup pendanaan pembangunan	1 dok	1 dok	100%
3.	Keselarasan antara RKP dan RAPBN	Tersusunnya konsep rencana pendanaan pembangunan dalam rangka RAPBN	4 dok	4 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	12.818.472.000	9.613.039.892	74,99
2. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	6.670.744.000	6.274.114.317	94,05
3. Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	3.763.704.000	3.532.582.569	93,86
4. Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	3.230.295.000	2.957.192.490	91,55
5. Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	11.129.188.000	9.667.167.734	86,86

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L/D	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) pemanfaatan sistem/regulasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional	100%	100%	100%
		3. Rancangan Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional	1 dok	1 dok	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	21.340.000.000	20.810.588.580	97,52
2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	25.705.000.000	19.716.958.064	76,70
3. Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	12.760.000.000	11.687.675.012	91,60

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	1. % Kebijakan pengkajian/koordinasi perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%
		2. Jumlah sumber daya manusia Perencana pusat dan daerah yang berkualitas	1.300 orang	1.808 orang	139,07%
2.	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas yang Baik dan Bersih				
	a. Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih	1. Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik	Baik	Baik	100%
		2. Skor RB K/L	A	A	100%
		3. Opini BPK	WTP	WTP	100%
		4. Skor Evaluasi AKIP	A	A	100%
		5. % Penyelesaian rumusan Peraturan Perundangan lingkup perencanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%
b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	% Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%	

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan Pembangunan Nasional			
1. Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	6.724.170.000	1.670.268.130	24,84
2. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	237.477.215.000	216.763.737.367	91,28
3. Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	6.321.150.000	6.075.178.038	96,11
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya:			
1. Pelayanan Kehumasan, Keprotokolanan/ Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	27.703.036.000	27.177.415.143	98,10
2. Pembinaan dan Pelayanan Hukum	3.162.800.000	3.037.172.309	96,03
3. Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	5.000.000.000	4.146.120.329	82,92
4. Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	22.243.900.000	19.905.463.207	89,49
5. Pelayanan Umum dan Keuangan	554.349.699.000	489.376.700.482	88,28
6. Pengelolaan Data dan Informasi	152.935.282.000	104.981.596.153	68,64
7. Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	44.845.047.000	42.287.356.403	94,30

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terjaganya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/ Bappenas	1. Persentase (%) Penyelesaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (Melalui Peran <i>Assurance</i> dan <i>Advisory</i>) di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%
		2. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas	100%	100%	100%
		3. Tingkat Persepsi <i>Stakeholders</i> Inspektorat Utama atas Pemberian Nilai Tambah dalam Pencapaian Tujuan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	100%
		4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Kementerian PPN/Bappenas	Level 3	Level 3	100%
		5. Persentase (%) Pemanfaatan Kebijakan dan Sistem Informasi Pengawasan Intern	100%	100%	100%

Kegiatan:	Anggaran:	Realisasi	%
1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	7.200.000.000	6.942.254.467	96,42
2. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	3.050.000.000	3.026.197.881	99,22

LAMPIRAN D

**Contoh Capaian Keselarasan Prioritas
Nasional dalam RKP 2020**

Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

PN 1

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

1. Keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024				RKP 2020			Keselarasan Substansi Output		Nilai Keselarasan	
Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Indikator sasaran	Program Prioritas	Sasaran	Σ Indikator Sasaran	Selaras	Tidak Selaras		
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Terpenuhinya layanan dasar (kesehatan)	20	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat	6	6	-	Sasaran PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan RKP 2020 telah terpetakan langsung dan selaras dengan sasaran RPJMN 202-2024 PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	
					Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular	7	7	-		
					Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	6	6	-		
		Terpenuhinya layanan dasar (pendidikan)	9	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	Meningkatnya partisipasi Pendidikan	8	8	-		Sasaran RPJMN 2020-2024 meningkatnya produktivitas dan daya saing (perguruan tinggi dan Iptekin) memiliki 21 indikator. Sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam RKP 2020 menjadi 1 indikator sasaran yakni peringkat Global Innovation Index. Indikator
		Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing (perguruan tinggi, Iptekin)	21		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	4	-		
				Meningkatnya Kapabilitas Adopsi Iptek dan	1	1	-			

RPJMN 2020-2024				RKP 2020			Keselarasan Substansi Output		Nilai Keselarasan
Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Indikator sasaran	Program Prioritas	Sasaran	Σ Indikator Sasaran	Selaras	Tidak Selaras	
					Penciptaan Inovasi SDM Indonesia				dalam RKP 2020 tersebut secara substansi telah mencakup indikator-indikator sasaran RPJMN 2020-2024.
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	8	Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa	Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda	6	6	-	PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa RKP 2020 memiliki jumlah indikator sasaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah indikator sasaran RPJMN 2020-2024. Meskipun demikian substansi sasaran RKP selaras dengan RPJMN dengan alasan sebagai berikut: (1) tidak semua indikator sasaran dilaksanakan pada tahun 2020, semisal indikator peringkat Asian Games dan indikator peringkat Asian Para Games; (2) indikator sasaran RKP telah mencakup substansi sasaran RPJMN; dan (3) indikator sasaran RPJMN tidak diterjemahkan ke dalam indikator sasaran PP, melainkan diterjemahkan ke dalam indikator sasaran KP semisal sasaran menguatnya revolusi
		Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing (olahraga)	5		Meningkatnya prestasi olahraga di internasional	2	2	-	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	2		Meningkatnya pemajuan kebudayaan dalam memperkuat ketahanan budaya dan Kerukunan	2	2	-	
		Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	1						
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan	1						

RPJMN 2020-2024				RKP 2020			Keselarasan Substansi Output		Nilai Keselarasan
Agenda Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran	Σ Indikator sasaran	Program Prioritas	Sasaran	Σ Indikator Sasaran	Selaras	Tidak Selaras	
		dalam pembangunan							mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
		Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	1						
		Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	1						
		Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	2		Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda	1	1	-	

2. Keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) K/L 2020 dengan RKP

RKP 2020			Renja K/L 2020		Renja K/L 2020	Nilai Keselarasan
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Output	Kegiatan K/L	Output	K/L Mitra Pelaksana	
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Pembinaan Gizi Masyarakat	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Kemenkes	Output Renja K/L 2020 di Kemenkes dan BPOM telah terpetakan langsung dan selaras dengan RKP 2020 pada PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, KP Percepatan Perbaikan Gizi.
		Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus	Pembinaan Gizi Masyarakat	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kurus	Kemenkes	
		Suplementasi Gizi	Pembinaan Gizi Masyarakat	Suplementasi Gizi	Kemenkes	
		Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	Pembinaan Gizi Masyarakat	Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	Kemenkes	
		Peningkatan Surveilans Gizi	Pembinaan Gizi Masyarakat	Peningkatan Surveilans Gizi	Kemenkes	
		Paket Penyediaan obat gizi	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Paket Penyediaan obat gizi	Kemenkes	
		Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi	BPOM	

3. Keselarasan muatan Rencana Kerja (RKA) K/L 2020 dengan RKP

RKP 2020			RKA K/L 2020			Nilai Keselarasan
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Σ Output RKP	Σ Output RKA	K/L Mitra Pelaksana	Alokasi (Rp. Juta)	
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	10	10	Kemenkes	233.879,37	Output RKA K/L 2020 telah terpetakan langsung dan selaras dengan output RKP 2020 pada PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	7	7	Kemenkes BPOM	709.300,92 2.500	
	Peningkatan Pengendalian Penyakit	29	29	Kemenkes	1.886.895,03	
	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12	12	Kemenkes BPOM	252.950,37 63.880,94	
	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	72	72	Kemenkes BPOM	2.598.112,23 465.679,87	

PN 2

Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

RPJMN 2020-2024			RKP 2020			Keselarasan	Renja K/L		Keselaras an	RKA K/L	Keselaras an
Prioritas Nasional	Program Prioritas	Sasaran PP	Prioritas Pembangunan Nasional (Pembangunan Bidang)	Sasaran	Indikator		Kegiatan K/L	Output Kegiatan		Anggaran (dalam milyar)	
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan	Luas jaringan irigasi yang dibangun	Selaras	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun	Selaras	3.084	Selaras
					Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi	Selaras	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan (SIMURP) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan (SIMURP)	Selaras	3.226	Selaras

RPJMN 2020-2024			RKP 2020			Keselarasan	Renja K/L		Keselarasan	RKA K/L	Keselarasan
Prioritas Nasional	Program Prioritas	Sasaran PP	Prioritas Pembangunan Nasional (Pembangunan Bidang)	Sasaran	Indikator		Kegiatan K/L	Output Kegiatan		Anggaran (dalam milyar)	
		Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana		Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air	Panjang pengendali banjir yang dibangun	Selaras	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan	Selaras	597	Selaras
					Panjang pengendali banjir yang dibangun	Selaras	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Checkdam yang dibangun/ditingkatkan	Selaras	174	Selaras
					Panjang pengendali banjir yang dibangun	Selaras	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	Selaras	2.913	Selaras
					Panjang pengaman pantai yang dibangun	Selaras	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Breakwater yang dibangun/ditingkatkan	Selaras	302	Selaras

Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

1. Keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024

NO	RPJMN 2020-2024			RKP 2020			Keselarasan
	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi	Kode KP	KP	Sasaran KP	
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.	3.1.1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar	Selaras
2.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan	3.1.2	Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMKM yang mengakses kredit di lembaga keuangan formal	Selaras

NO	RPJMN 2020-2024			RKP 2020			Keselarasan
	Agenda Pembangunan	Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi	Kode KP	KP	Sasaran KP	
			start-up; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.				
3.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.	3.2.2	Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir	Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir	Selaras

2. Keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) K/L 2020 dengan RKP

NO	Unit Kerja Sektor	K/K Mitra	Renja K/L		RKP 2020				Keselarasan
			Kegiatan K/L	Output Kegiatan K/L	Kode KP	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan Prioritas	Indikator	
1.	Dit. PUKMK	Kemen KUKM	Penumbuhan dan pengembangan industry kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	IKM pangan, barang dari kayu, dan furniture yang mendapat penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan	3.1.1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar	Jumlah UMK / kelompok yang ditingkatkan kapasitas usahanya	Selaras
2.	Dit. IPEK	Bekraf	Pengembangan Akses Permodalan Sektor Non-Perbankan	Modal disalurkan dari sektor Non-Perbankan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang aksesnya diintermediasi oleh Bekraf	3.1.2	Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMKM yang mengakses kredit di lembaga keuangan formal	Jumlah wirausaha dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan	Selaras
3.	Dit. Transportasi	Kemenhub	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Prioritas Nasional	3.2.2	Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir	Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir	Jumlah pembangunan/r evitalisasi prasarana logistik perikanan, termasuk cold storage	Selaras
4.	Dit. Pendidikan dan Agama	Kemendikbud	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah yang Bekerjasama dengan Industri dan Pendidikan Dual System	3.3.1	peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha	Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga diklat dan dunia usaha	Jumlah sekolah vokasi yang bermitra dengan dunia usaha	Selaras

3. Keselarasan muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L 2020 dengan RKP 2020

NO	Unit Kerja Sektor	RKA K/L			RKP 2020				Keselarasan
		K/L Mitra	Output Kegiatan	Anggaran (juta rupiah)	Kode KP	Nama KP	Sasaran KP	Indikator KP	
1.	Dit. IPEK	Kemenperin	Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020-2024)	9.000	3.2.3	peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir	Meningkatnya nilai tambah dan investasi di subsektor industri kimia, logam, dan otomotif	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri	Selaras
2.	Dit. PIKEI	BKPM	Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Infrastruktur	500	3.2.6	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi PMA dan PMDN	Jumlah peta potensi dan peluang investasi daerah	Selaras
3.	Dit. Tata Ruang dan Pertanahan	Kemen ATR/BPN	Rencana Rinci/Detail Tata Ruang Kawasan Tematik	23.300	3.2.7	peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	meningkatnya jumlah kawasan industri yang berpotensi	Jumlah kawasan yang difasilitasi pemerintah	Selaras
4.	Dit. Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi	2.100	3.3.3	peningkatan sertifikasi kompetensi	meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi	pelatihan untuk asesor/master asesor bidang sertifikasi	Selaras
5.	Dit. PIKEI	Kemendag	Peningkatan Peran Indonesian Design Development Center	8.571	3.4.1	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	meningkatnya produk ekspor dan jasa	Jumlah produk baru yang diekspor	Selaras

PN 5

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

1. Keselarasan RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024

K/L Pelaksana	RPJMN 2020-2024			RKP 2020					Keterangan Keselarasan
	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	Kode KP	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	
Kemhan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan Confidence Building Measures (CBM) dan reformasi anggaran yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau MEF, dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista	05.01.01	Peningkatan Kekuatan Pertahanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista	Jenis Alutsista yang diadakan	12 jenis	selaras
Kemhan							Jenis Alutsista yang dipelihara dan dirawat	7 jenis	
Kemhan							Jenis sarana-prasarana pertahanan yang dibangun	10 jenis	
Kemhan				Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan Confidence Building Measures (CBM) dan reformasi anggaran yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan	05.01.02	Penguatan Kemandirian Pertahanan	Meningkatnya kemandirian industri pertahanan	Jumlah teknologi pertahanan industri pertahanan yang diteliti dan dikembangkan	
Kemhan	Jumlah Alutsista industri	1 paket							

K/L Pelaksana	RPJMN 2020-2024			RKP 2020					Keterangan Keselarasan
	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	Kode KP	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	
			pokok minimum atau MEF, dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista				pertahanan yang diproduksi		
Kemhan			Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketahanan Risiko Terorisme (Pelaku dan Target), angka pelanggaran lintas batas negara, angka kejadian konflik, angka korban pengungsi internal	05.01.03	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar	Panjang Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) yang dibangun	200 KM	selaras
Kemhan	Jumlah pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dibangun	9 Bangunan							
Kemhan	Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang dibangun	16 Bangunan							
Kemen PU PR	Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun	11 Bangunan							
BNPP	Panjang pilar batas wilayah negara yang difasilitasi	50 KM							

2. Keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) K/L 2020 dengan RKP

RKP 2020					RENJA KL				Keterangan Keselarasan
Kode KP	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kode Kegiatan KL	Kegiatan K/L	Kode Output K/L	Output Kegiatan K/L	
05.01.01	Peningkatan Kekuatan Pertahanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista	Jenis Alutsista yang diadakan	12 jenis	012.02.1371	Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan	012.02.1371.001	Dukungan Pengadaan Alutsista	Selaras
					012.08.1401	Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan	012.08.1401.001	Dukungan Pengadaan Alutsista	
					012.12.1423	Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis	012.12.1423.001	Dukungan Pengadaan Rantis, Ranpur, Sucad Ranpur, Sucad Rantis (Prioritas)	
					012.12.1425	Pengadaan munisi kaliber kecil	012.12.1425.001	Dukungan Pengadaan Munisi Kaliber Kecil (Prioritas)	
					012.12.1428	Pengadaan munisi kaliber besar	012.12.1428.001	Dukungan Pengadaan Munisi Kaliber Besar / MKB (Prioritas)	
					012.12.1429	Pengadaan senjata	012.12.1429.001	Dukungan Pengadaan	

RKP 2020					RENJA KL				Keterangan Keselarasan
Kode KP	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Kode Kegiatan KL	Kegiatan K/L	Kode Output K/L	Output Kegiatan K/L	
								Senjata (Prioritas)	
					012.15.1458	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur	012.15.1458.002	Dukungan Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur Kegiatan Prioritas	
					012.15.1459	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	012.15.1459.002	Dukungan Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang Kegiatan Prioritas	
					012.15.1463	Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista	012.15.1463.002	Dukungan Pengadaan/Penggantian materiil non alutsista Kegiatan Prioritas	
					012.15.1465	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat	012.15.1465.002	Dukungan Pengadaan Alutsista Strategis Kegiatan Prioritas	

K/L Pelaksana	RKP 2020					RKA KL				Keterangan Keselarasan
	Kode KP	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Output	Target	Satuan	Rp	
						Senjata (Prioritas)				
						Dukungan Pengadaan/Pe nggantian Kendaraan Tempur Kegiatan Prioritas	12	unit	294.162.372.000	
						Dukungan Pengadaan/Pe nggantian Pesawat Terbang Kegiatan Prioritas	12	unit	119.560.000.000	
						Dukungan Pengadaan/Pe nggantian materiil non alutsista Kegiatan Prioritas	13	set	15.558.610.000	
						Dukungan Pengadaan Alutsista Strategis Kegiatan Prioritas	12	paket	447.097.700.000	

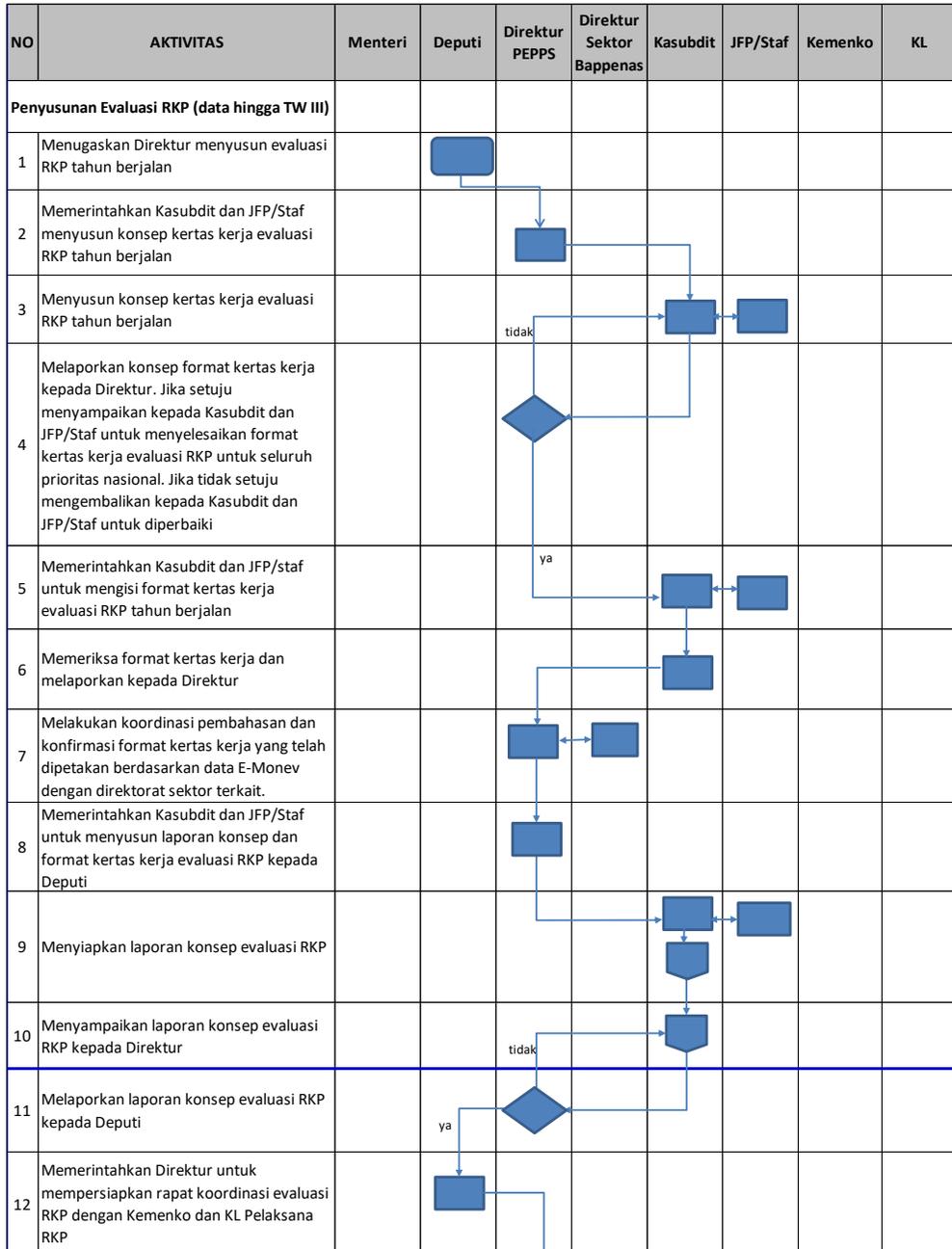
LAMPIRAN E

Capaian Evaluasi RKP Tahun 2019

Lampiran 1.

Proses Bisnis Evaluasi RKP 2019

Gambar L.1.
Proses Bisnis Evaluasi RKP 2019 (Tahap 1-Hingga Triwulan III)



NO	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Direktur PEPPS	Direktur Sektor Bappenas	Kasubdit	JFP/Staf	Kemenko	KL
13	Memerintahkan kasubdit dan JFP/Staf untuk mempersiapkan rapat koordinasi evaluasi RKP dengan Kemenko dan KL Pelaksana RKP			↓					
14	Menyiapkan rapat koordinasi evaluasi RKP dengan Kemenko dan KL Pelaksana RKP			↓		↓	↔		
15	Melaporkan bahan rapat koordinasi evaluasi RKP kepada Direktur			↓					
16	Melaporkan bahan rapat koordinasi evaluasi RKP kepada Deputi, sekaligus menyiapkan undangan rapat koordinasi		↓						
17	Mengirimkan undangan rapat koordinasi evaluasi RKP kepada Sekjen/Sestama Kemenko dan KL Pelaksana RKP		↓					↓	
18	Menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi PEPP Bappenas		↓						
19	Memerintahkan direktur untuk menindaklanjuti hasil pembahasan evaluasi RKP bersama KL		↓	↓					
20	Mengumpulkan capaian RKP dari KL Pelaksana dan Direktorat Sektor Bappenas			↓	↔				
21	Menugaskan Kasubdit dan JFP/Staf untuk mengolah serta menganalisis data capaian RKP dari KL Pelaksana			↓					
22	Mengolah serta menganalisis data evaluasi RKP dari KL Pelaksana dan Direktorat Sektor Bappenas			↓	↓	↔			
23	Melaporkan draft laporan evaluasi RKP kepada Direktur			↓					
24	Mengkoreksi dan memerintahkan Kasubdit dan JFP/Staf untuk memutakhirkan draft laporan evaluasi RKP			↓		↓	↔		
25	Melaporkan pemutakhiran draft laporan evaluasi RKP kepada Direktur			↓					

NO	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Direktur PEPPS	Direktur Sektor Bappenas	Kasubdit	JFP/Staf	Kemenko	KL
26	Melaporkan laporan evaluasi RKP kepada Deputi								
27	Melaporkan laporan evaluasi RKP kepada Menteri								
28	Mendapatkan arahan Menteri terkait laporan evaluasi RKP, sekaligus memerintahkan Deputi untuk menindaklanjutinya								
29	Memerintahkan Direktur untuk menindaklanjuti arahan menteri								
30	Memerintahkan Kasubdit dan JFP/Staf untuk menindaklanjuti arahan menteri, sekaligus menyiapkan bahan Evaluasi RKP (hingga TW IV)								

Sumber: Direktorat PEPPS (diolah), 2019

Gambar L.2.
Proses Bisnis Evaluasi RKP 2019 (Tahap 2-Hingga Triwulan IV)

NO	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Direktur PEPPS	Kasubdit	JFP/Staf	Direktur Sektor Bappenas	Kemenko	KL
Penyusunan Evaluasi RKP (data hingga TW IV)									
1	Menugaskan Direktur menyusun evaluasi RKP (hingga TW IV)								
2	Memerintahkan Kasubdit dan JFP/Staf untuk menyusun konsep kertas kerja evaluasi RKP (hingga TW IV)								
3	Menyusun konsep kertas kerja evaluasi RKP (hingga TW IV)								
4	Melaporkan konsep format kertas kerja kepada Direktur. Jika setuju menyampaikan kepada Kasubdit dan JFP/Staf untuk menyelesaikan format kertas kerja evaluasi RKP (hingga TW IV). Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit dan JFP/Staf untuk diperbaiki								
5	Menyelesaikan format kertas kerja untuk seluruh prioritas nasional								

NO	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Direktur PEPPS	Kasubdit	JFP/Staf	Direktur Sektor Bappenas	Kemenko	KL
6	Memeriksa format kertas kerja dan melaporkan kepada Direktur				↓				
7	Memerintahkan Kasubdit dan JFP/Staf untuk menyiapkan surat permohonan pengisian capaian kegiatan prioritas RKP (hingga TW IV)			↓	↓				
8	Menyiapkan surat permohonan pengisian capaian kegiatan prioritas RKP (hingga TW IV)			↓	↓				
9	Melaporkan konsep surat dan format kertas kerja kepada Direktur			↓					
10	Melaporkan konsep surat dan format kertas kerja kepada Deputi		↓						
11	Mengirimkan surat permohonan pengisian capaian kegiatan prioritas RKP (hingga TW IV) kepada KL Pelaksana dan Direktorat Sektor Bappenas		↓		↓				
12	Mengisi dan mengirimkan capaian KP, PP, dan PN RKP (hingga TW IV) kepada Deputi PEPP Bappenas (c.q: Direktur PEPPS Bappenas)						↓		
13	Mengkonfirmasi akhir data capaian dari KL Pelaksana dan Direktorat Sektor Bappenas (Dit. PEPPS dengan Dit. Sektor Bappenas)		↓	↓					
14	Memerintahkan kasubdit dan JFP/Staf untuk mengolah, menganalisis, dan menyusun laporan evaluasi RKP (hingga TW IV)			↓	↓		↓		
15	Mengolah, menganalisis, dan menyusun laporan evaluasi RKP (hingga TW IV)			↓	↓	↓			
16	Menyampaikan laporan draft laporan evaluasi RKP kepada Direktur				↓				
17	Melaporkan laporan konsep evaluasi RKP kepada Deputi		↓	↓					
18	Memerintahkan Direktur untuk mempersiapkan rapat koordinasi hasil evaluasi RKP (hingga TW IV) dengan Kemenko dan KL Pelaksana RKP		↓	↓					
19	Memerintahkan kasubdit dan JFP/Staf untuk mempersiapkan rapat koordinasi hasil evaluasi RKP (hingga TW IV) dengan Kemenko dan KL Pelaksana RKP			↓	↓				
20	Menyiapkan rapat koordinasi hasil evaluasi RKP (hingga TW IV) dengan Kemenko dan KL Pelaksana RKP				↓	↓			

NO	AKTIVITAS	Menteri	Deputi	Direktur PEPPS	Kasubdit	JFP/Staf	Direktur Sektor Bappenas	Kemenko	KL
21	Melaporkan bahan rapat koordinasi evaluasi RKP kepada Direktur								
22	Melaporkan bahan rapat koordinasi hasil evaluasi RKP (hingga TW IV) kepada Deputi, sekaligus menyiapkan undangan rapat koordinasi								
23	Mengirimkan undangan rapat koordinasi evaluasi RKP kepada Sekjen/Sestama Kemenko dan KL Pelaksana RKP								
24	Menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi PEPP Bappenas								
25	Memerintahkan direktur untuk menindaklanjuti hasil pembahasan evaluasi RKP bersama KL Pelaksana								
26	Menugaskan Kasubdit dan JFP/Staf untuk memutakhirkan laporan akhir evaluasi RKP (hingga TW IV) dengan mengakomodir hasil pembahasan dengan KL Pelaksana								
27	Memutakhirkan laporan akhir evaluasi RKP (hingga TW IV)								
28	Melaporkan draft laporan evaluasi RKP kepada Direktur								
29	Mengkoreksi dan memerintahkan Kasubdit dan JFP/Staf untuk memutakhirkan draft laporan evaluasi RKP								
30	Melaporkan draft laporan evaluasi RKP (hingga TW IV) kepada Direktur								
31	Melaporkan laporan evaluasi RKP (hingga TW IV) kepada Deputi								
32	Melaporkan laporan evaluasi RKP (hingga TW IV) kepada Menteri pada saat Rapim								
33	Memerintahkan Deputi untuk menyelesaikan laporan evaluasi RKP (hingga TW IV) sekaligus menjadi bahan penulisan RKP tahun selanjutnya								
34	Memerintahkan Direktur untuk menyelesaikan laporan evaluasi RKP (hingga TW IV) sekaligus menjadi bahan penulisan RKP tahun selanjutnya								
35	Menyelesaikan laporan akhir evaluasi RKP (hingga TW IV) dan menulis subbab evaluasi pada RKP tahun selanjutnya, serta mendokumentasikan laporan								

Lampiran 2.

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Tabel L.2.1
Pencapaian Sasaran PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PN 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar				99,73
1. Meningkatnya kualitas SDM				
Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,98	71,39	71,39	Tidak Tercapai
2. Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan				
Tingkat kemiskinan (persen)	8,50-9,50	9,41	9,22	Tercapai
3. Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan				
Rasio gini (nilai)	0,380-0,385	0,382	0,380	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.2.2.
Pencapaian Sasaran PP pada
PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan				94,01
1. Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah				
Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)	97,0	95,48	98,17	Tercapai
2. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB				
Kontribusi UMK dan koperasi terhadap PDB (%)	58,8	57,24	N/A*	Tidak dapat diberikan notifikasi
3. Meningkatnya perlindungan finansial				
Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (%)	95	82,52	83,61	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat				87,38
1. Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat				
a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	271	243	243	Tercapai
b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	21	21,7	21,7	Tidak Tercapai
c. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,28	2,45	2,45	Tidak Tercapai
d. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)				
- Semua cara	66,0	58,71	58,71	Tidak Tercapai
- Cara modern (mCPR)	61,3	54,97	54,97	Tidak Tercapai
e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta) (%)	28	28	28	Tercapai
f. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	17	16,29	16,29	Tercapai
2. Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat				
a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%)	5,4	9,1	9,1	Tidak Tercapai
b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	23,4	34,1	34,1	Tidak Tercapai
c. Prevalensi HIV (%)	<0,5	0,32	0,32	Tercapai
d. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	245	245	245	Tercapai
e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria (kab/kota)	300	285	285	Tidak Tercapai
PP 3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas				91,56
1. Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat				
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	39,60	35,57	35,57	Tidak Tercapai
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	114,09	107,46	107,46	Tidak Tercapai
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	94,78	97,64	97,64	Tercapai
d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	106,94	90,57	90,57	Tidak Tercapai
e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	82,02	79,40	79,40	Tidak Tercapai
f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63	83,98	83,98	Tidak Tercapai
g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ sederajat	67,48	60,84	60,84	Tidak Tercapai
h. Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	36,73	30,20	30,20	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
2. Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat				
a. Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B (%)	17,2	76,59	76,59	Tercapai
b. Persentase SD/MI/ sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	84,2	82,57	82,57	Tidak Tercapai
c. Persentase SMP/MTs/ sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	81,0	76,81	76,81	Tidak Tercapai
d. Persentase SMA/SMK/MA/ sederajat yang berakreditasi minimal B (%)	84,6	72,38	72,38	Tidak Tercapai
e. Persentase Prodi PT yang berakreditasi minimal B (%)	68,4	53,9	56,28	Tidak Tercapai
PP 4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak				100
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak				
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%)	35,6	54,1**	56,1**	Tercapai
PP 5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar				55,00
1. Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) di daerah				
a. Persentase daerah yang memanfaatkan BDT untuk penargetan program penanggulangan kemiskinan (%)	100	35,8	50	Tidak Tercapai
b. Persentase daerah yang melakukan verifikasi dan validasi BDT (%)	100	12,8	15	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) di daerah				
Persentase capaian target indikator SPM di daerah (%)	90	82,41	100	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan: *belum dapat dihitung; **Susenas KOR 2019, diolah Bappenas

Tabel L.2.3.
Pencapaian Sasaran KP pada
PN 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan
dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan				
KP 1. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran				92,22
1. Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial				
a. Tersalurkannya PKH bagi 10 juta KPM, dengan kenaikan indeks kondisionalitas bantuan (KPM)	10.000.000	9.555.672	9.841.270	Tidak Tercapai
b. Tersalurkannya Bantuan Pangan Nontunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota (KPM)	15.600.000	13.799.298	15.020.323	Tidak Tercapai
c. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sebanyak 17.927.308 siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK (siswa miskin)	17.927.308	11.504.000	18.398.469	Tercapai
d. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui KIP kepada sebanyak 2.203.285 siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/Wustha /Ulya/SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK (siswa miskin)	2.203.285	1.374.965	2.177.636	Tidak Tercapai
e. Tersalurkannya subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan tidak mampu sesuai dengan data terpadu (RT/RTM)	23.170.000 (450 VA) 6.540.000 (900 VA)	23,67 juta (450VA-RT) 7,04 juta (900 VA-RT) 22,09 juta (900 VA-RTM)	23,78 juta (450VA-RT) 7,23 juta (900 VA-RT) 22,33 juta (900 VA-RTM)	Tercapai
f. Tersalurkannya subsidi elpiji 3 kg kepada 27,04 juta kepala keluarga (KK)	27.040.000	13.840.000	14.070.000	Tidak Tercapai
g. Terlaksananya penarikan pekerja anak PKH dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) sebesar 8000 pekerja anak (anak)	8.000	7.500	8.000	Tercapai
KP 2. Penguatan Sistem Jaminan Sosial				66,75
1. Meningkatnya persentase penduduk dan pekerja berpendapatan 40 persen terbawah yang tercakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan				
a. Tersalurkannya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta jiwa dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah (jiwa)	96.800.000	94.147.942	96.516.666	Tidak Tercapai
b. Tercapainya 10 persen pekerja dari 40 persen ekonomi terbawah yang	10	3,38	3,38	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
tercakup Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (%)				
KP 3. Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)				99,51
1. Meningkatnya jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang bermitra				
a. Petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya sebanyak 114.500 orang (orang)	114.500	64.122	116.934	Tercapai
b. Petani, nelayan, dan UMKM yang terlibat dalam kemitraan sebanyak 2.632 orang (orang)	2.632	2.578	2.593	Tidak Tercapai
c. Kelompok/lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya untuk terlibat pada kemitraan sebanyak 500 kelompok/ lembaga (kelompok/lembaga)	500	450	500	Tercapai
KP 4. Pelaksanaan Reforma Agraria				97,27
1. Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani				
a. Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 340.039 hektar (ha)	340.039	347.090	349.973	Tercapai
b. Terlaksananya redistribusi tanah sebesar 750 ribu bidang (600 ribu hektar)	750.000	126.115 Bidang (87.618 Ha)	668.040 Bidang (828.210 Ha)	Tidak Tercapai
c. Terlaksananya legalisasi aset tanah sebanyak 6,27 juta bidang (5,02 juta hektar)	6.270.000	5.010.781 Bidang (1.137.776 Ha)	6.425.946 Bidang (1.778.458 Ha)	Tercapai
d. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bagi penerima TORA sebanyak 176 kelompok masyarakat (kelompok)	176	61	180	Tercapai
KP 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial				100
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari				
a. Terkelolanya hutan oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), HutanTanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan seluas 1 juta ha (ha)	1.000.000	962.138,69	1.588.954,91	Tercapai
b. Meningkatnya jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 1500 kelompok (kelompok)	1500	1.066	1.695	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat				
KP 1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi				89,03
1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi				
a. Tercapainya persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85 persen (%)	85	51,37	75,24	Tidak Tercapai
b. Tercapainya kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 90 persen (%)	90	50,86	76,01	Tidak Tercapai
c. Tercapainya kunjungan antenatal (K4) sebesar 80 persen (%)	80	50,67	74,42	Tidak Tercapai
d. Tercapainya 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota (%)	95	48,6	77,5	Tidak Tercapai
e. Tersalurkannya alat dan obat kontrasepsi di 18.786 fasilitas kesehatan (fasilitas)	18.786	5280	18.331	Tidak Tercapai
KP 2. Percepatan Penurunan Stunting				17,67
1. Tercapainya upaya percepatan penurunan stunting				
a. Terlaksananya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan sebesar 50 persen (%)	50	38,22	14,10	Tidak Tercapai
b. Tersalurkannya tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 98 persen (%)	98	41,03	7,00	Tidak Tercapai
KP 3. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit				94,18
1. Tercapainya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit				
a. Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50 persen sekolah pada 50 persen kabupaten/kota (%)	50	48,2	50,20	Tercapai
b. Terlaksananya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu pada 50 persen Puskesmas (%)	50	76,4	80,52	Tercapai
c. Terehabilitasinya 950 orang dengan HIV (orang)	950	750	750	Tidak Tercapai
d. Tercapainya pencegahan penyakit menular di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim sebanyak 1.700 orang (perusahaan/orang)	250 (perusahaan) 1.700 (orang)	248 (perusahaan) 1.692 (orang)	248 (perusahaan) 1.692 (orang)	Tidak Tercapai
e. Tercapainya pengobatan pada 55 persen kasus HIV (%)	55	52,8	55,61	Tercapai
f. Tercapainya angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis paru BTA positif (<i>Success Rate</i>) minimal 85 persen pada 90 persen kabupaten/kota (%)	90	61	81	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
g. Tercapainya eliminasi kusta di 34 provinsi (provinsi)	34	25	25	Tidak Tercapai
h. Tercapainya Kabupaten/kota dengan API < 1/1000 penduduk sebanyak 400 kabupaten/kota (kab/kota)	400	453	453	Tercapai
i. Tercapainya eliminasi filariasis di 35 kabupaten/kota (kab/kota)	35	38	56	Tercapai
j. Terlaksananya intervensi eliminasi schistosomiasis di 2 kabupaten/kota (kab/kota)	2	2	2	Tercapai
KP4. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				96,02
1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan				
a. Tercapainya kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 5.600 kecamatan (kecamatan)	5.600	5.517	6.176	Tercapai
b. Tercapainya kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 481 kabupaten/kota (kab/kota)	481	474	486	Tercapai
c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas (puskesmas)	5.600	4.339	4.485	Tidak Tercapai
d. Tercapainya RSUD kabupaten/kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis sebesar 60 persen (%)	60	61,63	62,00	Tercapai
e. Tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90 persen (%)	90	93,63	96,34	Tercapai
KP5. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan				90,67
1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan				
a. Tercapainya obat yang memenuhi syarat sebesar 94,0 persen (%)	94	98,07	97,73	Tercapai
b. Tercapainya makanan yang memenuhi syarat sebesar 90,1 persen (%)	90,1	85,45	73,28	Tidak Tercapai
PP3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas				
KP1. Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata				90,23
1. Tersedianya pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata				
a. Tercapainya nilai rata-rata kompetensi pendidik sebesar 8,0 (nilai)	80	76,62	76,62	Tidak Tercapai
b. Tercapainya nilai rata-rata kinerja pendidik sebesar 82,40 (nilai)	82,40	82,72	82,72	Tercapai
c. Tercapainya Rasio Guru: Siswa yakni 1:32 pada jenjang SD/MI/Sederajat	1:32 (dasar)	1 : 17 (dasar)	1 : 17 (dasar)	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
dan 1:36 pada jenjang SMP/MTs/SMA/SMK/MA/Sederajat (rasio)	1:36 (menengah)	1: 16 (menengah)	1 : 16 (menengah)	
d. Tercapainya tingkat kehadiran guru sebesar 92,2 persen (%)	92,2	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
e. Tercapainya dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 11.148 orang (orang)	11.148	10.012	10.012	Tidak Tercapai
KP2. Penyediaan Afirmasi Pendidikan				93,88
1. Meningkatnya APK Pendidikan di daerah				
a. Tercapainya APK PAUD daerah 3T sebesar 22,27 persen (%)	22,27	29,01	29,01	Tercapai
b. Tercapainya APK SD/MI/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 112,83 persen (%)	112,83	108,75	108,75	Tidak Tercapai
c. Tercapainya APK SMP/MTs/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 91,09 persen (%)	91,09	87,23	87,23	Tidak Tercapai
d. Tercapainya APK SMA/SMK/MA/ Sederajat di Daerah 3T sebesar 89,91 persen (%)	89,91	69,48	69,48	Tidak Tercapai
e. Tercapainya APK PT di luar Jawa sebesar 21,92 persen (%)	21,92	32,59	32,59	Tercapai
KP3. Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan				88,45
1. Meningkatnya PAUD, sekolah/madrasah/ sederajat, dan prodi pendidikan tinggi yang terakreditasi minimal B				
a. Tercapainya lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B sebesar 89,9 persen (%)	89,9	76,59	76,59	Tidak Tercapai
b. Tercapainya SD/MI/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 83,9 persen (%)	83,9	82,57	82,57	Tidak Tercapai
c. Tercapainya SMP/MTs/Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 82,1 persen (%)	82,1	76,81	76,81	Tidak Tercapai
d. Tercapainya SMA/SMK/MA/ Sederajat yang terakreditasi minimal B sebesar 87,4 persen (%)	87,4	72,38	72,38	Tidak Tercapai
e. Tercapainya Prodi PT yang terakreditasi minimal B sebesar 68,4 persen (%)	68,4	53,9	56,28	Tidak Tercapai
KP4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik				100
1. Meningkatnya sekolah/madrasah/sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa				
a. Terlaksananya penerapan Kurikulum 2013 di sekolah/madrasah/sederajat sebesar 100 persen (%)	100	100	100	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Tercapainya rata-rata nilai sikap siswa minimal baik (nilai)	Baik	baik	baik	Tercapai
KP5. Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan				100
1. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan				
a. Tersedianya 35 jenis literasi khusus bagi penyandang disabilitas (jenis)	35	33	35	Tercapai
b. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan masyarakat sebanyak 2,2 juta orang (orang)	2.200.000	2.266.630	2.266.630	Tercapai
c. Perpustakaan umum yang memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial sebanyak 300 unit perpustakaan (perpustakaan)	300	300	300	Tercapai
PP4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak				
KP1. Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau				88,58
1. Meningkatnya penyediaan hunian layak dan terjangkau				
a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 27.298 rumah tangga MBR (RT)	27.298	N/A	13.041	Tidak Tercapai
b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 198.500 rumah tangga MBR (Kemen PUPR) dan 14.000 keluarga miskin (Kemensos) (RT)	198.500 (MBR) 14.000 (keluarga miskin)	N/A	236.234 (MBR) 18.000 (keluarga miskin)	Tercapai
c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 182.858 rumah tangga (diluar Tapera) (RT)	182.858	N/A	182.794	Tidak Tercapai
d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 3.805 Ha (Ha)	3.805	N/A	8.815	Tercapai
e. Terfasilitasinya permukiman bagi 2.099 kepala keluarga dari warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) (KK)	2.099	N/A	1.997	Tidak Tercapai
KP2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak				83,36
1. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak				
a. Tersedianya akses air minum bagi 100 persen rumah tangga (%)	100	87,75*	89,27*	Tidak Tercapai
b. Tersedianya akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) untuk 100 persen rumah tangga, yang terdiri dari 85 persen akses layak dan 15 persen akses dasar (%)	100	74,58 akses layak (termasuk 7,42% akses aman)*	77,44 akses layak (termasuk 7,5% akses aman)*	Tidak Tercapai
KP3. Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman				100
1. Meningkatnya kualitas lingkungan di permukiman				

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
a. Terpuhikannya lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 sebesar 100.000 ton (ton)	100.000	525.532	773.601,59	Tercapai
b. Tertanganinya timbulan sampah (ton)	14.000.000	0	14.000.000	Tercapai
PP 5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar				
KP1. Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu				86,00
1. Menguatnya tata kelola layanan terpadu				
a. Terlaksananya verifikasi validasi data terhadap penduduk miskin dan rentan di 400 kabupaten/kota (kab/kota)	400	100	120	Tidak Tercapai
b. Terbangunnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di 150 kabupaten/kota dan 300 desa Puskesmas (kab/kota/desa)	150 (kabupaten/ kota) 300 (desa)	150 (kabupaten/ kota) 300 (desa)	150 (kabupaten/ kota) 300 (desa)	Tercapai
c. Terlaksananya layanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di 22 kabupaten/kota (kab/kota)	22	11	22	Tercapai
d. Terlaksananya Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi 32.500 pendamping (pendamping)	32.500	24.375	32.500	Tercapai
e. Terlaksananya akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial bagi 3.000 lembaga (lembaga)	3.000	2.500	3.000	Tercapai
KP2. Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				100
1. Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk layanan dasar				
a. Tercapainya cakupan penduduk yang telah memiliki NIK sebanyak 100 persen (%)	100	100	100	Tercapai
b. Tercapainya cakupan anak usia 0-17 tahun yang memperoleh akta kelahiran sebanyak 90 persen (%)	90	90,73	91	Tercapai
c. Terlaksananya sinkronisasi data kependudukan untuk layanan publik di 40 K/L (K/L)	40	46	49	Tercapai
d. Tercapainya 7.000 penyandang disabilitas dan 1.000 lanjut usia telantar yang memperoleh akses terhadap dokumen kependudukan	7.000 disabilitas 1.000 lansia	7.000 disabilitas 1.000 lansia	7.000 disabilitas 1.000 lansia	Tercapai
KP3. Percepatan Pencapaian SPM di Daerah				75,42
1. Mempercepat penerapan SPM di daerah (provinsi/kabupaten/kota)				

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
a. Terimplementasikannya SPM di 34 provinsi (provinsi)	34 provinsi, 508 kabupaten/ kota	34	538 daerah*** (34 provinsi, 411 kabupaten, 93 kota)	Tidak Tercapai
b. Tersusunnya regulasi daerah terkait penerapan dan penataan kelembagaan SPM di 34 provinsi (provinsi)	34 provinsi, 508 kabupaten/ kota	N/A	158 daerah**** (26 provinsi, 108 kabupaten, 24 kota)	Tidak Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan

- *) Susenas KOR 2018, diolah Bappenas
- ***) Susenas KOR 2019, diolah Bappenas
- ***) Capaian merupakan jumlah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah memberikan laporan LPPD (urusan wajib bidang pelayanan dasar/SPM) berdasarkan regulasi PP 65/2005. Sementara perhitungan capaian SPM berdasarkan PP 2/2018 baru bisa dilaksanakan pada tahun 2020;
- ****) Capaian merupakan jumlah daerah yang telah membentuk Tim Penerapan SPM di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Lampiran 3.

Prioritas Nasional 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Tabel L.3.1.
Pencapaian Sasaran PN 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PN 2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman				90,64
1. Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal				
Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	15,0 – 15,5	16,9	17,06	Tercapai
2. Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	6,9 – 7,1	5,14	5,01	Tidak Tercapai
3. Meningkatnya perdagangan antardaerah				
Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	19,2	N/A	23,2	Tercapai
4. Meningkatnya indeks pembangunan TIK				
<i>ICT Development Index</i> (nilai)	4,9 – 5,2	4,99	4,99 (capaian 2018)	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan:

*) capaian tahun 2019 belum dapat diperkirakan

Tabel L.3.2.
Pencapaian Sasaran PP pada PN 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Peningkatan Konektivitas dan TIK				99,21
1. Meningkatnya Pembangunan Konektivitas dan TIK				
a. Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	3 – 4	3 – 4	3 – 4	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%)	88	85	85	Tidak Tercapai
c. Persentase kondisi mantap jalan (%)	94	92	92	Tidak Tercapai
d. Persentase penurunan rasio fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan dari kondisi <i>baseline</i> (%)	50	53	53	Tercapai
e. Persentase tingkat pangsa pasar angkutan umum (%)	32	32	32	Tercapai
2. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan Wilayah				
a. Cakupan layanan akses pitalebar di daerah nonkomersil (%)	100	100	100	Tercapai
b. Persentase kab/kota yang terlayani akses telekomunikasi universal di 514 kab/kota (%)	100	100	100	Tercapai
PP 2. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat				86,07
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
a. Papua (nilai)	60,3	60,06	60,84	Tercapai
b. Papua Barat (nilai)	63,9	63,74	64,70	Tercapai
2. Persentase buta aksara (15 s.d 59 tahun)				
a. Papua (%)	26,8	27,41	21,9	Tidak Tercapai
b. Papua Barat (%)	1,4	1,52	1,53	Tercapai
3. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan				
a. Papua (%)	26,0	26,55	26,55	Tercapai
b. Papua Barat (%)	21,7	21,51	21,51	Tidak Tercapai
4. Pertumbuhan Ekonomi				
a. Papua (%)	7,4	-15,11	-15,72	Tidak Tercapai
b. Papua Barat (%)	5,8	2,96	8,27	Tercapai
PP 3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa				98,92
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan				
Persentase penduduk miskin di perdesaan (%)	13	12,85	12,60	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya pengeluaran per kapita di daerah tertinggal				

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
Rata-rata pengeluaran per kapita di daerah tertinggal (Rp. juta)	7,85	7,68	7,68	Tidak Tercapai
PP 4. Penanggulangan Bencana				100
1. Menurunnya indeks risiko bencana nasional				
Rata-rata indeks risiko bencana nasional (nilai)	132,8	135,8	130,4	Tercapai
2. Menurunnya indeks risiko bencana kabupaten/kota PN				
Rata-rata indeks risiko bencana 136 kab/kota prioritas (nilai)	144	146,3	143,9	Tercapai
PP 5. Peningkatan Sistem Logistik				87,72
1. Menurunnya biaya logistik, memperlancar arus barang, dan meningkatkan pelayanan logistik				
a. Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	19,2	N/A	23,2	Tercapai
b. Skor <i>Logistic Performance Index</i> (LPI)	3,22	N/A	3,1	Tidak Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.3.3.
Pencapaian Sasaran KP pada
PN 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Peningkatan Konektivitas dan TIK				
KP 1. Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut				100
1. Terselenggaranya pengembangan pelabuhan serta subsidi angkutan tol laut				
a. Jumlah pelabuhan utama tol laut yang dikembangkan sebanyak 24 pelabuhan (pelabuhan)	24	24	24	Tercapai
b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 27 pelabuhan (pelabuhan)	27	27	27	Tercapai
c. Jumlah subsidi angkutan tol laut yang disediakan sebanyak 21 rute (rute)	21	21	21	Tercapai
d. Jumlah rute subsidi perintis angkutan laut yang disediakan sebanyak 113 rute (rute)	113	113	113	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 2. Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan				93,96
1. Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi multimoda dan perkotaan				
a. Panjang jalan baru yang terbangun 553 km (km)	553	183,39	456,43	Tidak Tercapai
b. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan dioperasikan 566 km (km)	566	202,23	515,89	Tidak Tercapai
c. Panjang jalur KA yang terbangun 389 km'sp (km'sp)	389	133,63	281,56	Tidak Tercapai
d. Jumlah subsidi angkutan KA di 7 lintas yang tersedia (lintas)	7	7	7	Tercapai
e. Jumlah dermaga sungai, danau dan penyeberangan yang terbangun sebanyak 14 dermaga (dermaga)	14	12	14	Tercapai
f. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis yang tersedia sebanyak 230 rute (rute)	230	229	229	Tidak Tercapai
g. Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang tersedia sebanyak 300 trayek (trayek)	300	307	310	Tercapai
h. Jumlah terminal tipe A yang terbangun sebanyak 6 terminal (terminal)	6	7	7	Tercapai
i. Jumlah layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota (kota)	25	34	34	Tercapai
KP 3. Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi				100
1. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara				
a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 4 bandara (bandara)	4	5	5	Tercapai
b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 6 bandara (bandara)	6	6	6	Tercapai
c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 232 rute (rute)	232	232	232	Tercapai
KP 4. Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi				100

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
1. Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi				
a. Jumlah <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran yang dibangun sebanyak 1 paket di jalur pelayaran (paket)	1	1	1	Tercapai
b. Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang tersedia di 33 provinsi (provinsi)	33	33	33	Tercapai
c. Jumlah helikopter SAR sebanyak 2 unit dan <i>rescue boat</i> sebanyak 2 unit (unit)	2 2	2 (helikopter SAR) 2 (<i>rescue boat</i>)	2 (helikopter SAR) 2 (<i>rescue boat</i>)	Tercapai
KP 5. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK				89,37
1. Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menjangkau 514 kabupaten/kota				
a. Jumlah tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel (350MHz kumulatif) sebesar 100 persen (persen)	100	156	156	Tercapai
b. Jumlah BTS yang dibangun di daerah nonkomersil (3T dan desa tertinggal non-3T) sebanyak 1.000 lokasi (lokasi)	1000	160	345	Tidak Tercapai
c. Jumlah penyediaan akses internet yang dibangun di daerah (3T dan desa tertinggal non-3T) sebanyak 1.000 lokasi (lokasi)	1000	1.063	2.947	Tercapai
d. Persentase penyediaan satelit multifungsi sebesar 30 persen (%)	30	30	30	Tercapai
e. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 90 persen (%)	90	90	90	Tercapai
f. Persentase jangkauan siaran LPP TVRI terhadap populasi sebesar 88 persen (%)	88	68	63	Tidak Tercapai
g. Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 10 lokasi (lokasi)	10	10	10	Tercapai
h. Fasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar pada 500 lokasi (<i>home connected</i>) (lokasi)	500	576	491	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
i. Tersedianya peta sebaran infrastruktur telekomunikasi berbasis Sistem Informasi Geospasial (%)	100	100	100	Tercapai
PP 2. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat				
KP 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan				86,10
1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan				
a. Meningkatnya layanan persalinan di fasilitas kesehatan dengan kegiatan penyediaan rumah tunggu kelahiran sebanyak minimal 1 unit untuk sekitar RS rujukan, pelatihan dan pendampingan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (unit)	1	1	1	Tercapai
b. Menurunnya kejadian penyakit (eliminasi malaria, beroperasinya malaria center 3 unit di Papua dan 3 unit di Papua Barat), pencegahan, deteksi dini, dan penemuan kasus kusta di 17 kab/kota, HIV /AIDS di 5 kab /kota, ISPA di 5 kab/kota, filariasis di 17 kab/kota, dan frambusia di seluruh kab/kota (layanan)	<p>i. Malaria center 3 unit di Papua dan 3 unit di Papua Barat),</p> <p>ii.pencegahan, deteksi dini, dan penemuan kasus kusta di 17 kab/kota, dan filariasis di 5 kab/kota, dan frambusia di seluruh kab/kota (layanan)</p>	<p>i. Malaria center 5 unit di Papua dan 0 unit di Papua Barat, kusta di 42 kab/kota, HIV/AIDS di 8 Kab/Kota, ISPA 5 kab/kota, filariasis 28 kab/kota, frambusia 28 kab/kota</p> <p>iii.HIV/AIDS di 5 kab/kota, dan filariasis di 17 kab/kota, dan frambusia di seluruh kab/kota (layanan)</p>	<p>i. Malaria center 5 unit di Papua dan 0 unit di Papua Barat, kusta di 42 kab/kota, HIV/AIDS di 8 Kab/Kota, ISPA 5 kab/kota, filariasis 28 kab/kota, frambusia 28 kab/kota</p> <p>ii. kusta di 42 kab/kota, HIV/AIDS di 8 Kab/Kota, ISPA 5 kab/kota, filariasis 28 kab/kota, frambusia 28 kab/kota</p>	Tidak Tercapai
c. Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis: Nusantara Sehat 144 orang (100 orang di Papua dan 44 orang di Papua Barat), wajib kerja dokter spesialis 50 orang (40 orang di Papua dan 10 orang di Papua Barat) dan tenaga kesehatan individu 65 orang (orang)	<p>i. Nusantara Sehat 144 orang (100 orang di Papua dan 44 orang di Papua Barat),</p> <p>ii. wajib kerja dokter spesialis 50 orang (40 orang di</p>	<p>i. Nusantara Sehat 45 orang (40 orang di Papua dan 5 orang di Papua Barat),</p> <p>ii. Wajib kerja dokter spesialis 6 orang (5 orang di</p>	<p>i. Nusantara Sehat 49 orang (44 orang di Papua dan 5 orang di Papua Barat),</p> <p>ii. Wajib kerja dokter spesialis 12 orang (11 orang di</p>	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
	Papua dan 10 orang di Papua Barat) dan ii. tenaga kesehatan individu 65 orang	Papua dan 1 orang di Papua Barat), dan iii. tenaga kesehatan individu 55 orang	Papua dan 1 orang di Papua Barat), dan tenaga kesehatan individu 61 orang	
d. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan: pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan tersedianya <i>flying healthcare</i> dan dokter terampung di 4 kabupaten, RS Pratama di 4 kabupaten Papua dan 2 kabupaten Papua Barat, RS rujukan regional di 4 kabupaten Papua, RS vertikal di Jayapura (kab/kota)	i. <i>Flying healthcare</i> dan dokter terampung di 4 kab, ii. RS Pratama di 4 kab Papua dan 2 kab Papua Barat, iii. RS rujukan regional di 4 kab Papua, v. RS vertikal di Jayapura	i. <i>Flying healthcare</i> dan dokter terampung di 4 kab, ii. RS pratama 1 kab di Papua dan 2 kab Papua Barat, iii. RS rujukan regional di 5 kab Papua, iv. RS Vertikal di Jayapura.	i. <i>Flying healthcare</i> dan dokter terampung di 4 kab, ii. RS pratama 1 kab di Papua dan 2 kab Papua Barat, ii. RS rujukan regional di 5 kab Papua, v. RS Vertikal di Jayapura.	Tidak Tercapai
e. Tersedianya pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (<i>telemedicine</i>) di 4 RSUD dan 50 Puskesmas di Papua; 2 RSUD dan 20 Puskesmas di Papua Barat (fasyankes)	Pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis TIK (<i>telemedicine</i>) di 4 RSUD dan 50 Puskesmas di Papua; 2 RSUD dan 20 Puskesmas di Papua Barat (fasyankes)	i. 4 RSUD dan 50 Puskesmas di Papua ii. 1 RSUD dan 20 Puskesmas di Papua Barat	i. 4 RSUD dan 50 Puskesmas di Papua ii. 1 RSUD dan 20 Puskesmas di Papua Barat	Tidak Tercapai
f. Terlaksananya aktivitas fisik gerakan masyarakat hidup sehat di 4 kabupaten/kota (kab/kota)	4	4	4	Tercapai
g. Meningkatnya jumlah penerima PKH sebanyak 79.834 orang anak (53.274 di Papua dan 26.560 di Papua Barat) (orang)	53.274 Papua 26.560 Papua Barat	62.651	71.964 orang (39.165 Papua, 32.799 Papua Barat)	Tidak Tercapai
KP 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua				97,37
1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua				
a. Terbangunnya 7 sekolah berpola asrama dengan kurikulum kontekstual Papua untuk SMP dan SMA (kab/kota)	7	5 (SMP) 2 (SMA)	5 (SMP) 2 (SMA)	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Terlaksananya pendampingan proposal pendirian 3 SMK dan pengembangan 5 SMK dibidang pertanian, perikanan, dan pariwisata (kab/kota)	3 5	2 (USB SMK)	2 (USB SMK) 50 (SMK)	Tidak Tercapai
c. Diterapkannya 4 model kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah di SD, SMP, SMA, SMK (kab/kota)	4	2	2	Tidak Tercapai
d. Terpenuhinya kebutuhan guru di masing-masing sekolah		N/A	44.712	Tercapai
e. Meningkatnya kapasitas guru melalui pelatihan kurikulum K13 bagi guru di 1.000 sekolah dan tersalurkannya bantuan peningkatan kompetensi GTK PAUD sebanyak 8 paket (persen)	100	100	100	Tercapai
f. Terlaksananya program afirmasi pendidikan menengah (ADEM) untuk 649 orang Papua (400 siswa baru), 254 orang Papua Barat (150 siswa baru), dan afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) 1.100 orang (725 orang mahasiswa Papua dan 375 orang mahasiswa Papua Barat) (% progres)	100	99,0	99,0	Tidak Tercapai
g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan satuan pendidikan nonformal lainnya (9.000 orang mengikuti program keaksaraan dasar dan 3.780 orang mengikuti BOP keaksaraan usaha mandiri) serta terlaksananya pengajaran baca tulis untuk pemberantasan buta aksara melalui KKN Tematik kepada 750 masyarakat Papua dan Papua Barat dengan mengerahkan mahasiswa (% progres)	100 100	96,5 (PKBM) 90 (KKN tematik)	96,5 (PKBM) 90,0 (KKN tematik)	Tidak Tercapai
h. Terdistribusikannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) 100 persen bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA, SMK di Papua dan Papua Barat (persen)	100	N/A	86,70	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 3. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir				89,48
1. Berkembangnya komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilirdi Papua dan Papua Barat				
a. Meningkatnya produksi padi di lahan seluas 10.880 hektar (ha)	10.880	6.747	10.880	Tercapai
b. Tersedianya 6 unit pengolahan komoditas sagu (unit)	6	5	6	Tercapai
c. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1000 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 540 hektar; dan pala seluas 300 hektar	1000 270 540 300	1.100 (ubi jalar) 270 (kopi) 370 (kakao) 300 (pala)	1.100 (ubi jalar) 270 (kopi) 370 (kakao) 300 (pala)	Tidak Tercapai
d. Terlaksananya optimalisasi reproduksi untuk 3.350 akseptor ternak di Papua dan 1.800 akseptor ternak di Papua Barat (aksptor ternak)	3.350 Papua 1.800 Papua Barat	1.400 (Papua) 700 (Papua Barat)	2.084 (Papua) 1.050 (Papua Barat)	Tidak Tercapai
e. Sentra Kelautan Perikanan Terpau (SKPT) sebanyak 3 unit (lokasi)	3	3	3	Tercapai
f. Berkembangnya daerah pariwisata bahari (kab/kota)	Daerah berkembang	5	5	Tercapai
g. Tersedianya bantuan modal usaha untuk 10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10	53	53	Tercapai
KP 4. Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK dan Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung				67,28
1. Meningkatnya infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung				
a. Peningkatan rumah swadaya 10.500 unit dan pembangunan rumah khusus 650 unit (unit)	10.500 650	8.500 unit (swadaya) 240 unit (khusus)	10.952 unit (swadaya) 340 unit (khusus)	Tidak Tercapai
b. Terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) di 2 kabupaten/kota (kab/kota)	2	7 Kab/Kota meliputi kegiatan Pembangunan, Pengembangan Jaringan, dan Optimalisasi SPAM	7 Kab/Kota meliputi kegiatan Pembangunan SPAM, Pengembangan Jaringan SPAM, dan Optimalisasi SPAM (progres fisik 100%)	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
c. Terbangunnya sistem pengolahan air limbah permukaan (SPAL) di 10 Kabupaten dan terbangunnya sistem pengelolaan drainase di 1 Kota	SPAL 10 Drainase 1	i. SPAL : 1 Kabupaten ii. Drainase : 0 kota	i. SPAL : 1 Kabupaten ii. Drainase : 0 kota	Tidak Tercapai
d. Terbangunnya PLTS terpusat/komunal <i>Off Grid</i> di 12 Kabupaten, PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI di 126 pos jaga , 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, 3 unit PLTMG, dan LTSHE sebanyak 25.000 unit	PLTS terpusat/komunal <i>Off Grid</i> di 12 Kabupaten, PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI di 126 pos jaga , 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, 3 unit PLTMG, dan LTSHE sebanyak 25.000 unit	i. PLTS terpusat/komunal <i>Off Grid</i> : 0 unit ii. PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI : 0 pos iii. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro : 0 unit iv. PLTMG : 1 unit v. LTSHE : 7900 unit	i. PLTS terpusat/komunal <i>Off Grid</i> : 0 unit ii. PLTS Pos Jaga Batas Negara TNI : 0 pos iii. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro : 1 unit iv. PLTMG : 1 unit v. LTSHE : 17.184 unit	Tidak Tercapai
e. terselesaikannya ruas jalan trans papua sepanjang 143 km (km)	143	63,46	126,45	Tidak Tercapai
f. Tersedianya akses internet untuk mendukung kesehatan dan pendidikan (unit)	Tersedia	Belum tersedia akses internet untuk mendukung kesehatan dan pendidikan	Telah tersedia akses internet untuk mendukung kesehatan dan pendidikan	Tercapai
g. Terbangunnya menara BTS di 4 kabupaten, BTS di daerah <i>blank spot</i> 3T di 6 kabupaten dan akses <i>broadband</i> internet di 4 kabupaten (unit)	Menara BTS di 4 kabupaten; BTS di daerah <i>blank spot</i> 3T di 6 kabupaten; akses <i>broadband</i> internet di 4 kabupaten	i. BTS (non-3T): 1 kabupaten ii. BTS di daerah <i>blankspot</i> 3T : 7 kabupaten iii. Akses <i>broadband</i> internet : 0 kabupaten	i. BTS (non-3T): 1 kabupaten ii. BTS di daerah <i>blankspot</i> 3T : 12 kabupaten iii. Akses <i>broadband</i> internet : 36 kabupaten	Tidak Tercapai
KP 5. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan				61,24
1. Meningkatkan kualitas kebijakan/regulasi dan pelaksanaan otonomi khusus				
a. Terfasilitasinya penyelesaian 2 perdasi dan perdusus	2	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
b. Terlaksananya 5 forum kegiatan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan (forum)	5	2	2	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
c. Tercapainya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di 7 wilayah adat (%)	100	43,72	43,72	Tidak Tercapai
d. Terlaksananya kebijakan diplomasi melalui training dan fasilitasi tenaga ahli	Terlaksana	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
e. Terlaksananya layanan penanganan pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan sebanyak 182 kasus (kasus)	182	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
f. Diterapkannya standar pelayanan publik pada 43 pemda	43	44	44	Tercapai
PP 3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa				
KP 1. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan				95,50
1. Terlaksananya pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan				
a. Jumlah kabupaten tertinggal terentaskan sebanyak 80 kabupaten (kab)	80	62	62	Tidak Tercapai
b. Jumlah pos lintas batas negara (PLBN) yang terbangun sarana dan prasarana pendukungnya sebanyak 7 PLBN (PLBN)	7	7	7	Tercapai
c. Jumlah pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) yang dikembangkan sebanyak 10 PKSN (PKSN)	10	10	10	Tercapai
d. Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) perbatasan negara yang dibangun sebanyak 187 lokpri (lokpri)	187	187	187	Tercapai
e. Jumlah pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT) yang ditingkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya di 12 PPKT	12	12	12	Tercapai
KP 2. Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi				100
1. Terlaksananya pembangunan di kawasan perdesaan dan transmigrasi				
a. Jumlah pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa di kawasan perdesaan prioritas nasional sedikitnya 39 lokasi (lokasi)	39	39	39	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 144 kawasan dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebanyak 20 kawasan	144 20	144 (kawasan transmigrasi) 20 (KPB)	144 (kawasan transmigrasi) 20 (KPB)	Tercapai
KP 3. Percepatan Pembangunan Desa				100
1. Terlaksananya pembangunan di kawasan perdesaan dan transmigrasi				
a. Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 500 desa (desa)	500	2.540	2.540	Tercapai
b. Jumlah desa berkembang yang meningkat menjadi desa mandiri sebanyak 200 desa (desa)	200	1.102	1.102	Tercapai
PP 4. Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana				
KP 1. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan				100
1. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana				
Jumlah aparatur dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana yang ditingkatkan kapasitasnya di 136 lokasi prioritas (lokpri)	136	136	136	Tercapai
KP 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan				100
1. Terlaksananya layanan penanganan kebencanaan yang terpadu				
Jumlah layanan kebencanaan yang tahan terhadap bencana yang ditingkatkan di 136 lokasi prioritas (lokpri)	136	136	136	Tercapai
KP 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan				100
1. Terlaksananya penyelamatan korban bencana				
Jumlah korban akibat bencana di daerah pascabencana yang berkurang (lokasi)	terlaksana	35	39	Tercapai
2. Terlaksananya pemulihan pelayanan publik di daerah pascabencana				
Pelayanan publik di daerah pascabencana yang terpulihkan (lokasi)	terlaksana	3	35	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 4. Penguatan Manajemen Kebencanaan				100
1. Terselenggaranya peningkatan kinerja penanggulangan bencana				
Kinerja pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang ditingkatkan di 136 lokasi prioritas (kab/kota)	136	10	136	Tercapai
PP 5. Peningkatan Sistem Logistik				
KP 1. Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan				81,82
1. Meningkatnya pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas pertanian dan perikanan				
a. Jumlah <i>cold storage</i> perikanan yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 11 unit (unit)	11	3	7	Tidak Tercapai
b. Jumlah gudang non-SRG (Sistem Resi Gudang)/Gerai Maritim (ket: DAK) di 2 provinsi (provinsi)	2	3	3	Tercapai
KP 2. Tersedianya Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik				65,97
1. Tersedianya infrastruktur energi, sarana angkut dan transportasi mendukung sistem logistik				
a. Jumlah sarana pengangkutan produk perikanan, pertanian, dan peternakan yang dibangun di 3 provinsi (provinsi)	3	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
b. Jumlah 3 kapal angkut perikanan berpendingin yang disediakan	3	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
c. Jumlah rute dan trayek pengangkutan ke sentra peternakan dan perikanan yang terlayani di 3 provinsi (Provinsi)	3	6	6	Tercapai
d. Jumlah pelabuhan perikanan yang beroperasi (pelabuhan)	24	23 UPT pusat	23 UPT pusat	Tidak Tercapai
e. Jumlah rencana zonasi pesisir dan laut yang diselesaikan di 12 provinsi dan 20 KSN/KSNT (Provinsi dan KSN/KSNT)	12 provinsi 20 KSN/KSNT	N/A	24 (provinsi, kumulatif) 22 (KSN/KSNT)	Tercapai
f. Jumlah kendaraan berpendingin sebanyak 28 unit (unit)	28	16	28	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 3. Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik				83,33
1. Terwujudnya penguatan industri pendukung sistem logistik				
a. Terumuskannya strategi penguatan dan pembinaan industri galangan kapal dan kapal angkut (Rekomendasi)	1	Proses penyusunan Rekomendasi	1	Tercapai
b. Terumuskannya strategi pengembangan industri komponen perkapalan (Rekomendasi)	1	Proses penyusunan Rekomendasi	1	Tercapai
c. Jumlah desain kapal ikan, dan barang dan penumpang yang diselesaikan sebanyak 9 desain (Desain)	9	2	3	Tidak Tercapai
d. Jumlah SDM Industri perkapalan yang berkualitas yang disediakan sebanyak 260 orang (Orang)	260	1.395	1.980	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Lampiran 4.

Prioritas Nasional 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Tabel L.4.1.
Pencapaian Sasaran PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya				73,88
1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya				
a. Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,8	3,5	3,64	Tidak Tercapai
b. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	5,1	3,85	3,80	Tidak Tercapai
c. Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	5,3	4,75	4,62	Tidak Tercapai
d. Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	7	4,21	4,45	Tidak Tercapai
e. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	6,3	-1,04	-0,87	Tidak Tercapai
f. Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	270,0 - 280,0	217,5	278,6	Tercapai
g. Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	2,6 - 2,9	2,51	2,51	Tidak Tercapai
h. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	4,0 - 5,0	2,96	2,94	Tidak Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.4.2.
Pencapaian Sasaran PP pada
PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya,
Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian				98,88
1. Meningkatnya ekspor dan nilai tambah produk pertanian				
a. Pertumbuhan PDB perkebunan (%)	4,6- 4,7	4,98	4,56	Tidak Tercapai
b. Pertumbuhan PDB hortikultura (%)	3,5-3,6	5,07	5,53	Tercapai
c. Pertumbuhan PDB peternakan (%)	4,2-4,4	7,72	7,84	Tercapai
d. Pertumbuhan PDB perikanan (%)	6,1-6,2	5,85	5,81	Tidak Tercapai
e. Pertumbuhan PDB kehutanan (%)	2,7-2,9	N/A	6,9	Tercapai
PP 2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan				82,75
2. Meningkatnya ekspor dan nilai tambah industri pengolahan				
a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	5,7-6,2	4,48	4,34	Tidak Tercapai
b. Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	20,8-21,3	19,62	19,63	Tidak Tercapai
c. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	18,9-19,1	17,56	17,55	Tidak Tercapai
d. Tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,0	18,93	18,93	Tercapai
3. Berkembangnya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/ Logistik (KEK)				
a. Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/Logistik (KEK)	7 KI 6 KEK	0 KI 2KEK	14 KI 4 KEK	Tercapai
4. Meningkatnya investasi				
a. Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp triliun)	833,0-870,0	601,3	809,6	Tidak Tercapai
b. Rasio PMDN (%)	38,9	47,1	47,4	Tercapai
c. Peringkat kemudahan berusaha Indonesia (peringkat)	menuju peringkat 40	73	73	Tidak Tercapai
PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya				77,31
1. Meningkatnya nilai tambah pariwisata				
a. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (%)	5,5	4,0	4,0	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Wisatawan mancanegara (juta orang)	20,0	12,1	16,11	Tidak Tercapai
c. Wisatawan nusantara (juta orang)	275	231	280	Tercapai
2. Meningkatnya nilai tambah jasa produktif lainnya				
a. Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (%)	6,7 5,30*	5,02	5,10	Tidak Tercapai
b. Tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif (juta orang)	17,0 17,2*	18,33	19,01	Tercapai
c. Pertumbuhan PDB subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)	5,4-6,0	5,00	4,81	Tidak Tercapai
3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa				
a. Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	7,0-9,0	-5,32	-4,07	Tidak Tercapai
b. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,60	2,78	2,77	Tercapai
PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja				68,84
1. Meningkatnya proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah				
Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah (persen)	37	31,44	31,44	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya wirausaha baru				
Jumlah wirausaha baru yang tercipta (orang)	272.000	59.836	143.363	Tidak Tercapai
PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas				91,52
1. Meningkatnya produktivitas peneliti				
a. Produktivitas peneliti (publikasi)	4,0	6,3	6,3	Tercapai
b. Produk riset yang siap dikomersialisasikan (produk)	111	111	111	Tercapai
2. Meningkatnya SDM peneliti				
SDM peneliti	1.600	1.177	1.193	Tidak Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Keterangan: *) Angka target disesuaikan dengan Surat Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel L.4.3.
Pencapaian Sasaran KP pada
PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya,
Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian				
KP 1. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan				92,92
1. Meningkatnya hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan				
a. Produksi kakao sebanyak 961 ribu ton (ton)	961	N/A	784	Tidak Tercapai
b. Produksi kopi sebanyak 778 ribu ton (ton)	778	N/A	761	Tidak Tercapai
c. Produksi karet sebanyak 3.810 ribu ton (ton)	3.810	N/A	3.449	Tidak Tercapai
d. Produksi kelapa sebanyak 3.491 ribu ton (ton)	3.491	N/A	2.828	Tidak Tercapai
e. Produksi jeruk sebanyak 2.152 ribu ton (ton)	2.152.000	2.041.655	2.563.486	Tercapai
h. Produksi mangga sebanyak 2.060 ribu ton (ton)	2.060.000	1.302.529	2.808.936	Tercapai
i. Produksi manggis sebanyak 182 ribu ton (ton)	180.000	145.757	246.476	Tercapai
j. Produksi pisang sebanyak 7.176 ribu ton (ton)	7.176.000	5.105.270	7.280.476	Tercapai
k. Produksi lada sebanyak 83 ribu ton (ton)	83	N/A	89	Tercapai
l. Produksi pala sebanyak 34 ribu ton (ton)	34	N/A	44	Tercapai
m. Produksi cengkeh sebanyak 121 ribu ton (ton)	121	N/A	135	Tercapai
n. Produksi komoditas perikanan sebesar 22,2 juta ton (ton)	22,2	18,07	12,67 (tahunan)	Tidak Tercapai
o. Produksi komoditas kehutanan sebesar 41,0 juta kubik (juta kubik)	41	34,2	47,25	Tercapai
KP 2. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan				89,86
1. Meningkatnya ekspor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan				
a. Nilai ekspor perkebunan sebesar US\$25.654,1 juta	25.654,1	N/A	24.961,5	Tidak Tercapai
b. Nilai ekspor hortikultura sebesar US\$228,7 juta	228,7	N/A	455,73	Tercapai
c. Nilai ekspor peternakan sebesar US\$687,5 juta	687,5	N/A	743,99	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
d. Nilai ekspor perikanan sebesar US\$9,5 miliar (US\$ miliar)	9,5	3,48	4,94	Tidak Tercapai
e. Nilai ekspor kehutanan sebesar US\$9,3 miliar (US\$ miliar)	9,3	8,67	11,63	Tercapai
KP 3. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan				100
1. Meningkatnya standar dan mutu hasil pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan, dan kehutanan pelayanan angkutan udara				
a. Jumlah sertifikat pangan segar asal tumbuhan sebanyak 591 sertifikat (sertifikat)	591	N/A	609	Tercapai
b. Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebanyak 150 sertifikat (sertifikat)	150	N/A	191	Tercapai
c. Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan sebanyak 2.000 sertifikat (sertifikat)	2.000	2.253	2.973	Tercapai
d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 400 kelompok (kelompok)	400	389	406	Tercapai
KP 4. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan				97,11
1. Menguatnya kelembagaan dan usaha pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), perikanan, dan kehutanan				
a. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan yang dibina sebanyak 50 unit (unit)	50	N/A	50	Tercapai
b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.120 kelompok (kelompok)	2.120	N/A	2.317 (tahunan)	Tercapai
c. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor kehutanan yang dibina sebanyak 427 unit (unit)	427	322 (KPHP)	390 (KPHP)	Tidak Tercapai
KP 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan				90,75
1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan				
a. Jumlah alat pengolah hasil perkebunan, hortikultura, dan peternakan sebanyak 400 unit (unit)	400	N/A	289	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarananya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 lokasi (lokasi)	1	1	1	Tercapai
c. Jumlah sarana prasarana penunjang hasil kehutanan sebanyak 26 Unit KPHL dan 50 kantor/resort KPHP (Unit KPHL/Kantor)	26 50	N/A	347	Tercapai
PP 2. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan				
KP 1. Perbaiki Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi				100
1, Meningkatkan realisasi investasi PMA PMDN				
a. Jumlah usulan perubahan regulasi/ peraturan yang menghambat investasi sebanyak 10 usulan rekomendasi (usulan)	10	41	41	Tercapai
b. Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat pusat/ Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi, dan disinkronisasi sebanyak 2 usulan rekomendasi (usulan)	2	1	2	Tercapai
c. Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi sebanyak 18 peta potensi daerah (daerah)	18	17	18	Tercapai
d. Jumlah daerah yang data potensi investasi daerahnya termutakhirkan sebanyak 15 provinsi (provinsi)	15	10	15	Tercapai
e. Jumlah pengembangan sistem aplikasi perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada PTSP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta KEK dan FTZ sebanyak 3 paket sistem aplikasi (paket)	3	dalam tahap pengembangan sistem	3	Tercapai
f. Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sebanyak 145 perusahaan (perusahaan)	145	43	215	Tercapai
g. Jumlah pengembangan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebanyak 1 paket	1	dalam tahap pengembangan sistem	1	Tercapai
h. Jumlah rekomendasi strategi dan kebijakan pengembangan kesempatan usaha yang dirumuskan sejumlah 4 tema (tema)	4	4	4	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 2. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan Pendukung				92,00
1. Meningkatnya jumlah dan produktivitas industri hulu nonagro dan pendukung				
a. Jumlah kebijakan penumbuhan industri bahan baku obat sebanyak 1 kebijakan (kebijakan)	1	1	1	Tercapai
b. Jumlah dukungan akses bahan baku sebanyak 2 peta bahan baku dan akses bahan baku di subsektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (peta)	2	2	2	Tercapai
c. Jumlah dukungan penerapan standar sebanyak 5 RSNI di subsektor industri logam dan bahan galian nonlogam (RSNI)	5	3	3	Tidak Tercapai
d. Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapat pendampingan sebanyak 20 sentra (sentra)	20	15	22	Tercapai
e. Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapat restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak 5 sentra (sentra)	5	5	5	Tercapai
KP 3. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan				74,35
1. Meningkatnya daya saing industri andalan nonpangan dan pendukung				
a. Jumlah sentra IKM yang mendapat dukungan restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak 15 sentra di subsektor kimia, sandang, aneka, dan kerajinan (sentra)	15	29	39	Tercapai
b. Jumlah dukungan penerapan standar sebanyak 19 RSNI dan 2 SNI wajib di subsektor tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, alat transportasi dan alat pertahanan, elektronik, telematika, farmasi, kosmetik, alat transportasi, dan alat pertahanan (RSNI/SNI)	21	18	24	Tercapai
c. Jumlah dukungan penggunaan produk industri dalam negeri sebanyak 20 perusahaan/merek di subsektor garmen, fesyen, alas kaki, dan kimia hilir (perusahaan/merk)	20	N/A	4	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
d. Jumlah industri yang mendapat dukungan promosi dan temu bisnis sebanyak 225 industri di subsektor alat transportasi, alat pertahanan, elektronik, telematika, permesinan, dan alat mesin pertanian (industri)	225	1	1	Tidak Tercapai
e. Jumlah sentra IKM kimia, sandang, aneka, dan kerajinan yang mendapatkan pendampingan sebanyak 32 sentra (sentra IKM)	32	32	40	Tercapai
f. Jumlah IKM yang memanfaatkan layanan HKI, desain, dan kemasan sebanyak 450 IKM (IKM)	450	5.700	6.234	Tercapai
g. Jumlah hasil produksi industri hijau yang difasilitasi promosinya kepada pelaku pengadaan pemerintah sejumlah 3 produk	3	3	3	Tercapai
KP 4. Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik				100
1. Beroperasinya 7 KI dan 6 KEK industri/ logistik				
a. Lembaga pengelola 7 KI dan 6 KEK mendapat peningkatan kapasitas (KI dan KEK)	7 dan 6	7 dan 6	7 dan 6	Tercapai
b. RRTR/RDTR di sekitar 4 KI dan 3 KEK (KI dan KEK)	4 dan 3	4 dan 3	4 dan 3	Tercapai
c. Terbangunnya konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jaringan komunikasi di 7 KI dan 6 KEK (KI dan KEK)	7 dan 6	7 dan 6	7 dan 6	Tercapai
d. Tersedianya fasilitas investasi untuk 7 KI dan 6 KEK (KI dan KEK)	7 dan 6	7 dan 6	7 dan 6	Tercapai
PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya				
KP 1. Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas				97,50
1. Meningkatnya kesiapan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 KEK pariwisata dan perluasan pemasaran pariwisata prioritas				
a. Terbangunannya konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta api, dan jaringan komunikasi di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata (kawasan pariwisata prioritas/KEK pariwisata)	10	10	10	Tercapai
b. Tersedianya fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan sampah di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata (kawasan pariwisata)	10	10	10	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
c. RRTR/RDTR di sekitar 4 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata	6	6	6	Tercapai
d. Jumlah lembaga pengelola kawasan pariwisata yang diperkuat sebanyak 5 badan otorita pariwisata dan 4 KEK pariwisata (badan otorita pariwisata/KEK pariwisata)	5 badan otorita 4 KEK pariwisata	3 badan otorita pariwisata dan 4 KEK pariwisata	3 badan otorita pariwisata dan 4 KEK pariwisata	Tidak Tercapai
e. Tersedianya fasilitas dan kemudahan investasi di 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK pariwisata, 10 destinasi unggulan, serta destinasi wisata bahari di pulau-pulau kecil (kawasan pariwisata prioritas/KEK pariwisata)	10	10	10	Tercapai
f. Tersedianya dukungan pemasaran dan penjualan paket wisata untuk 10 kawasan pariwisata prioritas, termasuk 4 KEK Pariwisata, serta 10 destinasi unggulan (kawasan pariwisata prioritas/KEK pariwisata)	10	10	10	Tercapai
g. Jumlah destinasi wisata yang telah menerapkan standar <i>sustainable tourism practices</i> sebanyak 11 destinasi wisata (destinasi pariwisata)	11	12	12	Tercapai
h. Statistik pariwisata yang sesuai standar internasional sebanyak 2 <i>database (database)</i>	2	2	2	Tercapai
KP 2. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif				100
1. Meningkatnya populasi dan produktivitas ekonomi kreatif				
a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 3.000 orang (orang)	3.000	3.078	3.667	Tercapai
b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 28.401 orang (orang)	28.401	25.757	40.380	Tercapai
c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 1.875 produk (produk)	1.875	1.714	1.984	Tercapai
d. Statistik ekonomi kreatif sesuai standar sebanyak 2 <i>database (database)</i>	2	1	2	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 3. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri				75,70
1. Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam negeri				
a. Jumlah fasilitator edukasi e-commerce untuk mendorong peningkatan UKM yang berdagang online sebanyak 100 fasilitator untuk 200 UKM (fasilitator)	100	100	220	Tercapai
b. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat tipe A yang telah direvitalisasi sebesar 20 persen (%)	20	N/A Tahunan	22,83	Tercapai
c. Persentase produk dalam negeri yang diperdagangkan di tingkat eceran sebesar 80 persen (%)	80	N/A tahunan	82,07	Tercapai
2. Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri				
a. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor sebesar 55,0 - 65,0 persen (%)	55,0 - 65,0	48,92	48,30	Tidak Tercapai
b. Peningkatan nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi sebesar 10 persen (%)	10	5,8	9,82	Tidak Tercapai
c. Pertumbuhan ekspor jasa sektor prioritas sebesar 10 persen (%)	10	6	4,39	Tidak Tercapai
d. Pertumbuhan ekspor nonmigas di pasar prospektif sebesar 18 persen (%)	18	-3,29	-8,50	Tidak Tercapai
KP 4. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan				98,24
1. Meningkatnya akses penyaluran pembiayaan				
a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 600 ribu orang (orang)	600.000	N/A	568.402	Tidak Tercapai
b. Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (<i>start up capital</i>) sebanyak 2.500 orang (orang)	2.500	N/A	2.603	Tercapai
c. Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR) sebanyak 5.000 orang (orang)	5.000	N/A	5.000	Tercapai
PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja				
KP 1. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha				82,57
1. Meningkatnya kualitas standar kompetensi dan kurikulum diklat vokasi				
a. Jumlah peta kompetensi sektor/subsektor yang disusun bersama dengan dunia usaha pada 20 sektor/subsektor (sektor/subsektor)	20	N/A	14	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berbasis okupasi dan KKNi yang disusun sebanyak 250 SKKNI (SKKNI)	250	91	155	Tidak Tercapai
c. Jumlah sekolah vokasi yang bermitra dengan dunia usaha sebanyak 1.775 unit (unit)	1.775	1.372	2.612	Tercapai
d. Jumlah perusahaan/industri yang menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan sebanyak 90 perusahaan (perusahaan)	90	180	200	Tercapai
e. Jumlah perusahaan yang bermitra dalam pengembangan vokasi sebanyak 500 unit (unit)	500	N/A	200	Tidak Tercapai
2. Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga diklat, dan dunia usaha				
a. Jumlah pusat pengembangan keahlian/skill development center (SDC) yang terbentuk sebanyak 20 lokasi (lokasi)	20	20	20	Tercapai
b. Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang bekerja dengan fasilitasi SDC sebanyak 20.000 orang (orang)	20.000	17.706	17.706	Tidak Tercapai
3. Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat				
Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang mendapat pekerjaan atau membuka usaha dengan fasilitasi pusat pelayanan informasi pasar kerja sebanyak 2.000.000 orang (orang)	2.000.000	1.980.917	2.144.736	Tercapai
KP 2. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				50,13
1. Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja				
a. Jumlah pelatihan sebanyak 1.400.000 orang (orang)	1.400.000	703.605	1.098.488	Tidak Tercapai
b. Proporsi keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang langsung bekerja terhadap jumlah peserta/siswa sebesar 100 persen (%)	100	21,5	21,8	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
KP 3. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi				91,12
1. Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi				
a. Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi sebanyak 1.000.000 orang (orang)	1.000.000	484.664	911.152	Tidak Tercapai
KP 4. Peningkatan Keterampilan Wirausaha				39,93
1. Meningkatnya jumlah calon wirausaha baru yang difasilitasi dan dilatih				
a. Jumlah calon wirausaha yang difasilitasi informasi kewirausahaan sebanyak 50.100 orang (orang)	50.100	7.587	13.604	Tidak Tercapai
b. Jumlah calon wirausaha yang dilatih sebanyak 272.000 orang (orang)	272.000	59.836	143.363	Tidak Tercapai
PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas				
KP 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas				100
1. Meningkatnya kapasitas penelitian di bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas				
a. Jumlah lingkup metrologi yang dikembangkan sebanyak 12 satuan ukur	1	1	1	Tercapai
b. Jumlah peningkatan layanan kalibrasi yang diakui dan berstandar internasional sebanyak 8 laboratorium (laboratorium)	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat diberikan notifikasi
c. Jumlah prototipe material maju yang dihasilkan sebanyak 5 prototipe (prototipe)	5	3	5	Tercapai
d. Jumlah prototipe hasil litbang di bidang kesehatan sebanyak 8 prototipe (prototipe)	8	8	11	Tercapai
e. Jumlah inovasi produk radiofarmaka untuk deteksi dini penyakit yang dihasilkan sebanyak 4 prototipe (prototipe)	4	4	8	Tercapai
f. Jumlah Pusat Data Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Kekayaan Intelektual yang dikembangkan sebanyak 1 sistem (sistem)	1	1	1	Tercapai
g. Jumlah Kebun Raya baru yang dikembangkan untuk konservasi tumbuhan ex situ sebanyak 2 lokasi (lokasi)	2	1	3	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi	
		Triwulan III	Triwulan IV		
KP 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas				100	
1. Dikembangkan dan dimanfaatkan teknologi pengungkit produktivitas dan pendukung					
a.	Jumlah provinsi yang terlayani sistem data penginderaan jauh untuk:				
	- Fase pertumbuhan padi sebanyak 16 provinsi (provinsi)	16	16	16	Tercapai
	- Perikanan sebanyak 16 provinsi (provinsi)	16	16	16	Tercapai
	- Informasi zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) sebanyak 24 <i>project area</i> (<i>project area</i>)	24	24	24	Tercapai
	- Perkebunan sebanyak 10 provinsi (provinsi)	10	10	10	Tercapai
b.	Jumlah afiliasi mitra usaha di bidang teknologi digital sebanyak 20 perusahaan (perusahaan)	20	12	25	Tercapai
c.	Jumlah prototipe teknologi transportasi sebanyak 1 prototipe (N219-A) (persen)	10	0	10	Tercapai
d.	Dibangunnya fasilitas hilirisasi litbang di bidang bioteknologi sebanyak 1 buah (Lab Bio Produk Terintegrasi) (laboratorium)	1	5	1	Tercapai
KP 3. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)				84,75	
1. Meningkatnya daya saing industri andalan nonpangan dan pendukung					
a.	Jumlah karyasiswa PhD di bidang strategis yang dibiayai sebanyak 100 orang dan Master bidang strategis yang dibiayai sebanyak 100 orang (orang)	100 100	111	PhD 76 orang Master 93 orang	Tidak Tercapai
b.	Jumlah observatorium nasional yang dilengkapi peralatannya dalam rangka peningkatan kapasitas SDM peneliti sebanyak 1 buah (persen)	100	0	85	Tidak Tercapai
KP 4. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier (Peneliti, Perekayasa)				96,67	
1. Dihilangkannya inovasi-inovasi yang berbasis teknologi frontier					
a.	Jumlah STP yang ditingkatkan fasilitasnya untuk pusat alih teknologi hasil litbang sebanyak 1 fasilitas (infrastruktur produktif Cibinong STP) (persen)	100	60	90	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Jumlah rintisan STP baru sebanyak 2 lokasi (lokasi)	2	1	2	Tercapai
c. Jumlah inovasi teknologi sistem <i>charging</i> mobil listrik yang dihasilkan sebanyak 1 inovasi (inovasi)	1	0,75	1	Tercapai
d. Jumlah prototipe teknologi satelit yang dikembangkan sebanyak 1 (persen)	100	0	90	Tidak Tercapai
e. Prototipe (Satelit Mikro A-5) (persen)	10	0	10	Tercapai
f. Jumlah inovasi teknologi <i>drone</i> sebanyak 1 prototipe (% progres)	100	61,67	100	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Lampiran 5.

Prioritas Nasional 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Tabel L.5.1.
Pencapaian Sasaran PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PN 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air				64,05
1. Tercapainya produksi sumber daya energi				
Produksi sumber daya energi (ribu setara barrel minyak (SBM)/hari)	2.025	1.808	1.809	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)				
Rasio Elektrifikasi (%)	99,9	98,86	98,89	Tidak Tercapai
3. Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan				
a. Pertumbuhan produksi padi/beras (%)	2,4	2,3	-7,76	Tidak Tercapai
b. Pertumbuhan produksi jagung (%)	3,0	2,9	4,3	Tercapai
c. Pertumbuhan produksi kedelai (%)	11,1	5,7	-34,74	Tidak Tercapai
d. Pertumbuhan produksi gula (%)	15,2	12,4	3,85	Tidak Tercapai
e. Pertumbuhan produksi daging sapi (%)	7	4	-2,56	Tidak Tercapai
f. Pertumbuhan produksi Ikan (%)	8,1	N/A	8,84	Tercapai
g. Pertumbuhan produksi garam (%)	9,8	N/A	5,56	Tidak Tercapai
4. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
Skor pola pangan harapan (nilai)	92,5	91,3	90,8	Tidak Tercapai
5. Meningkatnya ketersediaan air				
Kapasitas air baku (m3/detik)	78,68	N/A	81,4	Tercapai
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,5-68,5	N/A	66,56	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.5.2.
Pencapaian Sasaran PP pada
PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air,
Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi				85,31
1. Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi				
a. Konsumsi listrik per kapita (kilo Watt hour/kWh)	1.200	1.077	1.084	Tidak Tercapai
b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)	64	65,6	66	Tercapai
c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)	60	28,5	29,3	Tidak Tercapai
d. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	16	12,36	12,36	Tidak Tercapai
2. Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara				
a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)	775	748	745,61	Tidak Tercapai
b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)	1.250	1.045	1.057	Tidak Tercapai
c. Produksi batubara (juta ton/tahun)	400	463,9	616,16	Tercapai
PP 2. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan				76,43
1. Meningkatnya produksi pangan (juta ton)				
a. Produksi padi	57,9	63,4	54,60	Tidak Tercapai
b. Produksi jagung	24,1	24,8	22,59	Tidak Tercapai
c. Produksi kedelai	2,6	0,3	0,42	Tidak Tercapai
d. Produksi gula	3,8	2,1	2,26	Tidak Tercapai
e. Produksi daging sapi	0,8	0,5	0,51	Tidak Tercapai
f. Produksi ikan	18,8	9,83	13,94	Tidak Tercapai
g. Produksi garam	4,5	1,74	2,85	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya akses pangan				
Perubahan harga beras (persen)	0,5	0,2	0,32	Tercapai
3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
a. Konsumsi kalori (Kkal)	2.150	2.165	2.138	Tidak Tercapai
b. Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	54,5	N/A	54,49	Tidak Tercapai
PP 3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air				98,86
1. Menurunnya luasan lahan kritis				
Luas lahan kritis (ribu ha)	206	N/A	206	Tercapai
2. Pulihnya kesehatan DAS				

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
Jumlah DAS Prioritas yang dilakukan pemulihan (DAS) (akumulasi)	15	15	15	Tercapai
3. Meningkatkan kapasitas tampungan air permukaan				
Kapasitas tampungan air permukaan (miliar m3)	14,7	13,46	13,86	Tidak Tercapai
4. Terbangunnya data dan informasi sumber daya air				
Jumlah pembangunan data dan informasi sumber daya air (DAS Prioritas)	15	34	34	Tercapai
5. Terbangunnya kawasan pesisir				
Jumlah provinsi yang terbangun kawasan pesisir (Provinsi)	3	18	18	Tercapai
PP 4. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan				98,58
1. Meningkatnya Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan				
a. Indeks kualitas air (nilai)	55	49,1	52,65	Tidak Tercapai
b. Indeks kualitas udara (nilai)	84	86,71	86,57	Tercapai
c. Indeks kualitas tutupan lahan (nilai)	62	60,9	62,00	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.5.3.
Pencapaian Sasaran KP pada
PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air,
Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi				
KP 1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas, Bumi, dan Energi Lainnya				59,96
1. Meningkatnya cadangan minyak, gas bumi, dan energi lainnya				
a. Tersedianya cadangan minyak bumi sebesar 5.747 <i>Million Stock Tank Barrels</i> (MMSTB)	5.747	3.775	3.775	Tidak Tercapai
b. Tersedianya cadangan gas bumi sebesar 142 <i>Triliun Standard Cubic Feet</i> (TSCF)	142	77	77	Tidak Tercapai
KP 2. Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik				71,09
1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan				
a. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit 5.827 Mega Watt (MW)	5.827	1.534,8	4.724	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Tercapainya penambahan jaringan transmisi 16.156 kilometer sirkuit (kms)	16.156	4.037,89	6.210,58	Tidak Tercapai
c. Tercapainya peningkatan kapasitas produksi tenaga listrik 294,3 Tera-Watt hour (TWh)	294,3	203,3	275,90	Tidak Tercapai
KP 3. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)				96,43
1. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan				
a. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)/Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 489 MW (MW)	489	29,9	424,87	Tidak Tercapai
b. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.183,5 MW (MW)	2.183,5	2.003,3	2.130,7	Tidak Tercapai
c. Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 1.935 MW (MW)	1.935	1.882,8	1.889,9	Tidak Tercapai
d. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 22 MW (MW)	22	37,63	85,62	Tercapai
e. Tercapainya peningkatan penyediaan Biofuel sebesar 4,51 juta KL (KL)	4,51	5,55	8,37	Tercapai
KP 4. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri				81,20
1. Meningkatnya upaya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri				
a. Terlaksananya penyerapan produksi batubara dalam negeri sebesar 240 juta ton per tahun	240	132,02	180,27	Tidak Tercapai
b. Terlaksananya penyerapan produksi gas bumi dalam negeri sebesar 800 ribu SBM/hari (ribu SBM/hari)	800	690,62	698,22	Tidak Tercapai
KP 5. Peningkatan Efisiensi Energi				100,00
1. Meningkatnya efisiensi energi				
a. Tercapainya intensitas energi primer (Penurunan 1 persen per tahun) sebesar 424 SBM/Rp miliar (SBM/Rp miliar)	424	426,4	426,4	Tercapai
KP 2. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan				
KP 1. Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan				95,22
1. Terlaksananya upaya penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan dari produksi dalam negeri				

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
a. Meningkatnya luas areal fasilitas budidaya pangan menjadi 5,3 juta Ha (juta Ha)	5,3	5,3	4,54	Tidak Tercapai
b. Meningkatnya produksi benih dan calon induk unggul menjadi 215 juta ekor (juta ekor)	215	154,59	232,04	Tercapai
c. Terlaksananya lahan garam yang difasilitasi seluas 1.000 Ha (Ha)	1.000	N/A	1.549,54 (tahunan)	Tercapai
KP 2. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan				100,00
1. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat				
Terlaksananya pengembangan pekarangan pangan (KRPL) 4.600 kelompok (kelompok)	4.600	4.471	5.511	Tercapai
KP 3. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan				100,00
1. Terlaksananya upaya penguatan cadangan dan stabilitas harga pangan				
a. Tersedianya jumlah cadangan beras pemerintah sebanyak 1 - 1,5 juta ton (juta ton)	1 - 1,5	2,29	1,20	Tercapai
b. Menurunnya nilai koefisien variasi harga pangan (provinsi)	34	34	34	Tercapai
KP 4. Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan				93,84
1. Terlaksananya upaya penguatan kelembagaan dan layanan pertanian dan perikanan				
a. Meningkatnya rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasikan sebesar 70 persen (%)	70	76,63	92,73	Tercapai
b. Meningkatnya jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 44.897 orang (orang)	44.897	39.269	39.269	Tidak Tercapai
c. Meningkatnya jumlah penyuluh perikanan menjadi sebanyak 5.252 orang (orang)	5.252	4.939	4.939	Tidak Tercapai
KP 5. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan				77,01
1. Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan				
a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 140.000 ha (ha)	140.000	670	139.410	Tidak Tercapai
b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 370.000 ha (ha)	370.000	104.745	134.075	Tidak Tercapai
c. Terlaksananya pembangunan embung pertanian sebanyak 539 buah (buah)	539	386	400	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
d. Terbangunnya 300 unit kapal perikanan (unit)	300	112	294	Tidak Tercapai
PP 3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air				
KP 1. Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air Dan Ekosistem				99,50
1. Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem				
a. Terbangunnya konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis sebanyak 3.000 unit (unit)	3000	80	3.000	Tercapai
b. Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 206 ribu ha (ribu ha)	206	80	206	Tercapai
c. Terkendalinya endapan sedimen di 10 danau dan 4 waduk (danau; waduk)	10;4	4	9 danau 4 waduk (97%)	Tidak Tercapai
KP 2. Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif				75,26
1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif				
a. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 8 bendungan (bendungan)	8	5	5	Tidak Tercapai
b. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 186 embung (embung)	186	157	188	Tercapai
c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 1.290 titik (titik)	1.290	334	497	Tidak Tercapai
d. Tersedianya infrastruktur air baku sebanyak 47 unit (unit)	47	74	74	Tercapai
KP 3. Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air				66,67
1. Tercapainya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air				
a. Meningkatnya kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100 tahun (tahun)	10-100	5-10	5-10	Tidak Tercapai
b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 4 wilayah sungai kewenangan pusat (wilayah)	4	6	6	Tercapai
c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 40 lokasi (lokasi)	40	36	36	Tidak Tercapai
KP 4. Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air				100
1. Tercapainya peningkatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air				
a. Tersedianya data hidrologi pada hutan lindung, hutan konservasi, dan kinerja DAS sepanjang tahun (BPDASHL)	34	Tahap pengumpulan data: 75%	34 BPDASHL	Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Terlaksananya sinkronisasi implementasi kerja Forum DAS dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) (RPTDAS)	28	Tahap pelaksanaan internalisasi RPDAST: 70%	34 RPTDAS	Tercapai
PP 4. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan				
KP 1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				100
1. Menurunnya potensi kejadian kerusakan SDA dan LH				
a. Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC sebesar 5 persen (%)	5	4	5	Tercapai
b. Menurunnya persentase luas kebakaran pada hutan/lahan sebesar 10 persen (%) (target 2% di tahun 2019) (%)	10	1,41	2 (tercapai)	Tercapai
c. Tersedianya pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim (kab/kota)	340	340	340	Tercapai
d. Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara di 400 kab/kota (kab/kota)	400	367	419	Tercapai
e. Meningkatnya kualitas pengelolaan kegeologian (<i>progress</i>)	100	60	100 (<i>progress</i>)	Tercapai
KP 2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup				100
1. Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH				
a. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola di 4 lokasi (lokasi)	4	Tahap persiapan dan pengadaan	4	Tercapai
b. Terkendalinya lokasi pesisir dan laut yang dilakukan pengendalian pencemaran dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya di 1 lokasi (lokasi)	1	3	3	Tercapai
c. Menurunnya persentase luas kebakaran pada hutan/lahan sebesar 10 persen (%)	10	9	10	Tercapai
KP 3. Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				98,80
1. Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan LH dan SDA				
a. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi rawan kebakaran hutan seluas 400.000 Ha (ha)	400.000	300.000	371.124,01	Tidak Tercapai

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Terlaksananya pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 30,2 Ha lahan tambang (ha)	30,2	9	40,19	Tercapai
c. Terpulihkannya lahan gambut terdegradasi di areal penggunaan lainnya (APL) seluas 1.500 Ha (ha)	1.500	722	1.568	Tercapai
d. Terpulihkannya ekosistem pesisir dan laut yang rusak di 3 lokasi (lokasi)	3	3	3	Tercapai
e. Ditetapkannya/dicadangkan 700.000 ha kawasan konservasi di tingkat nasional dan daerah sehingga target 20 juta Ha terpenuhi (ha)	700.000	1.819.672,61	2.271.240,73	Tercapai
f. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 7 lokasi (lokasi)	7	9	22	Tercapai
KP 4. Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				100
1. Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan LH dan SDA				
a. Terlaksananya pengamanan kawasan hutan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi (ha)	2.675.000	6.071.283,50	6.344.487,48	Tercapai
b. Terlaksananya penerapan sanksi administrasi sebanyak 70 persen (100 sanksi)	100	230	288	Tercapai
c. Terselesaikannya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) sebanyak 75 persen (125 kasus)	125	166	224	Tercapai
d. Tertanganinya gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan (gugatan)	7	7	7	Tercapai
e. Terlaksananya pengawasan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam pemanfaatan SDA (izin)	650	1.200	1.797	Tercapai
f. Terlaksananya penegakan hukum administrasi pemanfaatan SDA (pengaduan)	1.200	942	1.458	Tercapai
g. Terlaksananya pengembangan dan operasionalisasi Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK) (sistem)	1	0,8	6,5	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Lampiran 6.

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Tabel L.6.1.

Pencapaian Sasaran PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PN 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu				99,30
1. Terjaganya stabilitas keamanan nasional				
a. <i>Clearance rate</i> (%)	60	63	65	Tercapai
b. <i>Response time</i> kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	18' 00"	15'00"	15'00"	Tercapai
c. <i>Global Military Index</i> (nilai)	0,31	0,28	0,28	Tercapai
2. Terselenggaranya kesuksesan Pemilu				
a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) (nilai)	75	72,39 (IDI 2018)	72,39 (IDI 2018)	Tidak Tercapai
b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	77,5	81,97 (Pemilu Presiden) 81,69 (Pemilu Legislatif)	81,97 (Pemilu Presiden) 81,69 (Pemilu Legislatif)	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.6.2.

Pencapaian Sasaran PP pada PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Kamtibmas dan Keamanan Siber				100
1. Terciptanya Kamtibmas dan keamanan siber				
a. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Per 100.000 Penduduk	140	129 (2017)	113 (2018)	Tercapai
b. <i>Crime clock</i> (menit, detik)	1' 28"	1'33" (2017)	1'47" (2018)	Tercapai
c. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	0,05	0,03	0,03	Tercapai
d. Peringkat <i>Global Cyber Security Index</i>	64	41	41	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 2. Kesuksesan Pemilu				96,73
1. Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis				
a. Nilai indeks hak-hak politik (nilai)	68	65,79	65,79	Tidak Tercapai
b. Nilai indeks kebebasan sipil (nilai)	87	78,46	78,46	Tidak tercapai
c. Nilai indeks lembaga demokrasi (nilai)	71	75,25	75,25	Tercapai
d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019 (kasus)	59	366	366	Tercapai
PP 3. Pertahanan Wilayah Nasional				90,24
1. Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat				
a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus)	60	175 (2018)	256 (TW 3 2019)	Tercapai
b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan				
- Pos Pamtas	4	4	4	Tercapai
- Posal	16	16	16	Tercapai
- Km JIPP	274	100	174	Tidak Tercapai
c. Persentase pencapaian <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) (%)	68,9	68,9	68,9	Tercapai
d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)	53,8	43,62	41,93	Tidak Tercapai
PP 4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi				87,18
1. Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi				
a. Indeks pembangunan hukum (skala 0-1) (nilai)	0,75	N/A	0,61 (2018)	Tidak Tercapai
b. Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5) (nilai)	4	3,70	3,70	Tidak Tercapai
c. Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100) (nilai)	Kenaikan 20%	N/A	79,59 (2018)	Tidak Tercapai
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi				
a. Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)	75	93,98 (2018)	95,29	Tercapai
b. Persentase provinsi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)	60	70,59 (2018)	73,53	Tercapai
c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)	45	11,22 (2018)	25,20	Tidak Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 5. Efektivitas Diplomasi				100
1. Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri				
Indeks perlindungan dan pelayanan WNI/BHI (nilai)	84,23	N/A	95,59	Tercapai
2. Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan				
Jumlah dokumen hasil perundingan batas laut INA dengan Prioritas IND, VIET, PHI, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan proses realignment FIR dengan SIN dan MLY, verifikasi <i>updating</i> batas maritim RI dengan negara tetangga dalam rangka mendukung kebijakan satu peta (dokumen)	8	6	8	Tercapai
3. Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional terhadap pencapaian investasi dan perdagangan				
Jumlah prosedural tetap dan peraturan pendukung pengelolaan pemberian bantuan internasional Indonesia (dokumen)	1	2	2	Tercapai
4. Peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika				
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Indonesia-Africa <i>Infrastructure Dialogue</i> (1 dokumen <i>summary report</i>)	1	1	1	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

Tabel L.6.3.
Pencapaian Sasaran KP pada
PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu,
Hingga Triwulan IV Tahun 2019

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
PP 1. Kamtibmas dan Keamanan Siber				
KP 1. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap				97,05
1. Terciptanya kondisi aman yang cepat dan tanggap				
a. Pemenuhan alat material khusus(almatsus) (sumber PHLN), sebanyak 1 paket (paket)	1	1	1	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
b. Pemenuhan Almatsus (sumber PDN), sebanyak 1 paket (paket)	1	1	1	Tercapai
c. Terbangunnya ruang pelayanankhusus (RPK) yang dibangun sesuai SPM di 3 lokasi (lokasi)	3	3	3	Tercapai
d. Jumlah 5 <i>command centre</i> yang dibangun (<i>command centre</i>)	5	5	5	Tercapai
e. Jumlah penyidik yang mengikuti Pelatihan SPPA Terpadu sebanyak 300 orang (orang)	300	247	300	Tercapai
f. Jumlah personel yang mengikuti persiapan pendidikan pascasarjana luar negeri, sebanyak 75 orang (orang)	75	75	121	Tercapai
g. Jumlah penyidik yang mengikuti <i>assesment</i> uji kompetensi penyidik, sebanyak 500 orang (orang)	500	352	713	Tercapai
h. Jumlah petugas RPK yang mengikuti pelatihan, sebanyak 125 orang (orang)	125	125	125	Tercapai
i. Jumlah pemenuhan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) sebanyak 4 Paket (paket)	4	4	4	Tercapai
j. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.229.714 giat (giat)	4.229.714	1.905.693	3.256.850	Tidak Tercapai
k. Jumlah giat sosialisasi budaya tertib lalu lintas sebanyak 23 giat (giat)	23	14	34	Tercapai
l. Jumlah <i>problem solving</i> (pemecahan masalah kasus ringan) di luar Pengadilan, sebanyak 40.000 kasus (kasus)	40.000	13.687	34.194	Tidak Tercapai
m. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda sebanyak 38 MoU (MoU)	38	16	38	Tercapai
n. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen (26.694 kasus) (kasus)	26.694	18.406	36.686	Tercapai
o. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum luar bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 3.778 kasus (kasus)	3.778	1.144	3.394	Tidak Tercapai
p. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum dalam/otopsi bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 150 kasus (kasus)	150	60	160	Tercapai
q. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen (2.590 kasus) (kasus)	2.590	1.376	3.547	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
r. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen (37 kasus) (kasus)	37	25	35	Tidak Tercapai
KP2. Penanganan Konflik Sosial				91,20
1. Tertanganinya konflik sosial secara koordinatif dan integratif				
a. Tersusun dan terlaksananya rencana aksi timdu tingkat nasional dan daerah di 34 provinsi + 29 kab/kota (provinsi)	34 provinsi 29 kab/kota	34 provinsi 29 kab/kota	34 provinsi 456 kab/kota	Tercapai
b. Terintegrasinya data konflik sosial (data)	1	0	0	Tidak Tercapai
c. Terlaksananya peningkatan peran pranata adat dalam penanganan konflik sosial melalui festival budaya dan olahraga di 15 kabupaten (kabupaten)	15	20	23	Tercapai
d. Terlaksananya dialog lintas agama di 34 provinsi (provinsi)	34	34	34	Tercapai
e. Terlaksananya desa sadar kerukunan di 52 desa (desa)	52	100	100	Tercapai
f. Terlaksananya kampanye hidup rukun di 34 provinsi (provinsi)	34	N/A	34	Tercapai
g. Tersusunnya indeks kerukunan umat beragama (dokumen)	4	N/A	4	Tercapai
h. Terselenggaranya operasional sekber FKUB di 512 kabupaten/kota (kab/kota)	512	332	348	Tidak Tercapai
i. Terlaksananya penguatan masyarakat dalam penanganan konflik sosial di 250 lokasi (lokasi)	250	244	250	Tercapai
j. Tertanganinya sengketa tanah dan ruang di daerah sebanyak 814 kasus (kasus)	814	2.839	3.327	Tercapai
k. Tertanganinya perkara tanah dan ruang di daerah sebanyak 627 Kasus (perkara)	627	3.389	4.281	Tercapai
l. Terlaksananya penyelesaian kasus pertanahan terindikasi keterlibatan mafia tanah sebanyak 61 kasus (kasus)	61	56	61	Tercapai
m. Tertanganinya kasus sengketa dan konflik tanah dan ruang wilayah I sebanyak 60 kasus (kasus)	60	30	60	Tercapai
n. Tertanganinya kasus sengketa dan konflik tanah dan ruang wilayah II sebanyak 60 kasus (kasus)	60	40	60	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
o. Tertanganinya perkara di pengadilan pusat sebanyak 20 perkara (perkara)	20	31	38	Tercapai
KP 3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba				94,37
1. Tertanganinya permasalahan penyalahgunaan narkoba				
a. Jumlah pengembangan model pendidikan anti narkoba untuk kalangan remaja, sebanyak 1 model (model)	1	0	1	Tercapai
b. Jumlah pengembangan model intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, sebanyak 1 model (model)	1	0	1	Tercapai
c. Jumlah petugas Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 150 orang (orang)	150	100	195	Tercapai
d. Jumlah pengadaan 49 unit alat laboratorium uji narkoba di pusat (unit)	49	0	49	Tercapai
e. Jumlah pengadaan 2 unit alat laboratorium uji narkoba di daerah (unit)	2	0	2	Tercapai
f. Jumlah riset kesehatan dampak narkoba, sebanyak 1 laporan riset (laporan)	1	0,5	1	Tercapai
g. Jumlah kajian model-model intervensi sosial pencegahan penyalahgunaan narkoba, sebanyak 1 rekomendasi model (rekomendasi)	1	0	1	Tercapai
h. Jumlah pengembangan sistem komando operasi interdiksi terpadu, sebanyak 1 sistem (sistem)	1	0	1	Tercapai
i. Jumlah pos komando interdiksi terpadu yang dibangun sebanyak 7 pos (pos)	7	0	7	Tercapai
j. Jumlah relawan anti narkoba yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 150 relawan (relawan)	150	150	150	Tercapai
k. Jumlah laporan pelaksanaan <i>pilot project alternative development</i> sebanyak 1 laporan (laporan)	1	1	1	Tercapai
l. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 626 berkas perkara (perkara)	626	739	739	Tercapai
m. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi di 3 Provinsi (Aceh,	12	13	13	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
Sumatera Utara dan Papua) (titik lokasi)				
n. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, sebanyak 47 berkas perkara (perkara)	47	38	38	Tidak Tercapai
o. Jumlah Kajian Pencegahan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika dalam Sektor Farmasi dan Non-Farmasi sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (rekomendasi)	1	0	1	Tercapai
p. Tersusunnya Survei Nasional Penyalahguna Narkoba 2019 sebanyak 1 laporan (laporan)	1	0,8	1	Tercapai
q. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80% (8.091 kasus) (kasus)	8.901	7.591	10.581	Tercapai
r. Layanan Pencegahan Penyalahgunaan Napza sebanyak 142 layanan (layanan)	142	65	143	Tercapai
s. Sarana Prasarana Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza sebanyak 100 unit (unit)	100	0	1	Tidak Tercapai
t. 3.000 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif (orang)	3.000	3.000	3.910	Tercapai
u. Terlaksananya fasilitasi kegiatan jambore pemuda Indonesia bagi 34 Provinsi Dekon (provinsi)	34	34	34	Tercapai
KP 4. Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber				97,07
1. Terbangunnya kelembagaan siber yang kuat dan aktivitas siber yang aman				
a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen siber, sebanyak 20 unit (unit)	20	7	26	Tercapai
b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 1.148 laporan(laporan)	1.148	822	1.075	Tidak Tercapai
c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 860 laporan (laporan)	860	1.435	1.871	Tercapai
d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 1.322 laporan (laporan)	1.322	991	1.260	Tidak Tercapai
e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 1.305 laporan (laporan)	1.305	915	1.183	Tidak Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
f. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan siber, sebesar 70 persen (181 kasus) (kasus)	181	51	133	Tidak Tercapai
g. Jumlah sistem pemblokiran konten negatif (sistem)	1	0	1	Tercapai
h. Terbangunnya sistem <i>cyber assessment center</i> pada sektor IKN, sebanyak 1 sistem (sistem)	1	0	1	Tercapai
i. Jumlah pemenuhan gelaran jaring komunikasi sandi pada TNI, sebanyak 30 titik (titik)	30	0	30	Tercapai
j. Terbangunnya sistem <i>integrated fusion center</i> , sebanyak 1 sistem (sistem)	1	1	1	Tercapai
k. Jumlah K/L/D/I yang difasilitasi perangkat operasional siber dan sandi untuk pemerintah daerah, sebanyak 110 (pemprov/pemkab/pemkot)	110	79	110	Tercapai
l. Terbangunnya sistem <i>supervisory control and data acquisition/industrial control system</i> , sebanyak 1 sistem (sistem)	1	0	1	Tercapai
m. Jumlah lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber, sebanyak 100 lulusan (lulusan)	100	46	100	Tercapai
n. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan fungsional sandi K/L/D, sebanyak 125 lulusan (lulusan)	125	59	125	Tercapai
o. Terlaksananya pengendalian informasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan sebesar 100 persen (%)	100	80	100	Tercapai
p. Terbangunnya 1 sistem <i>data centre</i> yang memenuhi standar keamanan pada Kantor Sentul (sistem)	1	0	1	Tercapai
KP5. Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme				95,68
1. Tertanganinya aksi terorisme dan pencegahan paham radikalisme				
a. Terkoordinasinya pelibatan secara terpadu 36 K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme (K/L)	36	4	8	Tidak Tercapai
b. Terlaksananya 11 operasi intelijen kontra propaganda (operasi)	11	8	11	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
c. Terlaksananya 127 kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas (kegiatan)	127	104	127	Tercapai
d. Terlaksananya 98 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional (operasi)	98	85	98	Tercapai
e. Terlaksananya 8 operasi Tim Penanggulangan <i>Foreign Terrorist Fighters</i> (operasi)	8	7	8	Tercapai
f. Terlaksananya 9 kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme (kerja sama)	9	6	9	Tercapai
g. Terjaminnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 4 koordinasi (koordinasi)	4	3	4	Tercapai
h. Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui 32 FKPT (FKPT)	32	24	32	Tercapai
i. Terlaksananya penguatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme di 200 lokasi (lokasi)	200	200	200	Tercapai
j. Terlaksananya 25 operasionalisasi pemulihan korban terorisme dan sarana prasarana (operasionalisasi)	25	25	25	Tercapai
k. Jumlah mantan warga binaan pemasyarakatan teroris yang mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 50 orang (orang)	50	50	50	Tercapai
l. Terlaksananya 8 operasi intelijen pencegahan (operasi)	8	7	8	Tercapai
m. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 200 orang (orang)	200	200	775	Tercapai
n. Jumlah peserta diklat <i>training of trainer</i> (ToT) nilai-nilai kebangsaan sebanyak 200 orang (orang)	200	200	200	Tercapai
o. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang (orang)	200	200	200	Tercapai
p. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 3.670 laporan (laporan)	3.670	3.087	3.761	Tercapai
q. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana terorisme sebanyak 10 kasus (kasus)	10	6	11	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
r. Jumlah kegiatan deradikalisasi tindak pidana terorisme, sebanyak 10 kegiatan (kegiatan)	10	6	11	Tercapai
PP 2. Kesuksesan Pemilu				
KP 1. Penguatan Lembaga Demokrasi				82,73
1. Peningkatan skor IDI untuk aspek lembaga demokrasi				
a. Tersusunnya 549 laporan pertanggungjawaban tahapan pemilu (laporan)	549	383	751	Tercapai
b. Tersusunnya 130 dokumen pemiluluar negeri (dokumen)	130	8	10	Tidak Tercapai
c. Tersusunnya 10 dokumen <i>design</i> surat suara pemilu (dokumen)	10	1	1	Tidak Tercapai
d. Tersusunnya 549 dokumen <i>monitoring</i> dan evaluasi pemilu (dokumen)	549	549	990	Tercapai
e. Tersusunnya 549 dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu (dokumen)	549	419	749	Tercapai
f. Tersusunnya 514 dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (dokumen)	514	338	517	Tercapai
g. Tersusunnya 514 dokumen Panitia Pemungutan Suara (PPS) (dokumen)	514	333	518	Tercapai
h. Tersusunnya 514 dokumen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (dokumen)	514	2	5	Tidak Tercapai
i. Tersedianya 12 layanan teknologi informasi pemilu (layanan)	12	10	12	Tercapai
j. Terbangunnya 6 layanan sistem aplikasi pemilu (layanan)	6	3	3	Tidak Tercapai
k. Tersusunnya 549 dokumen penyusunan anggaran pemilu(dokumen)	549	333	600	Tercapai
l. Tersusunnya 514 dokumen pembentukan badan penyelenggara <i>adhoc</i> (dokumen)	514	1	1	Tidak Tercapai
m. Terseleksinya 1.000 orang komisioner KPU (orang)	1.000	71	1.080	Tercapai
n. Tersusunnya 1 dokumen penyusunan arsip pemilu (dokumen)	34*	16	38	Tercapai
o. Tersedianya 549 layanan pengamanan tahapan pemilu (layanan)	549	304	568	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
p. Tersusunnya 549 dokumen Penyusunan BMN Logistik Pemilu (dokumen)	549	256	539	Tidak Tercapai
q. Terlaksananya 1 kegiatan sumpah/janji anggota DPR/DPD (laporan)	12*	0	12	Tercapai
r. Tersusunnya 91 laporan pemeriksaan anggaran tahapan pemilu (laporan)	91	0	83	Tidak Tercapai
s. Tersusunnya 15 rancangan peraturan/ keputusan pemilu (rancangan)	533*	199	449	Tidak Tercapai
t. Tersusunnya 549 laporan dana kampanye pemilu (laporan)	549	415	1.244	Tercapai
u. Terlaksananya penyelesaian 100 kasus bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu (kasus)	100	369	728	Tercapai
v. Terseleksinya 549 orang calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota hasil pemilu (orang)	549	879	1.846	Tercapai
w. Terseleksinya 549 orang calon anggota DPD hasil pemilu (orang)	549	4	8	Tidak Tercapai
x. Terseleksinya 5 orang calon presiden pemilu (orang)	5	0	1	Tidak Tercapai
y. Terselenggaranya pemungutan suara di 549 Satker (satker)	549	343	549	Tercapai
z. Terlaksananya rekapitulasi dan penghitungan suara di 549 Satker (satker)	549	30	54	Tidak Tercapai
aa. Tersusunnya 549 laporan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden (laporan)	549	344	578	Tercapai
ab. Terlaksananya 549 kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu (kegiatan)	549	326	578	Tercapai
ac. Tersusunnya 1 Dokumen Penetapan Hasil Pemilihan (dokumen)	1	2	2	Tercapai
ad. Tersusunnya 6 Dokumen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (dokumen)	6	4	6	Tercapai
ae. Tersusunnya 14 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu(dokumen)	14	10	14	Tercapai
af. Tersusunnya 13 Dokumen Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal Dalam	13	10	13	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (dokumen)				
ag. Tersusunnya 9 Dokumen Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu (laporan)	603*	550	583	Tidak Tercapai
ah. Tersusunnya 4 Dokumen Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc (dokumen)	106	106	106	Tercapai
ai. Tersusunnya 36 Laporan Pemberian Penghargaan (<i>Award</i>) Bagi Penyelenggara Pemilu (laporan)	36	N/A	95	Tercapai
aj. Tersusunnya 8 Dokumen Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu (dokumen)	550*	400	529	Tidak Tercapai
ak. Terselenggaranya Pendidikan Pengawasan Partisipatif di 34 Daerah (daerah)	34	34	34	Tercapai
al. Terlaksananya Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 4 Daerah Hasil <i>Piloting</i> (daerah)	4	2	4	Tercapai
am. Terbentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di 15 daerah (daerah)	15	15	15	Tercapai
an. Terlaksananya penguatan Pokja IDI di 13 Provinsi (provinsi)	13	1	13	Tercapai
ao. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 partai politik (suara sah)	121.920.762*	91.440.572	121.920.762	Tercapai
ap. Terlaksananya pepadanan data kependudukan bagi lembaga pengguna sebesar 85 persen (persen)	85	100	100	Tercapai
aq. Terlaksananya pemantapan bagi 50 orang pimpinan perwakilan daerah terpilih (orang)	50	50	50	Tercapai
ar. Tertanganinya 302 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHEU) legislatif, PHEU presiden dan wakil presiden (perkara)	302	261	262	Tidak Tercapai
as. Terlaksananya 18 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi Bagi Partai Politik/Akademisi/Penye-	18	23	23	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
lenggara Pemilu/Praktisi Hukum/Pe-nyelenggara Negara (kegiatan)				
at. Terselesaikannya 70 persen sengketa informasi (persen)	70	76	84	Tercapai
au. Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 80 persen badan publik pemerintah (persen)	80	30	35	Tidak Tercapai
av. Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD hasil pemilu legislatif 2019 bagi 15 angkatan di lingkup Kantor Pusat (angkatan)	15	15	15	Tercapai
aw. Terlaksananya pengawalan keterbukaan informasi pemilu di 80 persen Badan Publik (persen)	80	80	80	Tercapai
ax. Terlaksananya kegiatan orientasi DPRD hasil pemilu legislatif 2019 bagi 12 angkatan di lingkup regional (angkatan)	12	12	12	Tercapai
ay. Terlaksananya pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional di 20 wilayah (rekomendasi)	20	1	1	Tidak Tercapai
az. Tersusunnya hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 di 2 instansi (Pusat) dan 200 LHP (Daerah) (LHP)	2 instansi 211 LHP	200	2 instansi 211 LHP	Tercapai
KP 2. Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik				92,88
1. Peningkatan skor IDI untuk aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik				
a. Terlaksananya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas di 549 satker (satker)	549	544	544	Tidak Tercapai
b. Terlaksananya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana di 34 satker (satker)	34	50	50	Tercapai
c. Terlaksananya 2 kegiatan sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (partai politik, LSM, ormas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat) (kegiatan)	549*	501	501	Tidak Tercapai
d. Terlaksananya pendidikan pemilih kepada relawan demokrasi di 549 satker (satker)	549	50	50	Tidak Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
e. Terbentuknya rumah pintar pemilu bagi 549 satker (satker)	549	476	476	Tidak Tercapai
f. Terlaksananya pengawasan siaran TV dan radio pada 55 lembaga penyiaran (lembaga penyiaran)	55	55	55	Tercapai
g. Terlaksananya Pengawasan Siaran Pemilu 2019 di 33 Provinsi (provinsi)	33	33	33	Tercapai
h. Terlaksananya 4 laporan Survey Indeks Kualitas Siaran TV (publikasi)	4	2	4	Tercapai
i. Tersusunnya 9 dokumen Konsolidasi/Standarisasi Proses <i>Government Public Relation</i> (dokumen)	9	4	9	Tercapai
j. Terselenggaranya tata kelola komunikasi publik yang berkualitas (dokumen)	1	0	1	Tercapai
k. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman untuk 3,6 juta masyarakat Indonesia (orang)	3.600.000	3.500.000	6.600.000	Tercapai
l. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk 127,5 juta masyarakat Indonesia (orang)	127.500.000	105.000.000	142.820.000	Tercapai
m. Terlaksananya diseminasi Informasi publik yang berkualitas melalui media Pemerintah (orang)	100.000.000	86.210.000	106.040.000	Tercapai
n. Terlaksananya penyebaran informasi pemilu untuk 124,6 juta masyarakat Indonesia (orang)	124.600.000	135.735.000	194.700.000	Tercapai
o. Terwujudnya Pers yang mendukung demokrasi (peserta)	1.700	1.585	2.200	Tercapai
p. Terlaksananya penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (provinsi)	34	34	34	Tercapai
KP 3. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019				99,39
1. Menurunnya Pelanggaran Netralitas ASN				
a. Terlaksananya pembinaan netralitas ASN di 100 instansi pemerintah (instansi)	100	2	240	Tercapai
b. Terlaksananya pengawasan atas pelaksanaan netralitas ASN dalam pileg dan pilpres 2019 di 719 instansi pemerintah (instansi)	719	191	697	Tidak Tercapai
c. Terlaksananya penguatan pengawasan netralitas ASN di 25 K/L dan Daerah (K/L dan daerah)	25	25	25	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
d. Tersedianya 1 database pelanggaran disiplin (netralitas) ASN (database)	1	0	1	Tercapai
e. Terlaksananya supervisi pelaksanaan regulasi terkait netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019 (provinsi)	34	29	34	Tercapai
KP 4. Pengamanan Pemilu				100
1. Terlaksananya pemilu yang aman				
a. Jumlah pengelaran personil Polri (Polda)	33	33	33	Tercapai
b. Terlaksananya Pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk membangun kesiapan pemilu aspek ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat (provinsi)	34	34	34	Tercapai
c. Jumlah pengelaran prajurit TNI (paket)	1	1	1	Tercapai
PP 3. Pertahanan Wilayah Nasional				
KP 1. Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan				87,30
1. Terjaganya wilayah laut dan sumber daya kelautan				
a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 210 hari operasi (hari)	210	160	232	Tercapai
b. terselesaikannya pembangunan 3 unit kapal 80 meter (unit)	3	0	3	Tercapai
c. Jumlah operasi laut bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi (operasi)	4	4	4	Tercapai
d. Jumlah operasi udara, sebanyak 306 jam terbang (jam terbang)	306	111	111	Tidak Tercapai
e. Jumlah operasi udara bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi (operasi)	4	2	4	Tercapai
f. Jumlah kasus kamla yang ditangani, sebanyak 45 kasus (kasus)	45	22	21	Tidak Tercapai
g. Terlaksananya operasi kapal pengawas selama 84 hari operasi (hari)	84	67	88	Tercapai
h. Terlaksananya operasi pesawat patroli selama 84 hari operasi (hari)	84	53	65	Tidak Tercapai
i. Terlaksananya operasi <i>speed boat/rigid inflatable boat/rubber boat</i> selama 30 hari operasi (hari)	30	15	31	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
j. Terlaksananya operasionalisasi Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing (layanan)	3	3	3	Tercapai
k. 150 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel (kasus)	150	59	151	Tercapai
KP 2. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara				78,51
1. Terjaganya kawasan perbatasan dan kedaulatan negara				
a. Terbangunnya JIPP sepanjang 274,8 km (km)	274,8	100	174	Tercapai
b. Terbangunnya 4 pos pamtas (pos pamtas)	4	2	4	Tercapai
c. Terbangunnya 16 posal (posal)	16	8	16	Tercapai
d. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) radar, avionik, Penangkis Serangan Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronik (akomlek) lainnya, sebanyak 199 unit (unit)	199	17	36	Tercapai
e. Terlaksananya pra IRM patok/pilar batas negara wilayah darat sepanjang 260 km (km)	260	147	177,2	Tidak Tercapai
f. Terlaksananya 3 <i>Survey Monument Merediant</i> (MM70, 71,72) RI-PNG (<i>survey</i>)	3	3	3	Tercapai
g. Terlaksananya identifikasi/inventarisasi 10 pilar titik referensi batas negara wilayah laut dan udara (pilar)	10	10	20	Tercapai
KP 3. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi				85,67
1. Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Berdaya Gentar Tinggi				
a. Jumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, sebanyak 4 paket (paket)	4	1	1	Tidak Tercapai
b. Jumlah pemeliharaan alutsista integratif, sebanyak 1 paket (paket)	1	0	1	Tercapai
c. Jumlah pengadaan kendaraan taktis (rantis)/suku cadang kendaraan tempur (sucad ranpur), sebanyak 65 unit (unit)	65	53	69	Tercapai
d. Jumlah pengadaanmunisi kaliber kecil, sebanyak 264.148 butir (butir)	264.148	175.646	250.924	Tidak Tercapai
e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 22.987 butir (butir)	22.987	34.246	48.923	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 87 pucuk (pucuk)	87	66	87	Tercapai
g. Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur (harwat ranpur), sebanyak 47 unit (unit)	47	27	27	Tidak Tercapai
h. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang (harwat sabang), sebanyak 15 unit (unit)	15	2	12	Tidak Tercapai
i. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat angkutan air (harwat alang air), sebanyak 240 unit (unit)	240	206	240	Tercapai
j. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) senjata ringan dan khusus, sebanyak 214 unit (unit)	214	144	214	Tercapai
k. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista) arhanud sebanyak 14 pucuk (pucuk)	14	8	14	Tercapai
l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 15 pucuk (pucuk)	15	8	15	Tercapai
m. Jumlah pengadaan ranpur sebanyak 18 unit (unit)	18	4	18	Tercapai
n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 31 pucuk (pucuk)	31	0,2	31	Tercapai
o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 6 paket (paket)	6	2	6	Tercapai
p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 120 unit (unit)	210	61	61	Tidak Tercapai
q. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat udara (harwat pesud) Matra Laut sebanyak 58 unit (unit)	58	26	26	Tidak Tercapai
r. Terlaksananya pembangunan 1 dermaga KRI (dermaga)	1	0,75	1	Tercapai
s. Jumlah pengadaan peralatan komunikasi dan elektronik (komlek) sebanyak 1 paket (paket)	1	1	1	Tercapai
t. Jumlah pengadaan senjata sebanyak 1 paket (paket)	1	0,7	1	Tercapai
u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 29 unit (unit)	29	17	29	Tercapai
v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 213 pesawat (pesawat)	213	113	113	Tidak Tercapai
w. Jumlah pengadaan radar, PSU, dan alat komunikasi lainnya, sebanyak 43 unit (unit)	43	10	10	Tidak Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
x. Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak 1.129 unit (unit)	1.129	512	512	Tidak Tercapai
y. Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 3 unit (unit)	3	1	2	Tidak Tercapai
z. Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 2 paket (paket)	2	2	2	Tercapai
aa. Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 7 jenis	7	5	7	Tercapai
ab. Jumlah pengembangan rudal, sebanyak 1 prototipe (prototipe)	1	0,75	1	Tercapai
ac. Jumlah pengembangan kapal selam, sebanyak 1 paket (paket)	1	0,75	1	Tercapai
ad. Jumlah pengembangan pesawat terbang tanpa awak (PTTA), sebanyak 1 paket (paket)	1	0,75	1	Tercapai
ae. Jumlah pengembangan <i>tank boat</i> , sebanyak 1 paket (paket)	1	0,75	1	Tercapai
af. Terbangunnya 3 Pangkalan Militer TNI (pangkalan)	3	2	3	Tercapai
PP 4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi				
KP 1. Penegakan Hukum				96,53
1. Terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan				
a. Karakterisasi 20 Putusan (<i>landmark decision</i>) (putusan)	20	7	20	Tercapai
b. 720 orang di balai permasyarakatan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi dibidang pembimbing kemasyarakatan (orang)	720	320	720	Tercapai
c. 14 wilayah pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (wilayah)	14	14	14	Tercapai
d. 10 Satker <i>pilot project</i> Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI yang meningkat fungsinya (satker)	10	7	108	Tercapai
e. 325 Satker yang mengimplementasikan aplikasi Case Management System (CMS) untuk mendukung <i>pilot project</i> SPPT berbasis TI (satker)	325	220	326	Tercapai
f. 658 paket sarana prasarana TI yang akan didistribusikan ke UPT permasyarakatan (dalam rangka pelaksanaan SPPT TI) (paket)	658	550	651	Tidak Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
g. 270 peserta yang mengikuti Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu di Kemenkumham (peserta)	270	150	270	Tercapai
h. 160 peserta yang mengikuti Diklat SPPA Terpadu di MA (peserta)	160	164	164	Tercapai
i. 8 Angkatan aparat penegak hukum (apgakum) yang mengikuti Diklat Terpadu UU SPPA di Kejaksaan RI (angkatan)	8	2	8	Tercapai
j. 120 Apgakum yang mengikuti Diklat Lingkungan Hidup Terpadu di MA (apgakum)	120	0	80	Tidak Tercapai
k. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan (angkatan)	4	3	4	Tercapai
l. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat <i>Illegal Fishing</i> (angkatan)	4	2	4	Tercapai
m. 4 angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Mineral Batubara(angkatan)	4	3	4	Tercapai
n. 600 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang (penyidik)	600	404	404	Tidak Tercapai
o. Tersusunnya 1 laporan dan 400 Surat Keterangan untuk penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme pemenuhan hak korban (surat keterangan)	400	227	401 surat keterangan	Tercapai
p. Tersusunnya 1 laporan hasil pendampingan dan monev pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPTPKtP) di 5 wilayah (Jateng, Kalteng, Kepri, Maluku, DKI) (surat keterangan/konsep)	1	0	1	Tercapai
q. Tersusunnya 1 dokumen rencana aksi nasional HAM 2020-2024 (dokumen)	1	0	1 (77,51%)	Tidak Tercapai
r. 750 orang korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial (orang)	750	707	750	Tercapai
s. Tersusunnya SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak (dokumen)	1	0	1	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
t. Tersusunnya 1 dokumen SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak (dokumen)	1	1	1	Tercapai
u. 5.425 orang yang memperoleh bantuan hukum litigasi (orang)	5.425	988	9.379	Tercapai
v. 722 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi (kegiatan)	722	499	1.791	Tercapai
w. 4 kegiatan pengawasan dan pelatihan penilaian kepuasan pelaksanaan bantuan hukum(kegiatan)	4	3	4	Tercapai
x. 1.650 orang yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan paralegal (tematik) (peserta)	1.650	1.689	1.689	Tercapai
y. Tersusunnya 12 Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum (rekomendasi)	12	0	12	Tercapai
z. 15 UPT masyarakat yang melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dalam rangka penanganan over kapasitas (8 Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)/rutan perempuan, 4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 3 rehab LP/rutan) (UPT)	15	6	15 (95,94%)	Tidak Tercapai
aa. 1 UPT masyarakat yang melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dalam rangka penanganan over kapasitas (kelanjutan pembangunan LP <i>high risk</i> di Nusa Kambangan) (UPT)	1	1 (75%)	1 (100%)	Tercapai
KP 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				91,19
1. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi				
a. 2 laporan <i>monitoring</i> implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) (laporan)	2	1	2	Tercapai
b. 3.500 kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) (kegiatan)	3.500	5.233	9.269	Tercapai
c. 40 kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) (kegiatan)	40	31	39	Tidak Tercapai
d. 1 RUU tentang kebijakan peningkatan layanan dalam	1	0	1	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
mendorong transparansi kepemilikan manfaat (RUU)				
e. 4 laporan kegiatan pelaksanaan advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat (<i>Beneficiary Ownership</i>) pada K/L (laporan)	4	5	6	Tercapai
f. 60 orang aparat penegak hukum (APH) yang mengikuti pelatihan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi (orang)	60	60	60	Tercapai
g. 25 aset hasil tindak pidana korupsi yang dimanfaatkan untuk instansi penegak hokum(aset)	25	8	8	Tidak Tercapai
h. Tersusunnya 15 laporan penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan(laporan)	15	12	15	Tercapai
KP 3. Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi				91,61
1. Terbangunnya e-gov yang terintegrasi				
a. Terintegrasinya 1 sistem <i>monitoring</i> pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) dengan aplikasi keuanganPusat dan daerah (sistem)	1	0,75	1	Tercapai
b. Terintegrasinya 1 sistem perencanaan PBJP yang terintegrasi dengan Renja dan RKA KL serta sistem penganggaran daerah (sistem)	1	0,75	1	Tercapai
c. Terbangunnya 1 Simda yang terintegrasi dengan <i>e-procurement</i> dan e-Sakipdan 255 LHP penerapan SIMDA integrasi (Daerah) (LHP)	1 Simda 255 LHP	68	2 Simda 258 LHP	Tercapai
d. Penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pusat dan daerah melalui aplikasi perencanaan pembangunan daerah di 34 provinsi (provinsi)	34	34	34	Tercapai
e. Tersusunnya 2 Permen terkait Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (<i>draft</i>)	2	2	2	Tercapai
f. Terlaksananya <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan <i>e-Government</i> di 623 K/L/D (K/L/D)	623	473	623	Tercapai
g. Terlaksananya penerapan <i>e-service</i> di 500 unit pelayanan publik (unit)	500	0	421	Tidak Tercapai
h. Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik di 580 K/L/D	580	392	473	Tidak Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
dengan sistem informasi pelayanan publik KemenPANRB (K/L/D)				
i. Terkelolanya 75 simpul sistem informasi dan jaringan informasi kearsipan nasional (simpul)	75	57	75	Tercapai
j. Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis-Teknologi Informasi Komunikasi (SIKD-TIK) di: 20K/L/PTN/BUMN-73 prov/kab/kota	73	73	73	Tercapai
k. Terbangunnya infrastruktur dan interoperabilitas e-Government di 22 instansi pemerintah (instansi)	22	20	22	Tercapai
l. Terlaksananya layanan e-Government terintegrasi pada 2 sistem elektronik pemerintahan (sistem)	2	2	4	Tercapai
m. Terlaksananya pembaruan 2 modul administrasi perpajakan (modul)	2	0	0	Tidak Tercapai
n. Terlaksananya peningkatan kapasitas pada 3 sistem perbendaharaan negara (sistem)	3	0	3	Tercapai
o. Terlaksananya perluasan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada 1.376 satuan kerja (satuan kerja)	1.376	1	20.000	Tercapai
p. Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik sebanyak 1 pedoman (pedoman)	1	1	1	Tercapai
KP 4. Manajemen Talenta Nasional				96,73
1. Terbangunnya kelembagaan talenta Indonesia				
a. Tersusunnya 1 <i>grand design</i> manajemen talenta Indonesia (desain)	1	0,60	0,8	Tidak Tercapai
b. Tersusunnya 1 kebijakan pengelolaan talenta Indonesia (kebijakan)	1	0,71	1	Tercapai
c. Terlaksananya pengawasan manajemen talenta berbasis merit pada 719 instansi pemerintah (instansi)	719	490	709	Tidak Tercapai
d. Tersusunnya 1 kajian kebijakan sistem mutasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) nasional berbasis manajemen talenta (kajian)	1	0,89	1	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
e. Tersusunnya 1 instrumen dan pedoman penyelenggaraan sekolah kader (instrumen)	1	0,6	1	Tercapai
f. Tersusunnya 1 model Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA) (model)	1	0,7	1	Tercapai
g. Tersusunnya 1 kajian pemetaan kebutuhan jabatan fungsional dalam rangka percepatan pembangunan (kajian)	1	0,95	1	Tercapai
h. Terpetaknya kompetensi 2.000 JPT dan administrator (orang)	2.000	1.871	1.904	Tidak Tercapai
PP 5. Efektivitas Diplomasi				
KP 1. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri				97,44
1. Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri				
a. Jumlah Atase Ketenagakerjaan di 13 lokasi (lokasi)	13	12	12	Tidak Tercapai
b. Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan gugus tugas sebanyak 10 provinsi (provinsi)	10	6	10	Tercapai
c. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme sebanyak 5 rekomendasi (rekomendasi)	5	3	5	Tercapai
KP 2. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan				100
1. Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan				
a. Jumlah sidang/pertemuan internasional di bidang keamanan internasional dan perlucutan senjata yang diprakarsai oleh Indonesia di forum multilateral sebagai implementasi peta jalan visi 4000 <i>peacekeepers</i> periode tahun 2019 sebanyak 2 sidang (sidang)	2	8	13	Tercapai
b. Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya sebanyak 100 pulau (pulau)	100	75	664	Tercapai
c. Jumlah perundingan batas dan kerja sama wilayah negara sebanyak 5 kesepakatan (kesepakatan)	5	3	5	Tercapai
d. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerja sama perbatasan negara sebanyak 6 provinsi (provinsi)	6	4	6	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
e. Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas laut sebanyak 6 wilayah (wilayah)	6	0	6	Tercapai
f. Jumlah kesepakatan teknis perundingan batas darat sebanyak 3 wilayah (wilayah)	3	0	3	Tercapai
g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 444 pilar (pilar)	444	0	444	Tercapai
h. Jumlah kerja sama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 7 kegiatan (kegiatan)	7	4	7	Tercapai
i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 19 nomor lembar peta (NLP)	19	0	19	Tercapai
j. Jumlah landas kontinen yang tersurvei sebanyak 1 wilayah (wilayah)	1	0	1	Tercapai
KP 3. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional				97,69
1. Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional terhadap peningkatan investasi dan perdagangan				
a. Tersusunnya dokumen Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebanyak 2 dokumen (dokumen)	2	0	2	Tercapai
b. Diplomasi perikanan regional sebanyak 1 layanan (layanan)	1	N/A	1	Tercapai
c. Tersalurkannya beasiswa kemitraan negara berkembang (KNB) sebanyak 560 mahasiswa (mahasiswa)	560	404	549	Tidak Tercapai
d. Jumlah negara mitra kerja sama metrologi legal dalam rangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sebanyak 1 negara (negara)	1	1	1	Tercapai
e. Terlaksananya <i>training on records and archives</i> management dalam rangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) untuk negara Palestina dan Timor Leste sebanyak 60 peserta (peserta)	60	32	59	Tidak Tercapai
f. Jumlah kegiatan kerja sama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penanaman modal yang diikuti sebanyak 8 kegiatan (kegiatan)	8	11	13	Tercapai
g. Jumlah bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal sebanyak 8 bahan posisi (bahan)	8	11	13	Tercapai
h. Jumlah kegiatan kerja sama regional untuk meningkatkan penanaman	8	11	13	Tercapai

Sasaran/Indikator	Target	Angka Capaian Hingga		Notifikasi
		Triwulan III	Triwulan IV	
modal yang diikuti sebanyak 8 kegiatan (kegiatan)				
i. Jumlah bahan posisi pertemuan kerja sama regional bidang penanaman modal sebanyak 8 bahan posisi (bahan)	8	11	13	Tercapai
j. Jumlah kerja sama penanaman modal dengan institusi di dalam dan luar negeri sebanyak 3 MoU (MoU)	3	3	3	Tercapai
k. Jumlah forum fasilitasi minat <i>outward investment</i> kepada perusahaan nasional sebanyak 3 forum (forum)	3	2	2	Tidak Tercapai
l. Jumlah telaah peluang dan kebijakan investasi terkait <i>outward investment</i> sebanyak 1 paket (paket)	1	0	1	Tercapai
m. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk mendukung KSST sebanyak 50 orang (orang)	50	90	128	Tercapai
n. Jumlah kawasan yang dicakup dalam rangka penguatan fungsi <i>regulatory</i> pengawasan obat dan makanan di Negara Selatan-Selatan sebanyak 3 kawasan (kawasan)	3	2	3	Tercapai
o. Jumlah posisi runding dalam Perjanjian Internasional sebanyak 12 posisi (posisi)	12	5	12	Tercapai
p. Jumlah kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional sebanyak 1 kajian (kajian)	1	0	1	Tercapai
KP 4. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika				100
1. Meningkatkan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika				
a. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Indonesia Indo-Pacific <i>Maritime Dialogue</i> sebanyak 1 dokumen (dokumen)	1	1	1	Tercapai
b. Jumlah Perpres untuk penguatan Kelembagaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sebanyak 1 dokumen (dokumen)	1	0	1	Tercapai
c. Jumlah modul pengajaran mengenai ASEAN bagi guru dan buku referensi dan aktivitas ASEAN bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebanyak 2 dokumen (dokumen)	2	0	2	Tercapai

Sumber: Perhitungan data hingga Triwulan IV 2019

LAMPIRAN F

Kamus Indikator Tahun 2019

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kualitas kajian penyusunan RKP lingkup bidangnya bersifat holistik dan terintegrasi dalam prioritas pembangunan nasional
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Kualitas kajian dilihat dari kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan data terkini (update) sesuai periode data 2. memenuhi kaidah penulisan ilmiah 3. kemanfaatan kajian bagi stakeholder <p>Formula:</p> <p>Kajian dikatakan berkualitas "Baik" apabila seluruh kriteria di atas terpenuhi. Jika terpenuhi < 3 kriteria, maka kajian tersebut masuk kategori berkualitas "cukup baik".</p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kajian yang dihasilkan unit kerja.</p>
Satuan Pengukuran	-
Pengumpul Data	Seluruh unit kerja yang memiliki kajian
Sumber Data	Kajian
Jenis Perhitungan Data	-
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	Baik

IKU 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel		
% keselarasan muatan RKP 2020 Rancangan dengan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya			
Definisi:			
<ol style="list-style-type: none"> 1 \bar{x} (% keselarasan muatan RKP 2020 yang dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 2 Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yaitu 6 KP 3 Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%). B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP 			
Formulasi:			
Untuk Penanggung Jawab (PJ) KP	→	% keselarasan muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya (untuk KP)	$= \frac{\bar{x} \text{ (} \sum \text{ Jumlah muatan RKP 2020 (sasaran KP yang diampu) yang secara substansi sesuai/relevan dengan sasaran prioritas Nawacita di Rancangan RPJMN 2020-2024)}}{\sum \text{ sasaran KP yang diampu}} \times 100\%$
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang	→	% keselarasan muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya (selain PN/pembangunan bidang)	$= \frac{\bar{x} \text{ (} \sum \text{ keselarasan muatan RKP 2020 [bidang yang diampu] yang secara substansi sesuai/relevan dengan sasaran Rancangan RPJMN 2020-2024)}}{\text{Jumlah sasaran yang diampu sesuai bidangnya}} \times 100\%$
Tujuan IKU:			
IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan).			
Satuan Pengukuran	%		
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PP		
Sumber Data	Dokumen Rancangan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020		
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata		
Periode Pelaporan	Tahunan		
Target	100%		

*) Catatan: PP 1.1 menjadi contoh menyambung dengan perhitungan KP 1.1.1 sebelumnya.

IKU 2

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deskripsi IKU	% keselarasan muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya
	Definisi:
	<ol style="list-style-type: none"> 1 \bar{x} (% keselarasan muatan RKP 2020 yang dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua PP dibawah Prioritas Nasional (PN) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 2 Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) 6 KP 3 Muatan RKP 2020 dan Rancangan RPJMN 2020-2024 dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh KP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%). B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian KP (dibawah PP yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PP
	Formula:
Untuk Penanggung Jawab (PJ) PP →	$\% \text{ keselarasan muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya (untuk PP)} = \frac{\bar{x} (\sum \text{keselarasan muatan RKP 2020 [Kegiatan Prioritas] yang sesuai dengan Rancangan RPJMN 2020-2027 lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah KP dibawah PP yang diampu}} \times 100\%$
	Tujuan IKU:
	IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PP
Sumber Data	Dokumen Rancangan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

*) Catatan: PP 1.1 menjadi contoh menyambung dengan perhitungan KP 1.1.1 sebelumnya.

IKU 2

Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deskripsi IKU

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

% keselarasan muatan RKP 2020 dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya

Definisi:

- 1 \bar{x} (% keselarasan muatan RKP 2020 yang dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya) adalah hasil rata-rata dari keselarasan semua KP dibawah Program Prioritas (PP) 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
- 2 Jumlah semua KP dibawah PP yang diampu (PP 1.1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) 6 KP
- 3 Muatan RKP 2020 dan Rancangan RPJMN 2020-2024 **dikatakan selaras (mencapai target 100%)** dengan kriteria sebagai berikut:
 - A. Ketika nilai rata-rata dari perhitungan agregat seluruh PP dibawahnya memiliki nilai minimum 90% (maksimal toleransi deviasi 10%).
 - B. Secara garis besar dan substansi, seluruh capaian PP (dibawah PN yang diampu) telah mendukung penuh atas terlaksana dan ketercapaian PN

Untuk Penanggung Jawab (PJ) PN



Formula:

$$\begin{array}{l} \text{\% keselarasan muatan RKP} \\ \text{2020 dengan Rancangan} \\ \text{RPJMN 2020-2024 lingkup} \\ \text{bidangnya (untuk PN)} \end{array} = \frac{\bar{x} (\sum \text{keselarasan muatan RKP 2020 [Program Prioritas] yang dengan Rancangan RPJMN} \\ \text{2020-2024 lingkup bidangnya})}{\text{Jumlah PP dibawah PN yang diampu}} \times 100\%$$

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (tahunan dan lima tahunan).

Satuan Pengukuran
Pengumpul Data
Sumber Data
Jenis Perhitungan Data
Periode Pelaporan
Target

%

Unit kerja sektoral PJ PN

Dokumen Rancangan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020

Rata-rata

Tahunan

100%

*) Catatan: PN 1 menjadi contoh menyambung dengan perhitungan PP 1.1 sebelumnya.

IKU 2

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya	
Deskripsi IKU	Definisi:	
	Muatan adalah output K/L dalam RKP 2020 (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.	
	Formula:	
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas	$\begin{aligned} &\% \text{ keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya (untuk KP)} \\ &= \frac{\text{Jumlah output K/L dalam RKP 2020 (DPP/Lampiran C) yang selaras dalam Renja K/L}}{\text{Jumlah output K/L dalam RKP 2020 (DPP/Lampiran C)}} \times 100\% \end{aligned}$	*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang	$\begin{aligned} &\% \text{ keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya (Pembangunan Bidang)} \\ &= \frac{\text{Jumlah output dalam RKP 2020 yang sesuai Renja K/L dalam bidangnya}}{\text{Jumlah output dalam RKP 2020 sesuai bidangnya}} \times 100\% \end{aligned}$	
	Tujuan IKU:	
	IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).	
Satuan Pengukuran	%	
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L	
Sumber Data	Dokumen RKP 2020 (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L	
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata	
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)	IKU 3
Target	100%	

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi: Muatan adalah output K/L dalam RKP 2020 (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.
	Formula:
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Program Prioritas →	$\begin{aligned} & \text{\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya (untuk PP)} \\ = & \frac{\bar{x} \text{ (\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah KP dibawah PP yang diampu}} \times 100\% \end{aligned}$ <p>*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP</p>
	Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
Sumber Data	Dokumen RKP 2020 (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	100%

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi: Muatan adalah output K/L dalam RKP 2020 (DPP/Lampiran C) yang diterjemahkan dalam Renja K/L.
	Formula:
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Prioritas Nasional →	$\begin{aligned} & \text{\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya (untuk PN)} \\ & = \frac{\bar{x} \text{ (\% keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya)}}{\text{Jumlah PP dibawah PN yang diampu}} \times 100\% \end{aligned}$ <p>*) catatan: Sasaran dalam KP yang diterjemahkan dalam Renja K/L dianggap 1 apabila semua kegiatan dalam Renja K/L relevan dalam sasaran KP</p>
	Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral yang memiliki mitra kerja K/L
Sumber Data	Dokumen RKP 2020 (Daftar Proyek Prioritas/DPP/Lampiran C) dan Renja K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	100%

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya	
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Muatan adalah sasaran KP 1.1.1 (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.</p> <p>Formula:</p> <p> Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas → $\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP 2020 (untuk KP)} = \frac{\text{Jumlah sasaran KP 1.1.1 yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L}}{\text{Jumlah sasaran KP dalam RKP}} \times 100\%$ </p> <p> Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang → $\% \text{ keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP 2020 (untuk bidang)} = \frac{\text{Jumlah sasaran bidang yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L}}{\text{Jumlah sasaran bidang dalam RKP}} \times 100\%$ </p> <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>	
Satuan Pengukuran	%	
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP, Unit Kerja sektoral PJ Bidang	
Sumber Data	Dokumen RKP 2020 dan RKA K/L	
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata	
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)	
Target	100%	

Catatan: KP 1.1.1 menjadi contoh. Perhitungan untuk Pembangunan Bidang mengikuti sesuai dengan Bidanganya

IKU 4

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.</p> <p>Formula:</p> $\bar{x} \text{ (\% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP 2020 [Kegiatan Prioritas])} = \frac{\text{\% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP 2020 (untuk PP)}}{\text{Jumlah KP di bawah PP yang diampu}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP
Sumber Data	Dokumen RKP 2020 dan RKA K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Program Prioritas



Catatan: PP 1.1 menjadi contoh menyambung dengan perhitungan KP 1.1.1 sebelumnya.

IKU 4

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi:
	Muatan adalah sasaran PP 1.1 (Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan) yang diterjemahkan dan dianggarkan dalam RKA K/L.
	Formula:
	$\bar{x} \text{ (\% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP 2020 [Program Prioritas])} = \frac{\text{\% keselarasan muatan RKA K/L dengan Bidang RKP 2020 (untuk PN)}}{\text{Jumlah PP di bawah PN yang diampu}} \times 100\%$
	Tujuan IKU:
	IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional tahunan antar fungsi pemerintah (Bappenas dan K/L).
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja Sektoral PJ KP
Sumber Data	Dokumen RKP 2020 dan RKA K/L
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 4)
Target	100%

Untuk Penanggung Jawab (PJ) Prioritas Nasional



Catatan: PP 1.1 menjadi contoh menyambung dengan perhitungan KP 1.1.1 sebelumnya.

IKU 4

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi: Informasi hasil pemantauan/evaluasi adalah laporan hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan sesuai bidangnya dalam 1 tahun, termasuk Lampid, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN.
	Formula: $\begin{array}{l} \text{\% Ketersediaan} \\ \text{informasi hasil} \\ \text{pemantauan/ evaluasi} \\ \text{atas pelaksanaan} \\ \text{rencana} \\ \text{pembangunan} \\ \text{lingkup bidangnya} \end{array} = \frac{\text{Jumlah informasi hasil pemantauan/evaluasi}}{\text{Jumlah rencana kegiatan pemantauan/evaluasi}} \times 100\%$
	Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian laporan pemantauan/laporan evaluasi sesuai bidangnya.
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidangnya, termasuk prioritas nasional).
Sumber Data	Laporan pemantauan, laporan evaluasi
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	100

IKU 5

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian lingkup bidangnya yang ditindaklanjuti oleh K/L/D	
Deskripsi IKU	Definisi:	
	Rekomendasi merupakan hasil capaian pelaksanaan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKP 2019, yang harus ditindaklanjuti oleh K/L/D pada tahun 2019. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti jika K/L/D telah melakukan rekomendasi tersebut. Keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan rekomendasi tsb tidak menjadi bagian yang diukur dalam indikator ini.	
	Formula:	
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Kegiatan Prioritas	$\text{Realisasi capaian sasaran/target (untuk PN/PP/KP)} = \frac{\text{Capaian sasaran/target/indikator (PN/PP/KP yang diampu) setelah pelaksanaan}}{\text{Target/sasaran dalam PN/PP/KP yang diampu}} \times 100\%$	
Untuk Penanggung Jawab (PJ) Bidang	$\text{Realisasi capaian sasaran/target (untuk bidang)} = \frac{\text{Capaian sasaran/target/indikator bidang setelah pelaksanaan}}{\text{Target/sasaran dalam bidang yang diampu}} \times 100\%$	
	Tujuan IKU:	
	IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai sasaran/target.	
Satuan Pengukuran	%	
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral dan PEPP (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian sesuai bidang tugasnya, termasuk prioritas nasional)	
Sumber Data	Laporan Pemantauan & Pengendalian, Laporan Evaluasi, Dokumen perencanaan penganggaran K/L, Laporan K/L, dan dokumen lainnya, Laporan Capaian PN/PP/KP dari Kedeputusan PEPP, dan analisis capaian dari tiap KP/PP/PN yang diampu dan pembangunan bidang	
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata	
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2018)	
Target	100% (seluruh rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L/D)	
	IKU 6	

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% K/L/D yang melaksanakan penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Penugasan (tertentu/khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN. Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan dalam TOR atau dokumen sejenis.</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ K/L/D yg melaksanakan penugasan lingkup bidangnya sesuai dengan rencana} = \frac{\text{Jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan}}{\text{Jumlah K/L/D yang seharusnya melaksanakan penugasan sesuai rencana}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi rencana K/L/D pelaksana penugasan dengan realisasi K/L/D pelaksana penugasan.</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.
Sumber Data	Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	100

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% penyelesaian penugasan tertentu
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <p>Penugasan tertentu (khusus) adalah segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari arahan Presiden/arahan Menteri PPN. Rencana adalah rencana penyelesaian penugasan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan penugasan dalam TOR atau dokumen sejenis.</p> <p>Formula:</p> $\% \text{ penyelesaian penugasan tertentu} = \frac{\text{Jumlah penugasan tertentu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah penugasan tertentu yang diberikan}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU:</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian penugasan tertentu (khusus) .</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja yang memiliki penugasan untuk mempercepat pembangunan nasional sesuai bidangnya.
Sumber Data	Dokumen TOR/sejenis, Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi
Jenis Perhitungan Data	Akumulasi
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada bulan Desember 2019)
Target	100

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan rancangan RPJMN 2020-2024 dengan RPJP lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muatan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJMN 2020-2024 sesuai lingkup bidangnya Muatan RPJPN adalah arah kebijakan/sasaran pokok RPJPN 2005-2025 sesuai lingkup bidangnya 2 Muatan RKP dan rancangan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Terpetakan Langsung (TL): substansi sasaran/target rancangan RPJMN sesuai dengan sasaran pokok di B. Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran pokok di RPJP (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll) <p>Formula:</p> $\% \text{ keselarasan muatan RPJMN dengan RPJP lingkup bidangnya} = \frac{\text{Jumlah sasaran pokok Rancangan RPJMN 2020-2024 yang secara substansi sesuai dengan sasaran di RPJP 2005-2025}}{\text{Jumlah sasaran RPJP 2005-2025 yang sesuai substansi lingkup bidangnya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ PN, PP, KP
Sumber Data	Dokumen Rancangan RPJMN dan RPJP
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

IKU 9

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	% keselarasan muatan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dengan dengan rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Muatan rancangan Renstra K/L adalah sasaran/target rancangan Renstra K/L 2020-2024 sesuai lingkup bidangnya Muatan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah sasaran/target bidang/subbidang Pembangunan sesuai lingkup bidangnya Muatan RKP dan RPJMN dikatakan selaras (mencapai target 100%) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Terpetakan Langsung (TL): subsntansi program/sasaran dlm rancangan Renstra KL sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024 Terpetakan Tidak Langsung (TTL): jika terdapat sasaran/indikator baru yang muncul namun masih secara substansi/relevan sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024 (dengan catatan terdapat justifikasi dari sasaran/indikator yang baru. Seperti: Perubahan dasar regulasi, Inpres, dll) <p>Formula:</p> $\text{\% keselarasan muatan RKP dengan Rancangan RPJMN 2020-2024 lingkup bidangnya (untuk KP)} = \frac{\text{Jumlah sasaran substansi program di rancangan Renstra KL 2020-2024 sesuai dengan sasaran di rancangan RPJMN 2020-2024}}{\text{Jumlah sasaran RPJMN 2020-2024 yang sesuai substansi bidangnya}} \times 100\%$ <p>Tujuan IKU: IKU ini bertujuan untuk mengukur sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan nasional antar waktu (lima tahunan).</p>
Satuan Pengukuran	%
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral PJ Kegiatan Prioritas (KP) dan PJ Pembangunan Bidang
Sumber Data	Dokumen rancangan RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L 2020-2024
Jenis Perhitungan Data	Rata-rata
Periode Pelaporan	Tahunan
Target	100%

IKU 10

Sasaran Strategis	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya
Deskripsi IKU	Definisi:
	Rancangan Perpres RKP 2020 lingkup bidangnya adalah rancangan akhir RKP 2020 lingkup bidangnya.
	Formula:
	-
Tujuan IKU:	
	IKU ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Rancangan RKP 2020.
Satuan Pengukuran	dokumen
Pengumpul Data	Unit kerja sektoral
Sumber Data	Dokumen Rancangan Perpres RKP 2020
Jenis Perhitungan Data	-
Periode Pelaporan	Tahunan (pengukuran dilakukan pada triwulan 2)
Target	1